

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah secara makro berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang berasal dari pungutan pajak, pungutan retribusi dan dana perimbangan maupun dari lain-lain pendapatan yang sah;
- b. Menyediakan informasi mengenai ketersediaan penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- c. Menyediakan informasi mengenai cara memperoleh sumber daya ekonomi sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan;
- d. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatan dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, baik yang mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;
- g. Menyediakan informasi mengenai nilai suatu aset tetap yang disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- h. Menyajikan informasi mengenai kegiatan operasional pendapatan-LO dari kegiatan operasional, Beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, pos luar biasa, surplus/defisit-LO dan informasi mengenai nilai penyusutan untuk masing-masing periode.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang menjadi acuan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara (pasal 23 ayat 1 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- t. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 70 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- v. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 21 Tahun 2018 Tentang perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- w. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon;
- x. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018;
- y. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 55 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

	1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
	1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
Bab II		Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD
	2.1	Ekonomi Makro
	2.2	Indikator Makro Pembangunan Daerah
	2.3	Kebijakan Keuangan
	2.3.1	Kebijakan Pendapatan Daerah
	2.3.2	Kebijakan Belanja Daerah
	2.3.3	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan
	2.3.4	Pembiayaan Daerah
Bab III		Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
	3.1	Iktisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
	3.2	Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
Bab IV		Kebijakan Akuntansi
	4.1	Entitas Akuntansi /Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
	4.2	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.3	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
	4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
	4.4.1	Pendapatan LRA
	4.4.2	Belanja
	4.4.3	Pendapatan LO
	4.4.4	Beban
	4.4.5	Aset
	4.4.5	Kewajiban
	4.4.7	Ekuitas
	4.4.8	Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Pertama Kali
Bab V		Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Realisasi Anggaran
	5.1	Pendapatan
	5.1.1	Pendapatan Asli Daerah
	5.1.2	Pendapatan Transfer
	5.1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
	5.2	Belanja

	5.2.1	Belanja Operasi
	5.2.2	Belanja Modal
	5.2.3	Belanja Tidak Terduga
	5.2.4	Belanja Transfer
	5.3	Pembiayaan Daerah
	5.3.1	Penerimaan Pembiayaan
	5.3.2	Pengeluaran Pembiayaan
	5.3.3	Perhitungan Anggaran
Bab VI		Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Operasional
	6.1	Pendapatan
	6.1.1	Pendapatan Asli Daerah
	6.1.2	Pendapatan Transfer
	6.1.3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah
	6.2	Beban
	6.2.1	Beban Pegawai
	6.2.2	Beban Persediaan
	6.2.3	Beban Jasa
	6.2.4	Beban Pemeliharaan
	6.2.5	Beban Perjalanan Dinas
	6.2.6	Beban Hibah
	6.2.7	Beban Bantuan Sosial
	6.2.8	Beban Penyusutan dan Amortisasi
	6.2.9	Beban Penyisihan Piutang
	6.2.10	Beban Transfer
	6.2.11	Belanja Tidak terduga
	6.3	Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional
	6.4	Beban Luar Biasa
BAB VII		Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Neraca
	7.1	Aset
	7.1.1	Aset Lancar
	7.1.2	Investasi Jangka Panjang
	7.1.3	Aset Tetap
	7.1.4	Dana Cadangan
	7.1.5	Aset Lainnya
	7.2	Kewajiban
	7.2.1	Kewajiban Jangka Pendek
	7.2.2	Kewajiban Jangka Panjang

7.3 Ekuitas Dana

Bab VIII	Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas
8.1	Penjelasan Laporan Arus Kas
8.1.1	Definisi Aktivitas Arus Kas
8.1.2	Posisi Kas
Bab IX	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Perubahan Ekuitas
9.1	Ekuitas Awal
9.2	Surplus/Defisit-LO
9.3	RK PPKD
9.4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar
9.5	Ekuitas Akhir
Bab X	Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan Laporan Perubahan Sisa Anggaran Lebih
10.1	Saldo Anggaran Lebih Awal
10.2	Penggunaan Saldo Anggaran Lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
10.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)
10.4	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
10.5	Saldo Anggaran Lebih Akhir
10.6	Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Berdasarkan Penerapan Basis Akrua, untuk Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, sedangkan Untuk Entitas Pelaporan Menggunakan Basis akrua
10.7	Hal-hal Penting yang Perlu Diungkapkan
Bab XI	Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

Asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.

Berdasarkan hasil analisis bahwa sektor-sektor yang termasuk dalam basis ekonomi di Kabupaten Cirebon dan sektor unggulan Kabupaten Cirebon sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh Kabupaten Cirebon adalah Pertanian, Kehutanan, Perikanan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate, Jasa Perusahaan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dan Jasa lainnya. Sementara itu, berdasarkan indikator kinerja pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon 2014-2019, pencapaian target indikator makro pembangunan Tahun 2017-2018 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel. 2.1. Indikator Makro Pembangunan Daerah 2017-2018

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018*
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Cirebon	42.038.256.968.000	45.189.465.320.000
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Cirebon	30.331.983.650.000	31.645.479.500.000
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon	4,06	4,33
4	Indeks Implisit Kabupaten Cirebon	138,59	142,80
5	Laju Implisit Kabupaten Cirebon / Inflasi	3,90	3,03
6	Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon	2.159.453	2.176.109
7	Pendapatan Perkapita PDRB ADHB Jawa Barat	19.467.087,67	20.766.179,78
8	Pendapatan Perkapita PDRB ADHK Jawa Barat	14.046.143,38	14.542.232,62
9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon	0,77	0,77
10	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon	292.257	287.763
11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon	13,53	13,22

Sumber : Bidang Anggaran 2018

Keterangan : *) Angka sementara 2018

2.2 Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan daerah merupakan gambaran kondisi Kabupaten Cirebon secara makro dilihat dari sisi ekonomi, penduduk miskin dapat dilihat pada Tabel. 2.2.

Tabel. 2.2. Indikator Makro Pembangunan Daerah 2017-2018

No	Indikator Makro Ekonomi	Realisasi Tahun 2017	Realisasi Tahun 2018*
1	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Cirebon	42.038.256.968.000	45.189.465.320.000
2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Cirebon	30.331.983.650.000	31.645.479.500.000
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cirebon	4,06	4,33
4	Indeks Implisit Kabupaten Cirebon	138,59	142,80
5	Laju Implisit Kabupaten Cirebon / Inflasi	3,90	3,03
6	Jumlah Penduduk Kabupaten Cirebon	2.159.453	2.176.109
7	Pendapatan Perkapita PDRB ADHB Jawa Barat	19.467.087,67	20.766.179,78
8	Pendapatan Perkapita PDRB ADHK Jawa Barat	14.046.143,38	14.542.232,62
9	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Cirebon	0,77	0,77
10	Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon	292.257	287.763
11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Cirebon	13,53	13,22

Sumber : Bidang Anggaran 2018
Keterangan : *) Angka sementara 2018

Tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon dapat diukur dari perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tahun berjalan terhadap tahun sebelumnya. Dari perubahan PDRB tersebut, terjadi peningkatan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) sebesar **7,50%** dari angka **Rp42.038.256.968.000,00** tahun 2017 menjadi **Rp45.189.465.320.000,00** pada tahun 2018. Selain itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) yang juga merupakan barometer pertumbuhan ekonomi secara riil dari Tahun 2017 mencapai **Rp30.331.983.650.000,00** atau meningkat sebesar **4,33%** pada Tahun 2018 sebesar **Rp31.645.479.500.000,00**.

2.3 Kebijakan Keuangan

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang secara teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018, bahwa APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun

anggaran, yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Sistem penganggaran dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Pendapatan Asli Daerah:
 - 1) Pajak Daerah;
 - 2) Retribusi Daerah;
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Dana Perimbangan:
 - 1) Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak;
 - 2) Dana Alokasi Umum;
 - 3) Dana Alokasi Khusus.
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
 - 1) Pendapatan Hibah;
 - 2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya;
 - 3) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus;
 - 4) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya.
2. Belanja Daerah, terdiri dari:
 - a. Belanja Tidak Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Hibah;
 - 3) Belanja Bantuan Sosial;
 - 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa;
 - 5) Belanja Bantuan Keuangan;
 - 6) Belanja Tidak Terduga.
 - b. Belanja Langsung:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang dan Jasa;
 - 3) Belanja Modal.
3. Pembiayaan Daerah, terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah:
 - 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya;

- 2) Pencairan Dana Cadangan;
 - 3) Penerimaan Piutang Daerah.
- b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah:
- 1) Pembentukan Dana Cadangan;
 - 2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
 - 3) Pembayaran Pokok Utang.

2.3.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk terpenuhinya peningkatan Pendapatan Daerah Tahun 2018. Pendapatan Daerah pada tahun 2018 ditargetkan senilai **Rp 3.705.608.291.386,00** yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah ditargetkan senilai **Rp569.157.006.675,00** terdiri dari :

- a) Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp190.000.000.000,00**
- b) Retribusi Daerah senilai **Rp46.177.974.350,00;**
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai **Rp7.894.000.000,00;**
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah senilai **Rp325.085.032.325,00.**

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer ditargetkan senilai **Rp2.793.363.376.711,00** terdiri dari:

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan senilai **Rp2.105.217.579.359,00** terdiri dari:
 1. Dana Bagi Hasil Pajak senilai **Rp77.416.118.000,00**
 2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak senilai **Rp19.868.665.359,00;**
- b) Dana Alokasi Umum senilai **Rp1.500.538.688.000,00** Dana Alokasi Khusus senilai **Rp507.394.108.000,00** Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya senilai **Rp405.992.221.000,00** yang diperoleh dari Dana Desa dari APBN senilai **Rp 370.242.221.000,00** dan Dana Insentif Daerah (DID) senilai **Rp35.750.000.000,00**
- c) Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi ditargetkan senilai **Rp282.153.576.352,00** yang diperoleh dari Pendapatan bagi hasil pajak senilai **Rp282.153.576.352,00.**

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ditargetkan senilai **Rp343.087.908.000,00** yang diperoleh dari Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya senilai **Rp128.008.708.000,00** dan pendapatan hibah **Rp215.079.200.000,00**

Dalam upaya memenuhi target-target pendapatan daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap potensi pajak dan retribusi daerah yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pajak dan retribusi daerah, mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh pemerintah daerah melalui perbaikan administrasi dan manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan non-konvensional, mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, dan mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai kebutuhan daerah, pembaharuan database dan pemetaan data tentang potensi pendataan daerah sebagai data dasar penghitungan PAD, meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan SKPD penghasil, mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak daerah dan wajib retribusi daerah, dan perluasan sumber-sumber penerimaan daerah dengan tetap menjaga agar tidak terjadi ekonomi biaya tinggi yang memberatkan masyarakat.

Realisasi Pendapatan Daerah selama tahun anggaran 2018 adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi PAD pada tahun 2018 senilai **Rp584.810.843.481,60** mengalami penurunan senilai **Rp194.527.008.796,25** atau sebesar **24,96%** dari realisasi tahun 2017 senilai **Rp779.337.852.277,85**. Realisasi PAD pada tahun 2018 terdiri dari :

- a) Pendapatan Pajak Daerah senilai **Rp207.896.011.946,00** atau mengalami peningkatan senilai **Rp21.754.103.485,00** atau sebesar **11,69%** dari realisasi tahun 2017 yang mencapai senilai **Rp186.141.908.461,00**;
- b) Pendapatan Retribusi Daerah senilai **Rp42.630.642.182,00** atau mengalami peningkatan senilai **Rp2.456.802.493,00** Atau sebesar **6,12%** dari realisasi tahun 2017 yang mencapai senilai **Rp40.173.839.689,00**;
- c) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan senilai **Rp7.895.373.711,00** mengalami peningkatan senilai **Rp680.111.344,00** atau sebesar **9,43%** dari realisasi tahun 2017 yang mencapai senilai **Rp7.215.262.367,00**;

- d) Lain-lain PAD yang sah senilai **Rp326.388.815.642,60** mengalami peningkatan senilai **Rp219.418.026.118,25** Atau sebesar **40,20%** dari realisasi tahun 2017 yang mencapai senilai **Rp545.806.841.760,85**.

2. Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer pada tahun 2018 senilai **2.070.427.928.565,00** mengalami penurunan senilai **Rp4.087.275.493,00** atau sebesar **0,20%** dari realisasi tahun 2017 yang mencapai **Rp2.074.515.204.058,00** Penurunan tersebut diperoleh dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar **11,34%** Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar **9,95%**. Namun terdapat peningkatan, Dana Penyesuaian sebesar **10,32%**, Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar **10,40%**, Dana Alokasi Umum sebesar **0,36%**, Dana Alokasi Khusus sebesar **0,26%**.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah **Rp339.651.690.116,00** pada tahun 2018 senilai mengalami kenaikan senilai **Rp225.557.106.616,00** atau sebesar **26,15%** dari tahun 2017 senilai **Rp114.094.583.500,00**. Kenaikan tersebut diperoleh dari Bantuan Keuangan Dari Provinsi sebesar **10,10%** dan Pendapatan Hibah sebesar **100%**

2.3.2 Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diarahkan untuk terpenuhinya Belanja Daerah tahun 2018. Belanja Daerah pada tahun 2018 dialokasikan senilai **Rp4.003.036.048.497,51** terdiri dari:

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung dialokasikan senilai **Rp2.191.816.598.519,51** untuk kebutuhan :

- a. Belanja Pegawai senilai **Rp1.527.606.253.591,00**
- b. Belanja Hibah senilai **Rp63.412.500.000,00** yang dipergunakan untuk kebutuhan Bantuan Hibah Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Belanja Bantuan Sosial senilai **Rp2.560.476.000,00** yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan peningkatan kesejahteraan sosial;
- d. Belanja Bagi Hasil senilai **Rp20.472.671.069,00** yang dipergunakan untuk kebutuhan percepatan dan penguatan pembangunan pedesaan;
- e. Belanja Bantuan Keuangan senilai **Rp544.151.107.260,00** yang dipergunakan untuk membiayai kebutuhan bantuan keuangan kepada

pemerintahan desa dan belanja bantuan keuangan kepada partai politik;

- f. Belanja Tidak Terduga diproyeksikan senilai **Rp33.613.590.599,51**, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, bencana alam dan bencana sosial serta pengembalian pendapatan tahun lalu.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung dialokasikan senilai **Rp1.811.219.449.978,00** untuk kebutuhan Belanja Pegawai senilai **Rp251.844.533.290,00** Belanja Barang dan Jasa senilai **Rp919.406.732.226,00** dan Belanja Modal senilai **Rp639.968.184.462,00**.

Realisasi Belanja Daerah tahun 2018 mengalami peningkatan senilai **2,32%** sebagai berikut:

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja Tidak Langsung pada tahun 2018 senilai **Rp2.099.753.324.736,00** mengalami kenaikan senilai **6,20%** dari tahun 2017 senilai **Rp122.665.037.376,00**. Kenaikan Belanja Tidak Langsung tersebut diperoleh dari kenaikan Belanja Pegawai senilai **6,62%**, Belanja Hibah senilai **82,79%**, belanja Bantuan Sosial sebesar **76,84%**, belanja tidak terduga sebesar **100,00%**, belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa mengalami peningkatan sebesar **6,28%**, serta bantuan keuangan mengalami kenaikan senilai **0,09%**

2. Belanja Langsung

Realisasi Belanja Langsung pada tahun anggaran 2018 senilai **Rp1.581.711.732.662,38** mengalami penurunan sebesar **2,42%** dari tahun 2017 senilai **Rp1.621.006.636.867,07**. Penurunan realisasi Belanja Langsung tersebut diperoleh dari realisasi Belanja Pegawai sebesar **0,41%** dan Belanja Modal sebesar **16,18%** sedangkan untuk realisasi Belanja Barang dan Jasa mengalami kenaikan senilai **7,84%**,

2.3.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (Urusan Wajib dan Urusan Pilihan) diarahkan sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dalam upaya Pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah terhadap upaya mendorong pencapaian target kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada

Tahun 2014. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan mengacu pada Standar Satuan Harga;

- b. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dan diselaraskan dengan indikasi program dan kegiatan tahunan daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang dalam RTRW;
- c. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan diarahkan dan disinergikan dengan sasaran program dan kegiatan pembangunan Tahun 2014 sesuai sasaran standar pelayanan minimum dan tujuan pembangunan *Millenium Development Goals* (MDGs);
- d. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan wajib mengakomodasi program dan kegiatan hasil Musrenbang tingkat Kecamatan melalui pendekatan pola penganggaran PIK (Pagu Indikatif Kewilayahan);
- e. Belanja Urusan pemerintahan daerah baik Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD, diarahkan sebagaimana poin a, b, c dalam penentuan pagu anggarannya dihitung melalui pendekatan pola PIS (Pagu Indikatif Sektoral).

Kebijakan belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah diarahkan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Efisiensi belanja pegawai pada belanja langsung, terutama untuk belanja pegawai yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan ditetapkan 5,00% dari plafon anggaran kegiatan pada masing-masing SKPD kecuali untuk kegiatan khusus yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Cirebon;
- b. Efisiensi belanja barang dan jasa khususnya belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, jumlah pegawai dan volume pekerjaan, serta memperhitungkan persediaan barang tahun anggaran 2018;
- c. Mengutamakan produksi dalam negeri dan melibatkan usaha mikro dan usaha kecil;
- d. Belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding baik luar negeri maupun dalam negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi;
- e. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya terkait dengan pengembangan SDM yang tempat penyelenggaranya diluar daerah dilakukan secara selektif mempertimbangkan urgensi dan kompetensi;
- f. Penyediaan belanja barang dan jasa menggunakan Lelang Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) yang diatur melalui Peraturan Bupati Cirebon;
- g. Pembatasan alokasi biaya penyelenggaraan rapat-rapat, workshop, seminar, dan lokakarya dan sejenisnya diprioritaskan menggunakan fasilitas milik pemerintah daerah dengan mengikutsertakan narasumber berasal dari praktisi atau para ahli;
- h. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan sesuai Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan

memperhatikan Permendagri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 11 Tahun 2007;

- i. Belanja perjalanan dinas luar daerah disatukan kedalam satu kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah;
- j. Pembatasan belanja modal SKPD yang selektif berdasarkan hasil evaluasi dan kajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya;
- k. Belanja langsung kecamatan untuk kegiatan KDH di kecamatan dialokasikan per seksi;
- l. Mendorong adanya pelayanan dan kinerja pemerintah daerah berbasis elektronik (*e-government*).

2.3.4 Pembiayaan Daerah

Alokasi anggaran pembiayaan daerah tahun 2018, dari sisi pengeluaran direalisasikan senilai **Rp25.398.310.919,00** terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah senilai **Rp4.772.881.700,00** serta terdapat Pembayaran Pokok Utang senilai **Rp20.625.429.219**, berasal dari Pembayaran pinjaman ke PT BANK JABAR BANTEN, Tbk. Dari RSUD WALED senilai **Rp19.800.000.000,00** dan pembayaran utang ke Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) senilai **Rp825.429.219,00**.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan perubahan APBD ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Sampai dengan tahun anggaran 2018 berakhir, realisasi APBD menunjukkan Pendapatan Daerah senilai **Rp3.683.068.266.639,60** atau **99,39%** dari anggaran yang telah ditetapkan senilai **Rp3.705.608.291.386,00**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp91.525.190.397,75** atau sebesar **2,55%** dari realisasi Tahun 2017 yang mencapai senilai **Rp3.591.543.076.241,85**.

Belanja Daerah terealisasi senilai **Rp3.681.465.057.398,38** atau **91,97%** dari anggaran yang telah ditetapkan senilai **Rp4.003.036.048.497,51**. Belanja daerah terdiri dari belanja dan transfer.

Belanja terealisasi senilai **Rp3.120.167.307.160,38** atau **90,74%** dari anggaran yang telah ditetapkan senilai **Rp3.438.412.270.168,51**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp81.757.740.119,31** atau **2,69%** dari realisasi Tahun 2017 yang mencapai senilai **Rp3.038.409.567.041,07**.

Transfer terealisasi senilai **Rp561.297.750.238,00** atau **99,41%** dari anggaran yang telah ditetapkan senilai **Rp564.623.778.329,00**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.612.393.052,00** atau **0,29%** dari realisasi tahun 2017 yang mencapai senilai **Rp559.685.357.186,00**.

Dengan demikian terdapat surplus antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah senilai **Rp1.603.209.241,22**. Sementara realisasi Pembiayaan Daerah Netto pada Tahun Anggaran 2018 adalah senilai **Rp298.454.875.411,51** atau **100,35%** dari anggaran senilai **Rp297.427.757.111,51**. Realisasi APBD ini merupakan pengungkapan atas kegiatan keuangan Pemerintah Kabupaten Cirebon yang menunjukkan ketaatan terhadap pelaksanaan APBD serta perubahannya.

3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan

a. Permasalahan dan solusi Pendapatan Asli Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penerimaan PAD adalah:

- 1) Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayarannya secara tepat waktu serta pemahaman terhadap ketentuan pemberlakuan pajak daerah, masih perlu terus ditingkatkan;

- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana layanan perpajakan belum seluruhnya terstandarisasi sesuai kebutuhan dan perubahan regulasi yang ada;
- 3) Belum seluruh wajib pajak yang terdaftar di wilayah Kabupaten Cirebon, melaporkan kegiatan usahanya secara rutin;
- 4) Pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan retribusi yang belum optimal;
- 5) Masih belum optimalnya kualitas aparatur pengelola retribusi;
- 6) Tingkat kepatuhan wajib retribusi yang perlu terus ditingkatkan;
- 7) Keterbatasan sosialisasi dan penyebaran informasi tentang peraturan pajak dan retribusi sehingga belum sepenuhnya masyarakat membayar kewajibannya terhadap pajak daerah;
- 8) Belum optimalnya ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah secara menyeluruh;
- 9) Penegakan sanksi belum diterapkan sepenuhnya.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan penerimaan PAD adalah:

- 1) Optimalisasi intensifikasi pendapatan pajak daerah melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai pihak terkait dan penertiban administrasi, seperti dilakukan operasi gabungan dengan mitra POLRES, dan penelusuran/sensus. Selain itu terus dilakukan penyempurnaan regulasi dasar penetapan pajak daerah dan dasar pemungutan pajak daerah;
- 2) Peningkatan standarisasi sarana dan prasarana pelayanan melalui pemanfaatan kegiatan revitalisasi gedung;
- 3) Penyempurnaan ketatalaksanaan pelayanan perpajakan, melalui perbaikan dan penambahan SOP, Standar Pelayanan, pemeliharaan ISO 9001:2008, penambahan *outlet* pelayanan, peningkatan layanan info pajak dan retribusi serta penancangan layanan pajak dan retribusi pada ATM Bank BJB yang tersebar di seluruh titik ATM milik Bank BJB;
- 4) Pemenuhan sarana prasarana dan fasilitas pelayanan lainnya sesuai dengan upaya pemenuhan standar pelayanan secara bertahap;
- 5) Penambahan aparatur pengelola retribusi yang potensial, dengan melakukan alih tugas antar OPD lingkup pemerintah kabupaten serta melanjutkan keperansertaannya dalam pelaksanaan diklat teknis/fungsional untuk para pengelola retribusi bersangkutan;
- 6) Menyempurnakan model dan metode sosialisasi peraturan daerah tentang retribusi daerah secara berkesinambungan;
- 7) Melakukan inovasi dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi yang memudahkan wajib pajak dan wajib retribusi dalam melakukan pembayaran;
- 8) Peningkatan kegiatan sosialisasi melalui berbagai cara (pemasangan spanduk/*billboard*, penyebaran *booklet* pajak) dan *event* (*talk show* di

- radio, televisi lokal) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat (wajib pajak) dalam membayar pajak dan retribusi;
- 9) Intensifikasi dan ekstensifikasi upaya penagihan aktif oleh petugas secara jemput bola kepada wajib pajak;
 - 10) Melakukan verifikasi dan validasi data antara potensi, target dan realisasi pajak;
 - 11) Menggali potensi pendapatan asli daerah.

b. Permasalahan dan solusi Belanja Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam Belanja Daerah adalah:

- 1) Penyusunan anggaran program belum seluruhnya dilakukan berdasarkan analisis standar belanja sehingga efisiensi dan efektivitas alokasi besaran anggaran belum optimal;
- 2) Proses penganggaran masih belum memperhatikan dengan cermat waktu pelaksanaan program dan kegiatan;
- 3) Penyusunan anggaran program dan kegiatan belum selaras dengan capaian target kinerja;
- 4) Adanya berbagai perubahan peraturan perundangan dari pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat;
- 5) Proses administrasi pengelolaan anggaran dan pencairan anggaran masih cukup panjang;
- 6) Pengguna Anggaran belum melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan optimal.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam Belanja Daerah adalah:

- 1) Pengendalian dan pengukuran untuk alokasi anggaran masing-masing kegiatan untuk menilai kewajaran pembebanan biaya dalam pelaksanaan kegiatan;
- 2) Melakukan koordinasi secara intensif antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan SKPD;
- 3) Melakukan serangkaian proses penajaman dan penentuan prioritas program yang diusulkan oleh setiap SKPD;
- 4) Melakukan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap perubahan peraturan yang ada;
- 5) Penyederhanaan proses administrasi pengelolaan dan pencairan anggaran;
- 6) Pengguna Anggaran harus membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang meliputi penyusunan pedoman teknis, sosialisasi dan melaksanakannya secara optimal.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas akuntansi / entitas pelaporan keuangan daerah

Entitas akuntansi adalah satuan kerja perangkat daerah yang menurut ketentuan peraturan wajib mencatat dan menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah pemerintah daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Cirebon terdiri dari 73 SKPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta SKPKD.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran pada laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon adalah basis kas. Untuk penyusunan dan penyajian Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas adalah basis akrual.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis kas untuk realisasi anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi pendapatan dan pembiayaan penerimaan dengan belanja dan pembiayaan pengeluaran.

Sedangkan basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten

Cirebon. Entitas pelaporan yang menyajikan laporan kinerja keuangan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan sepenuhnya basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan laporan operasional maupun dalam pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas. Namun demikian, penyajian laporan realisasi anggaran tetap berdasarkan basis kas. Jika diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan, entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan berbasis akrual.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penerapan kebijakan akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon mengacu pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

4.4.1 Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Daerah (KASDA) yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada KASDA maupun Kas yang masih berada pada bendahara setelah periode tahun pelaporan berakhir.
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

4.4.2 Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Daerah (KASDA) yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KASDA atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4.4.3 Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan dan selanjutnya akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4.4.4 Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

4.4.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan.

Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Tabel 4.1 Kriteria Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,50%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10,00%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50,00%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100,00%

- Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya *overhead* tetap dan variabel yang dialokasikan secara sistematis, yang terjadi dalam proses konversi bahan menjadi persediaan. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca.

b. Investasi

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi dikategorikan berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

c. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Aset Tetap disajikan senilai perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap diklasifikasikan sebagai berikut :

1) Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

2) Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.

Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan

pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Jika Gedung dan Bangunan diperoleh melalui kontrak, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, serta jasa konsultan.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama.

Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari meliputi biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

5) Aset Tetap Lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, serta biaya perizinan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diadakan melalui swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan secara swakelola meliputi:

- a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi yang mencakup biaya pekerja lapangan termasuk penyelia; biaya bahan; pemindahan sarana, peralatan dan bahan-bahan dari dan ke lokasi konstruksi; penyewaan sarana dan peralatan; serta biaya rancangan dan bantuan teknis yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi.
 - b. Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut mencakup biaya asuransi; biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu; dan biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya perolehan konstruksi yang dikerjakan kontrak konstruksi meliputi:
 1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 2. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- Kapitalisasi aset tetap merupakan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin berupa Alat-alat Berat yang nilainya lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Alat-alat angkutan yang nilainya lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur, Alat-alat Pertanian/Peternakan, Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium, Alat Keamanan yang nilainya lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan; jalan, instalasi dan jaringan yang nilainya lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - 3) Pengeluaran untuk Aset Tetap Lainnya berupa Buku dan Perpustakaan, Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga nilainya Rp1,00 (satu rupiah) sedangkan Hewan/Ternak dan Tumbuhan yang nilainya lebih dari Rp1,00 (satu rupiah);

- 4) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- **Penyusutan Aset Tetap**

- 1) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- 2) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- 3) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- 4) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- 5) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	10 s.d. 50 tahun

d. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

4.4.6 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satker dalam lingkup Pemerintah Daerah hanya berupa kewajiban kepada BUD berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan berupa pendapatan yang ditangguhkan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

4.4.7 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4.8 Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Cirebon mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan diimplementasikan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Cirebon. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam

penyajian laporan keuangan, diantaranya :

1. Pos-pos ekuitas pada neraca per 31 Desember 2018 berbasis akrual.
2. Keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas telah dapat dipenuhi sehubungan pada pelaporan Tahun 2018 penyusunan dan penyajian akuntansi telah berbasis akrual.

Dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan penerapan akuntansi berbasis akrual disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas baik halaman muka maupun penjelasannya di Bab IX.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

5.1 Pendapatan

Pada tahun 2018 Pendapatan Kabupaten Cirebon dianggarkan senilai **Rp3.705.608.291.386,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp3.683.068.266.639,60** atau **99,39%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi pendapatan tersebut meningkat senilai **Rp91.525.190.397,75** atau **2,55%** dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2017 yang tercapai senilai **Rp3.591.543.076.241,85** sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 5.1 Daftar Rincian Pendapatan Kabupaten Cirebon

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Asli Daerah	569.157.006.675,00	584.810.843.481,60	102,75	779.337.852.277,85
2	Pendapatan Transfer	2.793.363.376.711,00	2.758.605.733.042,00	98,76	2.698.110.640.464,00
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	343.087.908.000,00	339.651.690.116,00	99,00	114.094.583.500,00
	JUMLAH	3.705.608.291.386,00	3.683.068.266.639,60	99,39	3.591.543.076.241,85

Realisasi Pendapatan Kabupaten Cirebon senilai **Rp3.683.068.266.639,60** dihasilkan oleh 16 SKPD, yaitu:

Tabel 5.2 Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	218.100.678.996,00
2	Dinas Kesehatan	128.434.601.000,00	123.364.959.204,00	96,05	114.254.225.794,00
3	RSUD Arjawinangun	102.300.000.000,00	97.001.416.745,60	94,82	90.172.152.304,85
4	RSUD Waled	104.797.995.325,00	100.425.746.462,00	95,83	108.659.084.889,00
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	850.000.000,00	920.152.548,00	108,25	1.004.040.487,00
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	-	-	21.474.650,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	103.630.000,00	103,63	57.580.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	800.000.000,00	731.255.000,00	91,41	934.597.200,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.100.000.000,00	2.111.982.176,00	100,57	1.875.464.525,00
10	Dinas Perhubungan	3.002.050.000,00	2.676.068.800,00	89,14	2.695.015.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.800.000.000,00	2.142.353.625,00	119,02	-
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.668.051.850,00	6.537.649.597,00	115,34	7.216.670.595,00
13	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	47.217.000,00	26.102.000,00	55,28	157.624.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	165.000.000,00	119.436.476,00	72,39	102.910.000,00
15	Dinas Pertanian	410.855.000,00	476.289.300,00	115,93	410.087.700,00
16	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.973.425.500,00	1.947.460.256,00	98,68	1.971.751.700,00
17	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	3.163.159.095.711,00	3.136.587.752.504,00	99,16	2.857.767.809.940,00
18	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	190.000.000.000,00	207.896.011.946,00	109,42	186.141.908.461,00
	JUMLAH	3.705.608.291.386,00	3.683.068.266.639,60	99,39	3.591.543.076.241,85

5.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada tahun 2018 PAD Kabupaten Cirebon dianggarkan senilai **Rp569.157.006.675,00**. PAD tersebut terealisasi senilai **Rp584.810.843.481,60** atau **102,75%** dari target yang ditetapkan. Realisasi PAD tersebut menurun senilai **Rp194.527.008.796,25** atau **24,96%** jika dibandingkan dengan realisasi PAD tahun 2017 senilai **Rp779.337.852.277,85**. Realisasi PAD tersebut terdiri dari:

Tabel 5.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hasil Pajak Daerah	190.000.000.000,00	207.896.011.946,00	109,42	186.141.908.461,00
2	Hasil Retribusi Daerah	46.177.974.350,00	42.630.642.182,00	92,32	40.173.839.689,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.894.000.000,00	7.895.373.711,00	100,02	7.215.262.367,00
4	Lain-lain PAD yang sah	325.085.032.325,00	326.388.815.642,60	100,40	545.806.841.760,85
	JUMLAH	569.157.006.675,00	584.810.843.481,60	102,75	779.337.852.277,85

Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Cirebon tahun 2018 tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.1.1.1 Pajak Daerah

Pada tahun 2018 Pajak Daerah Kabupaten Cirebon dianggarkan senilai **Rp190.000.000.000,00**. Pendapatan Pajak Daerah tersebut terealisasi senilai **Rp207.896.011.946,00** atau **109,42%**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp21.754.103.485,00** atau **11,69%** jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp186.141.908.461,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4 Realisasi Pajak Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Hotel	4.725.000.000,00	5.493.399.088,00	116,26	4.448.769.148,00
2	Pajak Restoran	12.625.000.000,00	14.846.857.359,00	117,60	12.572.591.308,00
3	Pajak Hiburan	1.075.000.000,00	1.143.247.608,00	106,35	960.908.993,00
4	Pajak Reklame	4.250.000.000,00	4.200.315.833,00	98,83	4.169.160.945,00
5	Pajak Penerangan Jalan	66.400.000.000,00	70.051.261.883,00	105,50	64.986.991.780,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10.525.000.000,00	11.228.950.557,00	106,69	9.743.667.205,00
7	Pajak Parkir	400.000.000,00	615.947.036,00	153,99	462.418.345,00
8	Pajak Air Bawah Tanah	725.000.000,00	995.034.950,00	137,25	768.742.955,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	63.586.000,00	105,98	91.576.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	38.500.000.000,00	40.855.853.208,00	106,12	41.218.082.912,00
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50.715.000.000,00	58.401.558.424,00	115,16	46.718.998.870,00
	JUMLAH	190.000.000.000,00	207.896.011.946,00	109,42	186.141.908.461,00

Realisasi pajak daerah terbesar selama tahun 2018 diperoleh dari Pajak Penerangan Jalan senilai **Rp70.051.261.883,00** atau **105,50%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp66.400.000.000,00**. Alokasi anggaran dan realisasi Pajak Daerah tersebut seluruhnya direalisasikan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon. Realisasi Pajak Daerah meliputi realisasi atas pajak-pajak yang dipungut di wilayah Pemerintah Kabupaten Cirebon sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi Pajak Daerah tahun 2018 sebagai berikut:

a. Pajak Hotel

Pada tahun 2018 Pajak Hotel Kabupaten Cirebon dianggarkan senilai **Rp4.725.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp5.493.399.088,00** atau **116,26%**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.044.629.940,00** atau **23,48%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp4.448.769.148,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5 Realisasi Pajak Hotel

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hotel Bintang Empat	2.952.000.000,00	3.028.179.373,00	102,58	2.644.849.429,00
2	Hotel Bintang Tiga	600.000.000,00	902.113.451,00	150,35	710.424.039,00
3	Hotel Bintang Dua	325.000.000,00	433.865.234,00	133,50	329.667.476,00
4	Hotel Melati Tiga	550.000.000,00	681.196.515,00	123,85	434.166.035,00
5	Hotel Melati Dua	36.000.000,00	47.041.250,00	130,67	55.502.582,00
6	Hotel Melati Satu	117.000.000,00	174.175.285,00	148,87	113.377.950,00
7	Losmen/Rumah Penginapan/Pesangger ahan/Hostel/Rumah Kos	145.000.000,00	226.827.980,00	156,43	160.781.637,00
	JUMLAH	4.725.000.000,00	5.493.399.088,00	116,26	4.448.769.148,00

b. Pajak Restoran

Pada tahun 2018 Pajak Restoran dianggarkan senilai **Rp12.625.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp14.846.857.359,00** atau **117,60%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp2.274.266.051,00** atau **18,09%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp12.572.591.308,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.6 Realisasi Pajak Restoran

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Restoran	5.700.000.000,00	6.917.673.398,00	121,36	5.282.292.499,00
2	Rumah Makan	3.500.000.000,00	3.377.449.166,00	96,50	3.222.682.645,00
3	Café	325.000.000,00	439.983.381,00	135,38	306.320.687,00
4	Kantin	100.000.000,00	114.257.243,00	114,26	98.311.835,00
5	Katering	2.500.000.000,00	3.312.461.477,00	132,50	3.066.562.765,00
6	Jasa Boga	500.000.000,00	685.032.694,00	137,01	596.420.877,00
	JUMLAH	12.625.000.000,00	14.846.857.359,00	117,60	12.572.591.308,00

c. Pajak Hiburan

Pada tahun 2018 Pajak Hiburan Kabupaten Cirebon dianggarkan senilai **Rp1.075.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp1.143.247.608,00** atau **106,35%**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp182.338.615,00** atau **18,98%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp960.908.993,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.7 Realisasi Pajak Hiburan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pagelaran Kesenian/ Musik/Tari/ Busana	6.000.000,00	9.800.000,00	163,33	7.000.000,00
2	Karaoke	400.000.000,00	404.105.665,00	101,03	371.818.595,00
3	Sirkus/Akrobat/Sulap	1.500.000,00	2.900.000,00	193,33	37.352.000,00
4	Permainan Bilyard	2.500.000,00	2.250.000,00	90,00	2.100.000,00
5	Permainan Ketangkasan	595.000.000,00	680.947.870,00	114,45	476.472.125,00
6	Pusat Kebugaran	70.000.000,00	43.244.073,00	61,78	66.166.273,00
	JUMLAH	1.075.000.000,00	1.143.247.608,00	106,35	960.908.993,00

d. Pajak Reklame

Pada tahun 2018 Pajak Reklame dianggarkan senilai **Rp4.250.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp4.200.315.833,00** atau **98,83%**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp31.154.888,00** atau **0,75%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp4.169.160.945,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8 Realisasi Pajak Reklame

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Reklame Papan/Billboard/ Videotron/ Megatron	3.450.000.000,00	3.532.843.613,00	102,40	3.392.438.835,00
2	Reklame Kain	760.000.000,00	621.644.720,00	81,80	733.079.610,00
3	Reklame Berjalan	40.000.000,00	45.827.500,00	114,57	43.642.500,00
	JUMLAH	4.250.000.000,00	4.200.315.833,00	98,83	4.169.160.945,00

e. Pajak Penerangan Jalan

Pada Tahun 2018 Pajak Penerangan Jalan dianggarkan senilai **Rp66.400.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp70.051.261.883,00** atau **105,50%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp5.064.270.103,00** atau **7,79%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp64.986.991.780,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.9 Realisasi Pajak Penerangan Jalan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Penerangan Jalan PLN	66.240.000.000,00	69.796.615.704,00	105,37	64.830.207.153,00
2	Pajak Penerangan Jalan Non PLN	160.000.000,00	254.646.179,00	159,15	156.784.627,00
	JUMLAH	66.400.000.000,00	70.051.261.883,00	105,50	64.986.991.780,00

f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pada Tahun 2018 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dianggarkan senilai **Rp10.525.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp11.228.950.557,00** atau **106,69%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.485.283.352,00** atau **15,24%** jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2017 senilai **Rp9.743.667.205,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10 Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Batu Kapur	8.700.000.000,00	9.027.842.100,00	103,77	7.493.114.250,00
2	Andesit (Bahan Bangunan)	20.000.000,00	31.902.000,00	159,51	23.076.000,00
3	Andesit Batu Hias	-	-	-	15.205.000,00
4	Pasir Bahan Bangunan	220.000.000,00	299.099.065,00	135,95	179.299.125,00
5	Tanah Liat Tahan Api	315.000.000,00	234.569.775,00	74,47	277.038.275,00
6	Tanah Urug	1.270.000.000,00	1.635.537.617,00	128,78	1.755.934.555,00
	JUMLAH	10.525.000.000,00	11.228.950.557,00	106,69	9.743.667.205,00

g. Pajak Parkir

Pada Tahun 2018 Pajak Parkir dianggarkan senilai **Rp400.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp615.947.036,00** atau **153,99%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp153.528.691,00** atau **33,20%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp462.418.345,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11 Realisasi Pajak Parkir

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Parkir	400.000.000,00	615.947.036,00	153,99	462.418.345,00
	JUMLAH	400.000.000,00	615.947.036,00	153,99	462.418.345,00

h. Pajak Air Bawah Tanah

Pada tahun 2018 Pajak Air Bawah Tanah dianggarkan senilai **Rp725.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp995.034.950,00** atau **137,25%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp226.291.995,00** atau **29,44%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp768.742.955,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12 Realisasi Pajak Air Bawah Tanah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Air Bawah Tanah	725.000.000,00	995.034.950,00	137,25	768.742.955,00
	JUMLAH	725.000.000,00	995.034.950,00	137,25	768.742.955,00

i. Pajak Sarang Burung Walet

Pada tahun 2018 Pajak Sarang Burung Walet dianggarkan senilai **Rp60.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp63.586.000,00** atau **105,98%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp27.990.000,00** atau **30,56%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp91.576.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13 Realisasi Pajak Sarang Burung Walet

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Sarang Burung Walet	60.000.000,00	63.586.000,00	105,98	91.576.000,00
	JUMLAH	60.000.000,00	63.586.000,00	105,98	91.576.000,00

j. Pajak Bumi dan Bangunan

Pada tahun 2018 Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan senilai **Rp38.500.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp40.855.853.208,00** atau **106,12%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp362.229.704,00** atau **0,88%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp41.218.082.912,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.14 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pajak Bumi dan Bangunan	38.500.000.000,00	40.855.853.208,00	106,12	41.218.082.912,00
	JUMLAH	38.500.000.000,00	40.855.853.208,00	106,12	41.218.082.912,00

k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Pada tahun 2018 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dianggarkan senilai **Rp50.715.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp58.401.558.424,00** atau **115,16%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp11.682.559.554,00** atau **25,01%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp46.718.998.870,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.15 Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	50.715.000.000,00	58.401.558.424,00	115,16	46.718.998.870,00
	JUMLAH	50.715.000.000,00	58.401.558.424,00	115,16	46.718.998.870,00

5.1.1.2 Retribusi Daerah

Pada tahun 2018 Retribusi Daerah dianggarkan senilai **Rp46.177.974.350,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp42.630.642.182,00** atau **92,32%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp2.456.802.493,00** atau **6,12%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp40.173.839.689,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16 Realisasi Retribusi Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Jasa Umum	36.475.395.500,00	31.807.715.232,00	87,20	30.409.818.725,00
2	Retribusi Jasa Usaha	1.434.527.000,00	1.411.668.728,00	98,41	1.612.753.169,00
3	Retribusi Perizinan Tertentu	8.268.051.850,00	9.411.258.222,00	113,83	8.151.267.795,00
	JUMLAH	46.177.974.350,00	42.630.642.182,00	92,32	40.173.839.689,00

Retribusi Daerah tersebut direalisasikan oleh 12 SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.17 Realisasi Retribusi Daerah Per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Kesehatan	29.535.720.000,00	25.045.331.000,00	84,80	23.997.796.500,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	653.575.000,00	791.003.952,00	121,03	794.492.469,00
3	Dinas Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	103.630.000,00	103,63	57.580.000,00
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	800.000.000,00	731.255.000,00	91,41	934.597.200,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	2.100.000.000,00	2.111.982.176,00	100,57	1.875.464.525,00
6	Dinas Perhubungan	3.002.050.000,00	2.676.068.800,00	89,14	2.695.015.000,00
7	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.800.000.000,00	2.142.353.625,00	119,02	-
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.668.051.850,00	6.537.649.597,00	115,34	7.216.670.595,00
9	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	47.217.000,00	26.102.000,00	55,28	157.624.000,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	87.080.000,00	41.516.476,00	47,68	62.760.000,00
11	Dinas Pertanian	410.855.000,00	476.289.300,00	115,93	410.087.700,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018		REALISASI 2017
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.973.425.500,00	1.947.460.256,00	98,68	1.971.751.700,00
	JUMLAH	46.177.974.350,00	42.630.642.182,00	92,32	40.173.839.689,00

Realisasi retribusi daerah terbesar selama tahun 2018 diperoleh dari Retribusi Jasa Umum senilai **Rp31.807.715.232,00** atau **87,20%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp36.475.395.500,00**.

Realisasi pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah tahun 2018 sebagai berikut:

a. Retribusi Jasa Umum

Pada tahun 2018 Realisasi Retribusi Jasa Umum dianggarkan senilai **Rp36.475.395.500,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp31.807.715.232,00** atau **87,20%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.397.896.507,00** atau **4,60%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp30.409.818.725,00**. Adapun rincian Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut:

Tabel 5.18 Realisasi Retribusi Jasa Umum

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	29.535.720.000,00	25.045.331.000,00	84,80	23.997.796.500,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	2.100.000.000,00	2.111.982.176,00	100,57	1.875.464.525,00
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	500.000.000,00	308.791.000,00	61,76	302.654.000,00
4	Retribusi Pelayanan Pasar	1.926.425.500,00	1.900.464.656,00	98,65	1.936.183.700,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	2.203.250.000,00	2.215.915.800,00	100,57	2.131.439.000,00
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	100.000.000,00	103.630.000,00	103,63	57.580.000,00
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	110.000.000,00	121.600.600,00	110,55	108.701.000,00
	JUMLAH	36.475.395.500,00	31.807.715.232,00	87,20	30.409.818.725,00

Berdasarkan tabel diatas, SKPD penghasil 7 (tujuh) jenis retribusi jasa umum tersebut dihasilkan oleh :

1. Dinas Kesehatan : Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. Dinas Pemadam Kebakaran : Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
3. Dinas Lingkungan Hidup : Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan;
4. Dinas Perhubungan : Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

5. Dinas Pertanian : Retribusi Pelayanan Pasar;
6. Dinas Perdagangan dan Perindustrian : Retribusi Pelayanan Pasar dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

b. Retribusi Jasa Usaha

Pada tahun 2018 Retribusi Jasa Usaha dianggarkan senilai **Rp1.434.527.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp1.411.668.728,00** atau senilai **98,41%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp201.084.441,00** atau **12,47%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp1.612.753.169,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19 Realisasi Retribusi Jasa Usaha

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	653.575.000,00	791.003.952,00	121,03	794.492.469,00
2	Retribusi Tempat Pelelangan	87.080.000,00	41.516.476,00	47,68	62.760.000,00
3	Retribusi Terminal	298.800.000,00	151.362.000,00	50,66	260.922.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir	9.717.000,00	2.252.000,00	23,18	142.974.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)	152.275.000,00	197.794.300,00	129,89	148.912.200,00
6	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	37.500.000,00	23.850.000,00	63,60	14.650.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	195.580.000,00	203.890.000,00	104,25	188.042.500,00
	JUMLAH	1.434.527.000,00	1.411.668.728,00	98,41	1.612.753.169,00

Berdasarkan tabel diatas, SKPD penghasil 5 (lima) jenis retribusi jasa usaha tersebut dihasilkan oleh :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang : Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
2. Dinas Perhubungan : Retribusi Terminal;
3. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga : Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan: Retribusi Tempat Pelelangan;
5. Dinas Pertanian: Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pendapatan retribusi tempat khusus parkir pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga hanya terealisasi **23,18%** dikarenakan adanya pemutusan kerjasama/MOU kontrak lahan parkir objek wisata gunung jati dengan Korem 063/SGJ sebagai pemilik lahan.

Pendapatan retribusi tempat pelelangan pada Dinas Kelautan dan Perikanan terealisasi **47,68%** dikarenakan adanya penurunan pendapatan dari hasil retribusi TPI Gebang Mekar dan TPI Bondet karena adanya cuaca buruk sehingga nelayan tidak melaut dan juga disebabkan oleh sebagian besar nelayan menjual hasil tangkapannya kepada tengkulak tanpa melalui proses lelang ikan di tempat pelelangan ikan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Pada tahun 2018 Retribusi Perizinan Tertentu dianggarkan senilai **Rp8.268.051.850,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp9.411.258.222,00** atau senilai **113,83%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.259.990.427,00** atau **15,46%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp8.151.267.795,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20 Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	5.622.751.850,00	6.517.417.177,00	115,91	4.689.082.310,00
2	Retribusi Izin Gangguan/Keramaian	-	-	-	2.493.528.285,00
3	Retribusi Izin Trayek	45.000.000,00	19.240.000,00	42,76	34.060.000,00
4	Retribusi Izin Usaha Perikanan	300.000,00	992.420,00	330,81	-
5	Retribusi Menara Telekomunikasi	1.800.000.000,00	2.142.353.625,00	119,02	-
6	Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing	800.000.000,00	731.255.000,00	91,41	934.597.200,00
	JUMLAH	8.268.051.850,00	9.411.258.222,00	113,83	8.151.267.795,00

Berdasarkan tabel diatas, SKPD penghasil 3 (tiga) jenis retribusi jasa perizinan tertentu tersebut dihasilkan oleh :

1. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi : Retribusi Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
2. Dinas Komunikasi dan Informatika : Retribusi Menara Telekomunikasi;
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Trayek dan Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pendapatan retribusi izin trayek pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hanya terealisasi **42,76%** dari anggaran dikarenakan:

- Tidak adanya retribusi untuk daftar ulang tahunan perizinan trayek;
- Retribusi izin trayek hanya untuk pengajuan trayek baru atau perubahan yang berlaku 5 tahun sekali;
- Dari jumlah kendaraan yang terdata adalah 967 unit dan kurang lebih 90,00% telah memiliki izin, sehingga pengajuan izin trayek baru/beretribusi hanya sisa beberapa kendaraan saja.

5.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan

Pada tahun 2018 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan senilai **Rp7.894.000.000,00**. Dasar penganggaran pendapatan ini mengacu kepada :

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2007 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, Perusahaan Daerah Air Minum Dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp7.895.373.711,00** atau **100,02%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp680.111.344,00** atau **9,43%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp7.215.262.367,00** yang diperoleh dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah PD. Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Jawa Barat-Banten (BJB), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Perusahaan Daerah PD. BPR	3.054.000.000,00	3.054.473.787,00	100,02	2.444.054.247,00
2.	Bank Jawa Barat-Banten (BJB)	4.840.000.000,00	4.840.899.924,00	100,02	4.771.208.120,00
	JUMLAH	7.894.000.000,00	7.895.373.711,00	100,02	7.215.262.367,00

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan untuk Perusahaan Daerah PD. BPR senilai **Rp3.054.473.787,00** merupakan penyetoran deviden dengan rincian sebagai berikut:

1. PD. BPR Astanajapura senilai **Rp809.962.709,00**;
2. PD. BPR Babakan senilai **Rp1.495.395.857,00**;
3. PD. BPR Kapetakan senilai **Rp428.737.435,00**;
4. PD. BPR Klangeran senilai **Rp320.377.786,00**.

Terdapat 15 PD.BPR yang tidak menyetorkan deviden dikarenakan belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum PD BPR yang menyatakan bahwa PD.BPR yang belum memiliki modal inti sebesar **Rp6.000.000.000,00** tidak menyetorkan deviden, sehingga laba tahun berjalan dimasukkan kedalam pos laba ditahan.

5.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Pada tahun 2018 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah dianggarkan senilai **Rp325.085.032.325,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp326.388.815.642,60** atau **100,40%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp219.418.026.118,25** atau **40,20%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp545.806.841.760,85** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22 Tabel Realisasi Lain-lain PAD Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	674.345.000,00	939.459.335,00	139,31	1.725.319.970,00
2	Penerimaan Jasa Giro	4.289.000.000,00	7.985.002.389,00	186,17	7.342.454.732,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	10.000.000.000,00	16.384.894.850,00	163,85	25.710.818.784,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	13.150.000,00	193.798.270,00	1.473,75	9.515.000,00
5	Pendapatan dari Pengembalian	113.000.000,00	172.326.550,00	152,50	347.939.870,00
6	Pendapatan BLUD	207.097.995.325,00	197.427.163.207,60	95,33	198.831.237.193,85
7	Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas	98.898.881.000,00	98.319.628.204,00	99,41	90.256.429.294,00
8	Pendapatan Lain-Lain	3.998.661.000,00	4.966.542.837,00	124,21	3.482.447.921,00
9	Dana BOS	-	-	-	218.100.678.996,00
	JUMLAH	325.085.032.325,00	326.388.815.642,60	100,40	545.806.841.760,85

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terbesar selama tahun 2018 diperoleh dari Pendapatan BLUD senilai **Rp197.427.163.207,60** atau **95,33%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp207.097.995.325,00**.

Realisasi pendapatan yang berasal dari Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2018 sebagai berikut:

a. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Pada tahun 2018 Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan dianggarkan senilai **Rp674.345.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp939.459.335,00** atau **139,31%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai

Rp785.860.635,00 atau **45,55%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp1.725.319.970,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23 Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penjualan Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai	100.000.000,00	174.280.000,00	174,28	-
2	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua	100.000.000,00	107.789.997,00	107,79	105.330.000,00
3	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat	200.000.000,00	226.325.500,00	113,16	492.300.000,00
4	Penjualan Drum Bekas	17.700.000,00	12.092.000,00	68,32	18.792.000,00
5	Penjualan Hasil Penebangan Pohon	3.725.000,00	6.808.881,00	182,79	12.976.000,00
6	Penjualan Bahan-bahan Bekas Bangunan	175.000.000,00	110.247.715,00	63,00	199.254.668,00
7	Penjualan Hasil Perikanan	77.920.000,00	77.920.000,00	100,00	40.150.000,00
8	Hasil Sewa Tanah dan Bangunan	-	223.995.242,00	-	856.517.302,00
	JUMLAH	674.345.000,00	939.459.335,00	139,31	1.725.319.970,00

Realisasi Hasil Peralatan/Perlengkapan Kantor tidak terpakai mencapai **174,28%** karena adanya penjualan aset rusak berat yang dilakukan dengan cara pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) melalui proses lelang.

Sewa Tanah dan Bangunan tidak terdapat anggaran tetapi terdapat realisasi karena adanya sewa lahan pertanian yang dikelola oleh pengelola BMD yang tidak dimanfaatkan oleh SKPD.

b. Penerimaan Hasil Jasa Giro

Pada tahun 2018 Penerimaan Hasil Jasa Giro dianggarkan senilai **Rp4.289.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp7.985.002.389,00** atau **186,17%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp642.547.657,00** atau **8,75%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp7.342.454.732,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24 Table Realisasi Penerimaan Jasa Giro

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Jasa Giro Kas Daerah	3.897.000.000,00	6.965.187.161,00	178,73	6.500.107.783,00
2	Jasa Giro Pemegang Kas	392.000.000,00	1.019.815.228,00	260,16	842.346.949,00
	JUMLAH	4.289.000.000,00	7.985.002.389,00	186,17	7.342.454.732,00

Pada tabel 5.24, realisasi Jasa Giro Pemegang Kas senilai **Rp1.019.815.228,00** terdiri dari jasa giro pemegang kas pada bendahara pengeluaran SKPD dan jasa bunga pada bendahara JKN FKTP dan Bendahara Dana BOS. Rincian jasa giro pemegang kas terdapat pada *Lampiran 5.1*.

c. Pendapatan Bunga Deposito

Pada tahun 2018 Pendapatan Bunga Deposito dianggarkan senilai **Rp10.000.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp16.384.894.850,00** atau senilai **163,85%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp9.325.923.934,00** atau **36,27%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp25.710.818.784,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25 Realisasi Pendapatan Bunga Deposito

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Rekening Deposito pada Bank Jabar Banten (BJB)	-	-	-	22.491.232.889,00
2	Rekening Deposito pada Bank Mandiri	-	-	-	757.273.973,00
3	Rekening Deposito pada Bank Negara Indonesia (BNI/46)	-	-	-	169.212.330,00
4	Rekening Deposito pada Bank Tabungan Negara (BTN)	-	-	-	1.566.198.624,00
5	Rekening Deposito pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR)	-	-	-	127.732.865,00
6	Rekening Deposito pada Bank Rakyat Indonesia (BRI)	-	-	-	599.168.103,00
7	Rekening Deposito pada Bank Pemerintah dan BPR	10.000.000.000,00	16.384.894.850,00	163,85	-
	JUMLAH	10.000.000.000,00	16.384.894.850,00	163,85	25.710.818.784,00

d. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Pada tahun 2018 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah dianggarkan senilai **Rp13.150.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp193.798.270,00** atau **1.473,75%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp184.283.270,00** atau **1.936,77%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp9.515.000,00**.

Tabel 5.26 Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Kerugian Barang	13.150.000,00	193.798.270,00	1.473,75	9.515.000,00
	JUMLAH	13.150.000,00	193.798.270,00	1.473,75	9.515.000,00

Realisasi pendapatan tuntutan ganti kerugian daerah mencapai **1.473,75%** disebabkan karena pada tahun 2018 terdapat penggantian kerugian daerah atas kehilangan barang berupa kendaraan bermotor yang dibayarkan pada tahun yang sama dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

e. Pendapatan dari Pengembalian

Pada tahun 2018 Pendapatan dari Pengembalian dianggarkan senilai **Rp113.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp172.326.550,00** atau **152,50%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp175.613.320,00** atau **50,47%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp347.939.870,00**.

Tabel 5.27 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	113.000.000,00	172.326.550,00	152,50	347.939.870,00
	JUMLAH	113.000.000,00	172.326.550,00	152,50	347.939.870,00

Realisasi tersebut merupakan Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan. Terjadinya kelebihan pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan diketahui pada saat rekonsiliasi antara data belanja pegawai dengan Surat Keterangan untuk Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (SKUMPTK) pada bendahara SKPD. Perbedaan antara data belanja pegawai dengan SKUMPTK dikarenakan SKPD belum melaporkan perubahan atau mutasi tunjangan keluarga sehingga tetap membayarkan gaji dan tunjangan pegawai yang bersangkutan. Serta adanya PNS yang meninggal namun gaji dan tunjangannya terlanjur masuk dalam daftar gaji dan ada pula keterlambatan penerbitan SK Pensiun bagi pegawai yang mengajukan pensiun sebelum waktunya.

f. Pendapatan BLUD

Pada tahun 2018 Pendapatan BLUD dianggarkan senilai **Rp207.097.995.325,00** terealisasi senilai **Rp197.427.163.207,60** atau **95,33%** yang merupakan Pendapatan BLUD dari retribusi pelayanan kesehatan. Realisasi tersebut merupakan realisasi pendapatan BLUD dari Rumah Sakit Umum Daerah Arjawinangun senilai **Rp97.001.416.745,60** dan Rumah Sakit Umum Daerah Waled senilai **Rp100.425.746.462,00**. Realisasi tersebut menurun

Rp 1.404.073.986,25 atau **0,71%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp198.831.237.193,85**.

Tabel 5.28 Realisasi Pendapatan BLUD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan BLUD	207.097.995.325,00	197.427.163.207,60	95,33	198.831.237.193,85
	JUMLAH	207.097.995.325,00	197.427.163.207,60	95,33	198.831.237.193,85

g. Dana Pendapatan Kapitasi JKN FKTP Puskesmas

Pada tahun 2018 Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas dianggarkan senilai **Rp98.898.881.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp98.319.628.204,00** atau **99,41%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp8.063.198.910,00** atau **8,93%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp90.256.429.294,00**. Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Pembayaran pendapatan dana kapitasi sesuai Surat Keputusan Dana Kapitasi yang dikirimkan oleh BPJS ke Dinas Kesehatan setiap bulan. Realisasi Dana Kapitasi JKN FKTP per Puskesmas terdapat dalam lampiran 5.2.

h. Pendapatan Lain Lain

Pada tahun 2018 Pendapatan Lain-lain dianggarkan senilai **Rp3.998.661.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp4.966.542.837,00** atau **124,21%** yang merupakan pendapatan yang diperoleh dari penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Daerah yang Dipisahkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.484.094.916,00** atau **42,62%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp3.482.447.921,00**.

Tabel 5.29 Realisasi Pendapatan Lain-Lain

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Lain-Lain	1.544.000.000,00	1.760.452.370,00	114,00	3.482.447.921,00
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Kependudukan	572.000.000,00	942.310.000,00	164,74	-
3	Pendapatan Pengembalian Kerugian Daerah Atas Pemeriksaan	1.874.000.000,00	2.216.697.783,00	118,29	-

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
4	Pendapatan Jasa Bunga Selain Pemegang Kas	8.661.000,00	47.082.684,00	543,62	-
	JUMLAH	3.998.661.000,00	4.966.542.837,00	124,21	3.482.447.921,00

Realisasi pendapatan yang berasal dari Pendapatan Lain-lain tahun 2018 diantaranya:

- Denda Pajak, Retribusi, dan Denda Administrasi BPHTB senilai **Rp505.748.433,00**;
- Bunga kredit program bantuan senilai **Rp30.808.887,00**;
- Hasil penjualan direksit dan penjualan sisa material bongkaran senilai **Rp58.776.951,00**;
- Pengembalian belanja dan kelebihan setor dari SKPD senilai **Rp905.458.313,00**;
- Pendapatan dari PT. TASPEN **Rp58.290.484,00**;
- Penerimaan piutang retribusi izin gangguan keramaian **Rp13.607.072,00**;
- Hasil kliring bank **Rp50.000.000,00**;
- Rekening tabungan SKPD **Rp25.716,00**;
- Penerimaan lain-lain **Rp137.736.514,00**.

i. Dana BOS

Pada tahun 2018 Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) dianggarkan senilai **Rp0,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp0,00** atau **0,00%**. Realisasi tersebut mengalami penurunan senilai **Rp218.100.678.996,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp218.100.678.996,00**. Dana Bos Tahun 2018 tidak dianggarkan pada Dinas Pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

5.1.2 Pendapatan Transfer

Pada tahun 2018 Pendapatan Transfer dianggarkan senilai **Rp2.793.363.376.711,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp2.758.605.733.042,00** atau **98,76%** dari target yang telah ditetapkan. Pendapatan Daerah dari Pendapatan Transfer ini besarnya sangat tergantung kondisi keuangan Pemerintah Pusat. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp60.495.092.578,00** atau **2,24%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp2.698.110.640.464,00** merupakan transfer Pemerintah Pusat

yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30 Realisasi Pendapatan Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2016 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan	2.105.217.579.359,00	2.070.427.928.565,00	98,35	2.074.515.204.058,00
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	405.992.221.000,00	405.992.221.000,00	100,00	367.996.820.000,00
3	Transfer Pemerintah Provinsi	282.153.576.352,00	282.185.583.477,00	100,01	255.598.616.406,00
	JUMLAH	2.793.363.376.711,00	2.758.605.733.042,00	98,76	2.698.110.640.464,00

Realisasi Pendapatan Transfer terbesar selama tahun 2018 diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan senilai **Rp2.070.427.928.565,00** atau **98,35%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp2.105.217.579.359,00**

Realisasi pendapatan transfer tahun 2018 sebagai berikut:

5.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

Pada tahun 2018 Transfer pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dianggarkan senilai **Rp2.105.217.579.359,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp2.070.427.928.565,00** atau **98,35%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp4.087.275.493,00** atau **0,20%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp2.074.515.204.058,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Bagi Hasil Pajak	77.416.118.000,00	63.182.845.832,00	81,61	71.262.835.258,00
2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	19.868.665.359,00	23.972.292.072,00	120,65	26.620.362.288,00
3	Dana Alokasi Umum	1.500.538.688.000,00	1.500.538.688.000,00	100,00	1.495.142.625.000,00
4	Dana Alokasi Khusus	507.394.108.000,00	482.734.102.661,00	95,14	481.489.381.512,00
	JUMLAH	2.105.217.579.359,00	2.070.427.928.565,00	98,35	2.074.515.204.058,00

5.1.2.1.1 Bagi Hasil Pajak

Pada tahun 2018 Pendapatan dari Bagi Hasil Pajak dianggarkan senilai **Rp77.416.118.000,00**. Pendapatan

tersebut terealisasi senilai **Rp63.182.845.832,00** atau **81,61%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp8.079.989.426,00** atau **11,34%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp71.262.835.258,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Realisasi Bagi Hasil Pajak

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan	19.951.675.000,00	17.937.742.173,00	89,91	19.789.443.746,00
2	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 wajib pajak orang Pribadi dalam negeri dan PPh Pasal 21	52.507.296.000,00	40.287.956.659,00	76,73	46.605.803.937,00
3	Dana bagi hasil cukai hasil tembakau	4.957.147.000,00	4.957.147.000,00	100,00	4.867.587.575,00
	JUMLAH	77.416.118.000,00	63.182.845.832,00	81,61	71.262.835.258,00

5.1.2.1.2 Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pada tahun 2018 Pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan senilai **Rp19.868.665.359,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp23.972.292.072,00** atau **120,65%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp2.648.070.216,00** atau **9,95%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp26.620.362.288,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan	90.812.000,00	76.973.236,00	84,76	59.244.129,00
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan	943.027.000,00	701.234.591,00	74,36	525.572.127,00
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi	3.834.377.023,00	4.944.070.438,00	128,94	5.444.182.431,00
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	6.802.830.336,00	5.908.065.237,00	86,85	6.833.983.974,00
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Mineral dan Batu Bara	397.965.000,00	374.841.812,00	94,19	339.172.817,00
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi	7.799.654.000,00	11.967.106.758,00	153,43	13.418.206.810,00
	JUMLAH	19.868.665.359,00	23.972.292.072,00	120,65	26.620.362.288,00

5.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum

Pada tahun 2018 Pendapatan dari Dana Alokasi Umum dianggarkan senilai **Rp1.500.538.688.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp1.500.538.688.000,00** atau **100,00%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp5.396.063.000,00** atau **0,36%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp1.495.142.625.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.34 Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Alokasi Umum	1.500.538.688.000,00	1.500.538.688.000,00	100,00	1.495.142.625.000,00
	JUMLAH	1.500.538.688.000,00	1.500.538.688.000,00	100,00	1.495.142.625.000,00

5.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Pada tahun 2018 Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus dianggarkan senilai **Rp507.394.108.000,00** berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp482.734.102.661,00** atau **95,14%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.244.721.149,00** atau **0,26%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp481.489.381.512,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.35 Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK)

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Alokasi Khusus	86.011.974.000,00	78.063.207.560,00	90,76	107.469.244.971,00
2	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	421.382.134.000,00	404.670.895.101,00	96,03	374.020.136.541,00
	JUMLAH	507.394.108.000,00	482.734.102.661,00	95,14	481.489.381.512,00

Realisasi dana transfer DAK Fisik ke Kas Umum Daerah tersalurkan senilai **Rp78.063.207.560,00** atau **90,76%** dari pagu anggaran yang

ditetapkan senilai **Rp86.011.974.000,00**.

Realisasi dana transfer DAK Non Fisik ke Kas Umum Daerah tersalurkan senilai **Rp404.670.895.101,00** atau **96,03%** dari pagu anggaran yang ditetapkan senilai **Rp421.382.134.000,00**.

Adapun rincian realisasi Dana Alokasi Khusus per bidang sebagai berikut:

Tabel 5.36 Rincian Realisasi Dana Alokasi Khusus Per Bidang

NO	DINAS	BIDANG	REALISASI PEMBAYARAN DARI KAS NEGARA
			(Rp)
1	Dana Alokasi Khusus Non Fisik		
a	Dinas Pendidikan	BOP PAUD	18.103.843.881,00
		Tunjangan Profesi Guru	342.795.484.305,00
		Tambahan Penghasilan Guru	357.300.000,00
		Tunjangan Khusus Guru	749.389.000,00
b	Dinas Kesehatan	BOK	31.032.871.765,00
c	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak	BOKB	7.610.420.000,00
d	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.021.586.150,00
	Jumlah		404.670.895.101,00
2	Dana Alokasi Khusus Fisik		
	DAK Fisik Reguler		
a	Dinas Kesehatan	Pelayanan Dasar	4.246.403.600,00
		Pelayanan Kefarmasian	7.049.265.720,00
		Peralatan Pendukung Imunisasi	1.676.037.306,00
b	RSUD Arjawinangun	Pelayanan Rujukan	6.239.983.112,00
	RSUD Waled	Pelayanan Rujukan	4.554.004.533,00
c	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak	Keluarga Berencana	383.750.000,00
d	Dinas Pertanian	Pertanian	10.921.534.820,00
e	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur Jalan	18.456.649.679,00
	Jumlah		53.527.628.770,00
	DAK Fisik Penugasan		
a	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Infrastruktur Air Minum	15.480.383.000,00
b	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Sarana Perdagangan	5.894.600.000,00
c	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Infrastruktur Irigasi	3.160.595.790,00
	Jumlah		24.535.578.790,00
	Jumlah Keseluruhan		78.063.207.560,00

5.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Pada tahun 2018 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dianggarkan senilai **Rp405.992.221.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp405.992.221.000,00** atau **100,00%** dari target yang telah

ditetapkan. Realisasi tersebut naik senilai **Rp37.995.401.000,00** atau **10,32%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp367.996.820.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.37 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	405.992.221.000,00	405.992.221.000,00	100,00	367.996.820.000,00
	JUMLAH	405.992.221.000,00	405.992.221.000,00	100,00	367.996.820.000,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.38 Daftar Rincian Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dana Desa dari APBN	370.242.221.000,00	370.242.221.000,00	100,00	360.496.820.000,00
2	Dana Insentif Daerah (DID)	35.750.000.000,00	35.750.000.000,00	100,00	7.500.000.000,00
	JUMLAH	405.992.221.000,00	405.992.221.000,00	100,00	367.996.820.000,00

Dana Desa dari APBN mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 226/PMK.07/2017 Tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Daerah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018. Tahun 2018 Dana Desa dari APBN dianggarkan senilai **Rp370.242.221.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp370.242.221.000,00** atau **100,00%** dari anggaran yang ditetapkan.

Sedangkan Dana Insentif Daerah (DID) mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018. Dana Insentif Daerah (DID) dianggarkan senilai **Rp35.750.000.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp35.750.000.000,00** atau **100,00%** dari anggaran yang ditetapkan.

5.1.2.3 Transfer Pemerintah Provinsi

Pada tahun 2018 Transfer Pemerintah Provinsi dianggarkan senilai **Rp282.153.576.352,00** sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 91 Tahun 2017 tentang Penjabaran APBD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2018. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp282.185.583.477,00** atau **100,01%**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp26.586.967.071,00** atau **10,40%** jika

dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp255.598.616.406,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018		REALISASI 2017
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	282.153.576.352,00	282.185.583.477,00	100,01	255.598.616.406,00
	JUMLAH	282.153.576.352,00	282.185.583.477,00	100,01	255.598.616.406,00

Berdasarkan tabel diatas Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdiri dari dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berupa Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, Bagi Hasil dari Pajak Rokok;

Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak terdapat dalam lampiran 5.3.

5.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada tahun 2018 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dianggarkan senilai **Rp343.087.908.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp339.651.690.116,00** atau **99,00%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp225.557.106.616,00** atau **197,69%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp114.094.583.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.40 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pendapatan Hibah	215.079.200.000,00	214.038.960.000,00	99,52	-
2	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	128.008.708.000,00	125.612.730.116,00	98,13	114.094.583.500,00
	JUMLAH	343.087.908.000,00	339.651.690.116,00	99,00	114.094.583.500,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terbesar selama tahun 2018 diperoleh dari Pendapatan Hibah senilai **Rp214.038.960.000,00** atau **99,52%** dari target yang ditetapkan senilai **Rp215.079.200.000,00**.

5.1.3.1 Pendapatan Hibah

Pada tahun 2018 Pendapatan Hibah dianggarkan senilai **Rp215.079.200.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai

Rp214.038.960.000,00 atau **99,52%**. Realisasi tersebut meingkat senilai **Rp214.038.960.000,00** atau **100%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp0,00**. Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.41 Realisasi Pendapatan Hibah Dana BOS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar	155.435.200.000,00	155.045.760.000,00	99,75	-
2	Hibah Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Pertama	59.644.000.000,00	58.993.200.000,00	98,91	-
	JUMLAH	215.079.200.000,00	214.038.960.000,	99,52	-

5.1.3.2 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

Pada tahun 2018 Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan senilai **Rp128.008.708.000,00**. Pendapatan tersebut terealisasi senilai **Rp125.612.730.116,00** atau **98,13%** dari target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp11.518.146.616,00** atau **10,10%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp114.094.583.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.42 Realisasi Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	128.008.708.000,00	125.612.730.116,00	98,13	114.094.583.500,00
	JUMLAH	128.008.708.000,00	125.612.730.116,00	98,13	114.094.583.500,00

5.2 Belanja Daerah

Pada tahun 2018 Belanja Daerah dianggarkan senilai **Rp4.003.036.048.497,51**. Belanja Daerah tersebut terealisasi senilai **Rp3.681.465.057.398,38** atau mencapai **91,97%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp83.370.133.171,31** atau **2,32%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp3.598.094.924.227,07** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.43 Realisasi Belanja Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Operasi	2.764.830.495.107,00	2.606.633.256.998,38	94,28	2.428.841.353.081,07

2	Belanja Modal	639.968.184.462,00	510.923.940.462,00	79,84	609.568.213.960,00
3	Belanja Tidak Terduga	33.613.590.599,51	2.610.109.700,00	7,77	-
4	Belanja Transfer	564.623.778.329,00	561.297.750.238,00	99,41	559.685.357.186,00
	JUMLAH	4.003.036.048.497,51	3.681.465.057.398,38	91,97	3.598.094.924.227,07

Realisasi Belanja per SKPD dimuat dalam lampiran 5.4.

5.2.1 Belanja Operasi

Pada tahun 2018 Belanja Operasi dianggarkan senilai **Rp2.764.830.495.107,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp2.606.633.256.998,38** atau **94,28%**. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp177.791.903.917,31** atau **7,32%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp2.428.841.353.081,07** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.44 Realisasi Belanja Operasi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pegawai	1.779.450.786.881,00	1.717.527.604.248,00	96,52	1.626.858.292.940,00
2	Belanja Barang dan Jasa	919.406.732.226,00	829.887.402.162,38	90,26	769.554.060.675,07
3	Belanja Hibah	63.412.500.000,00	57.515.561.814,00	90,70	31.466.148.325,00
4	Belanja Bantuan Sosial	2.560.476.000,00	1.702.688.774,00	66,50	962.851.141,00
	JUMLAH	2.764.830.495.107,00	2.606.633.256.998,38	94,28	2.428.841.353.081,07

5.2.1.1 Belanja Pegawai

Pada tahun 2018 Belanja Pegawai dianggarkan senilai **Rp1.779.450.786.881,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp1.717.527.604.248,00** atau **96,52%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp90.669.311.308,00** atau **5,57%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp1.626.858.292.940,00**.

Realisasi Belanja Pegawai - Tidak Langsung merupakan realisasi yang tidak terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yaitu berupa Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan.

Belanja Pegawai-Langsung merupakan Belanja Pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya dalam bentuk Honor Panitia Pelaksana Kegiatan, Honorarium Tim, Honorarium Tenaga Ahli, dan Uang Lembur dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.45 Realisasi Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
A.	Belanja Pegawai – Belanja Tidak Langsung				
1	Gaji dan Tunjangan	1.277.842.267.891,00	1.235.337.669.202,00	96,67	909.590.954.473,00

Tabel 5.45 Realisasi Belanja Pegawai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
2	Tambahan Penghasilan PNS	229.396.670.000,00	221.945.533.662,00	96,75	125.191.503.399,00
3	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.573.472.000,00	9.385.750.000,00	98,04	5.992.800.000,00
4	Biaya Pemungutan Pajak Daerah	9.500.000.000,00	8.853.246.711,00	93,19	8.289.913.549,00
5	Tambahan Penghasilan Lainnya	-	-	-	334.906.317.100,00
6	Belanja Insentif Pemungutan Retribusi	1.293.843.700,00	1.105.014.635,00	85,41	1.002.442.187,00
	JUMLAH A	1.527.606.253.591,00	1.476.627.214.210,00	96,66	1.384.973.930.708,00
B.	Belanja Pegawai – Belanja Langsung				
1	Honorarium PNS	16.283.439.600,00	11.902.744.100,00	73,10	27.322.961.500,00
2	Honorarium Non PNS	74.909.509.000,00	72.648.426.105,00	96,98	54.776.642.300,00
3	Uang Lembur	5.315.287.200,00	4.527.132.300,00	85,17	3.851.846.000,00
4	Stimulan/Hadiah Lomba/Penghargaan	33.000.000,00	27.500.000,00	83,33	-
5	Belanja Pegawai BLUD	97.431.300.000,00	94.337.203.776,00	96,82	95.706.530.375,00
6	Belanja Pegawai Dana BOS	57.871.997.490,00	57.457.383.757,00	99,28	60.226.382.057,00
	JUMLAH B	251.844.533.290,00	240.900.390.038,00	95,65	241.884.362.232,00
	JUMLAH A + B	1.779.450.786.881,00	1.717.527.604.248,00	96,52	1.626.858.292.940,00

5.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Pada tahun 2018 Belanja Barang dan Jasa dianggarkan senilai **Rp919.406.732.226,00**. Belanja tersebut terealisasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon senilai **Rp829.887.402.162,38** atau **90,26%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp60.333.341.487,31** atau **7,84%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp769.554.060.675,07** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bahan Pakai Habis	33.978.551.459,00	30.299.078.734,00	89,17	26.977.768.845,00
2	Belanja Bahan/Material	35.020.808.552,00	26.675.932.381,00	76,17	35.252.336.583,00
3	Belanja Jasa Kantor	225.453.238.154,00	206.417.360.538,00	91,56	162.479.598.051,00
4	Belanja Premi Asuransi	1.831.055.110,00	996.144.417,00	54,40	1.080.947.305,00
5	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	17.220.773.399,00	14.348.284.105,00	83,32	14.026.709.843,00
6	Belanja Cetak dan Penggandaan	27.894.412.728,00	24.660.693.746,00	88,41	23.086.807.266,00
7	Belanja Sewa	20.495.109.000,00	18.168.495.500,00	88,65	15.625.300.678,00

Tabel 5.46 Realisasi Belanja Barang dan Jasa

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				
8	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	2.534.485.000,00	2.234.940.000,00	88,18	1.368.100.000,00
9	Belanja Sewa Alat Berat	33.672.600,00	15.878.000,00	47,15	404.600.000,00
10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.580.645.599,00	5.223.407.000,00	93,60	4.113.100.400,00
11	Belanja Makanan dan Minuman	53.684.336.200,00	48.976.268.474,00	91,23	42.704.352.625,00
12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	1.674.217.200,00	1.652.895.100,00	98,73	3.036.687.862,00
13	Belanja Pakaian Kerja	2.315.803.400,00	2.212.872.600,00	95,56	1.490.957.510,00
14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu	3.091.096.170,00	2.942.006.450,00	95,18	3.126.392.500,00
15	Belanja Perjalanan Dinas	57.643.596.805,00	48.564.929.508,00	84,25	36.370.398.649,00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	604.000.000,00	450.000.000,00	74,50	510.000.000,00
17	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	5.951.821.000,00	4.583.973.000,00	77,02	4.060.330.000,00
18	Belanja Pemeliharaan	41.711.188.710,00	31.216.658.326,00	74,84	33.595.214.600,00
19	Belanja Jasa Konsultasi	19.038.901.523,00	16.935.806.150,00	88,95	19.631.787.643,00
20	Belanja Stimulan dan Hadiah	309.292.000,00	308.682.000,00	99,80	-
21	Belanja Jasa Travel/Event Organizer	4.522.011.126,00	4.422.031.200,00	97,79	11.264.299.900,00
22	Belanja Barang Dana BOS	-	-	-	2.044.040.300,00
23	Belanja Hibah Barang / Jasa yang diserahkan	91.495.704.990,00	86.727.809.462,00	94,79	41.646.306.444,00
24	Belanja Bantuan Sosial Barang / Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga / Masyarakat	7.491.430.000,00	7.467.569.800,00	99,68	10.642.877.500,00
25	Belanja Barang / Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial untuk diserahkan	635.000.000,00	374.951.500,00	59,05	593.185.000,00
26	Belanja Jasa Tenaga Ahli	27.059.584.000,00	22.469.943.000,00	83,04	24.578.842.738,00
27	Belanja Barang dan Jasa BLUD	103.640.964.375,00	95.405.249.059,38	92,05	101.249.040.246,07
28	Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan	5.067.495.000,00	4.937.124.400,00	97,43	6.611.379.100,00
29	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	123.427.538.126,00	121.198.417.712,00	98,19	141.982.699.087,00
	JUMLAH	919.406.732.226,00	829.887.402.162,38	90,26	769.554.060.675,07

5.2.1.2.1 Belanja Bahan Habis Pakai

Pada tahun 2018 Belanja Bahan Habis Pakai dianggarkan senilai **Rp33.978.551.459,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp30.299.078.734,00** atau **89,17%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp3.321.309.889,00** atau **12,31%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp26.977.768.845,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.47 Realisasi Belanja Bahan Habis Pakai

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)	13.694.842.193,00	12.439.573.240,00	90,83	12.089.800.988,00
2	Belanja Dokumen / Administrasi Tender	260.885.000,00	161.940.000,00	62,07	106.369.300,00
3	Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	2.148.755.356,00	1.717.983.316,00	79,95	1.767.559.344,00
4	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	459.883.000,00	390.380.000,00	84,89	340.019.400,00
5	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	2.285.881.690,00	1.976.901.389,00	86,48	1.469.412.801,00
6	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	6.048.606.250,00	5.524.203.326,00	91,33	5.667.348.924,00
7	Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	157.058.425,00	126.827.500,00	80,75	122.701.600,00
8	Belanja Pengisian Tabung Gas	128.170.000,00	100.831.100,00	78,67	99.195.300,00
9	Belanja Atribut Penghargaan/Piagam/Piala/Cenderamata	823.982.300,00	816.282.500,00	99,07	834.494.000,00
10	Belanja Kit Pelatihan	6.497.119.054,00	6.136.963.500,00	94,46	4.014.152.175,00
11	Belanja Dekorasi dan Desain Interior/Ekterior	183.000.000,00	151.497.850,00	82,79	57.790.000,00
12	Belanja Kelengkapan (Aksesoris) Komputer	487.548.350,00	261.276.658,00	53,59	234.581.013,00
13	Belanja Bahan Pakai Habis Lainnya	461.121.900,00	248.246.284,00	53,84	3.200.000,00
14	Belanja Tas/Kantung Plastik/Karung	141.172.468,00	95.485.566,00	67,64	32.267.000,00
15	Belanja Piring/Gelas/Sendok/Garpu/Nampan/Mangkok/Cangkir/Asbak	123.725.473,00	115.660.300,00	93,48	138.877.000,00
16	Belanja Bantal/Guling/Sarung Bantal/Sarung Guling/Sprei/Taplak Meja	76.800.000,00	35.026.205,00	45,61	-
	JUMLAH	33.978.551.459,00	30.299.078.734,00	89,17	26.977.768.845,00

Belanja Belanja Bantal/Guling/Sarung Bantal/Sarung Guling/Sprei/Taplak Meja terealisasi hanya senilai **45,61%** dari anggaran. Semula dianggarkan pada Dinas Kesehatan untuk belanja Puskesmas yang melayani jasa rawat inap 24 jam, namun pada realisasinya terdapat beberapa Puskesmas yang belum melayani jasa rawat inap, sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal.

5.2.1.2.2 Belanja Bahan Material

Pada tahun 2018 Belanja Bahan Material dianggarkan senilai **Rp35.020.808.552,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp26.675.932.381,00** atau **76,17%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp8.576.404.202,00** atau **24,33%** jika dibandingkan dengan

realisasi tahun 2017 senilai **Rp35.252.336.583,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.48 Realisasi Belanja Bahan Material

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bahan Baku Bangunan	3.439.729.754,00	2.798.363.158,00	81,35	3.267.808.924,00
2	Belanja Bahan/Bibit Tanaman	844.255.000,00	713.088.000,00	84,46	669.468.400,00
3	Belanja Bibit Ternak	252.555.900,00	216.755.900,00	85,82	332.263.600,00
4	Belanja Bahan Obat-obatan	19.482.092.053,00	12.941.820.866,00	66,43	20.068.646.596,00
5	Belanja Bahan Kimia	1.161.232.116,00	1.065.390.500,00	91,75	1.444.255.600,00
6	Belanja Material Fasilitas Pameran/Stand	323.010.000,00	322.594.000,00	99,87	264.733.000,00
7	Belanja Material Dokumentasi/Film/Kaset/V CD/DVD	154.359.299,00	131.469.900,00	85,17	197.448.300,00
8	Belanja Bahan/ Material Praktek	4.327.864.630,00	3.855.217.887,00	89,08	4.247.226.463,00
9	Belanja Bahan/Material Penerangan Jalan, Rambu Jalan, Taman dan Hutan Kota	2.572.306.000,00	2.347.147.970,00	91,25	3.072.124.200,00
10	Belanja Bahan Penutup Reklame	40.500.000,00	40.500.000,00	100,00	356.405.000,00
11	Belanja Bahan/Material Perbengkelan	302.865.000,00	300.235.000,00	99,13	236.985.500,00
12	Belanja Pakan Hewan / Ternak	207.763.600,00	203.143.925,00	97,78	472.304.000,00
13	Belanja Persediaan Bahan Makanan Pokok	794.500.000,00	774.825.000,00	97,52	-
14	Belanja Bahan/Material untuk Budidaya dan Pasca Panen	134.319.500,00	133.655.000,00	99,51	302.210.000,00
15	Belanja Bahan/Material Lainnya	492.745.700,00	387.552.400,00	78,65	76.337.000,00
16	Belanja Bahan dan Alat Praktek Sekolah Lapang Komoditi Pertanian/Perkebunan	33.150.000,00	33.150.000,00	100,00	50.500.000,00
17	Belanja Papan Nama/Nomenklatur	10.000.000,00	7.642.875,00	76,43	22.800.000,00
18	Belanja Patok	447.560.000,00	403.380.000,00	90,13	170.820.000,00
	JUMLAH	35.020.808.552,00	26.675.932.381,00	76,17	35.252.336.583,00

5.2.1.2.3 Belanja Jasa Kantor

Pada tahun 2018 Belanja Jasa Kantor dianggarkan senilai **Rp225.453.238.154,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp206.417.360.538,00** atau **91,56%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp43.937.762.487,00** atau **27,04%** jika dibandingkan

dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp162.479.598.051,00**
dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49 Daftar Belanja Jasa Kantor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALIASASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Telepon	1.012.683.840,00	434.475.511,00	42,90	410.222.471,00
2	Belanja Air	1.444.878.800,00	674.451.010,00	46,68	692.307.538,00
3	Belanja Listrik	37.866.575.950,00	35.251.730.156,00	93,09	31.281.558.682,00
4	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.932.214.960,00	1.798.135.900,00	93,06	1.841.000.000,00
5	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	3.764.783.273,00	3.106.781.478,00	82,52	2.565.662.638,00
6	Belanja Paket/Pengiriman	6.820.000,00	2.241.000,00	32,86	11.904.000,00
7	Belanja Sertifikasi	1.013.396.000,00	457.622.180,00	45,16	242.710.240,00
8	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	14.930.000,00	3.420.000,00	22,91	3.465.000,00
9	Belanja Jasa Dokumentasi	157.780.000,00	154.000.000,00	97,60	99.800.000,00
10	Belanja Jasa Publikasi	8.019.489.200,00	7.750.127.900,00	96,64	7.562.667.500,00
11	Belanja Jasa Dekorasi Ruangan/Gedung Kantor	1.823.224.500,00	1.429.175.000,00	78,39	1.946.163.500,00
12	Belanja Jasa Pengolahan Data Perkantoran	252.580.000,00	204.650.000,00	81,02	312.324.000,00
13	Belanja Jasa Pengarsipan	254.631.964,00	252.550.000,00	99,18	433.450.000,00
14	Belanja Jasa Kesehatan	155.125.507.193,00	143.135.297.911,00	92,27	108.195.212.295,00
15	Belanja Pajak	198.587.350,00	149.032.437,00	75,05	170.792.047,00
16	Belanja Gas Alam	2.400.000,00	454.860,00	18,95	1.828.070,00
17	Belanja Jasa Uji Laboratorium	378.155.000,00	375.663.000,00	99,34	313.948.350,00
18	Belanja Jasa Administrasi Penanganan Perkara	17.500.000,00	12.550.000,00	71,71	5.360.000,00
19	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	54.150.000,00	7.297.720,00	13,48	375.033.200,00
20	Belanja Jasa Upah Tukang/Mandor/Juru Laden/Petugas Kebersihan	8.804.675.000,00	8.279.462.000,00	94,03	5.987.157.500,00
21	Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis	319.539.924,00	101.367.475,00	31,72	27.031.020,00
22	Belanja Jasa Profesi	28.200.000,00	28.200.000,00	100,00	-
23	Belanja Jasa Kebersihan	1.929.355.200,00	1.883.085.000,00	97,60	-
24	Belanja Jasa Pengamanan	1.026.180.000,00	925.590.000,00	90,20	-
25	Belanja Jasa Pengangkutan Sampah	5.000.000,00	-	-	-
	JUMLAH	225.453.238.154,00	206.417.360.538,00	91,56	162.479.598.051,00

Belanja jasa kantor berupa telepon dan air terealisasi kurang dari **50,00%**. Penganggarannya menggunakan asumsi adanya kenaikan tarif yang signifikan, namun realisasinya tidak sebanding dengan asumsi kenaikan tarifnya.

Belanja Paket/Pengiriman terealisasi senilai **32,86%** dari anggaran dikarenakan pada Dinas Komunikasi dan

Informatika kebutuhan jasa ekspedisi pengiriman dokumen kepada wajib retribusi berkurang.

Belanja Sertifikasi terealisasi senilai **45,16%** dari anggaran dikarenakan pada Badan Keuangan dan Aset Daerah adanya kendala personil di BPN dalam hal pengurusan administrasi pengukuran di lapangan sehingga sertifikat yang diterbitkan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Sedangkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dikarenakan kegiatan pemanfaatan tanah dialihkan ke Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan.

Belanja Transaksi Keuangan terealisasi senilai **22,91%** dari anggaran dikarenakan pada Dinas Kesehatan belanja transaksi keuangan dianggarkan lebih untuk mengantisipasi jika terjadinya kenaikan biaya administrasi kliring yang tidak dapat di prediksi.

Belanja gas Alam terealisasi senilai **18,95%** dari anggaran dikarenakan pada Sekretariat Daerah rumah jabatan Kepala Daerah dan rumah jabatan Wakil Kepala Daerah tidak ditempati.

Belanja Jasa Pengukuran Tanah terealisasi senilai **13,48%** dari anggaran dikarenakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terdapat beberapa Belanja Modal Tanah yang tidak terealisasi seperti Belanja Modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah, Belanja Modal Pengadaan tanah untuk sarana air minum/air bersih dan Belanja Modal Pengadaan Tanah Pemakaman.

Belanja Jasa Pengolahan Limbah Medis terealisasi senilai **31,72%** dari anggaran dikarenakan pada Dinas Kesehatan adanya keterbatasan mobil dari PT. WASTEK sebagai jasa pengangkutan limbah medis untuk mengangkut limbah dari puskesmas-puskesmas, sehingga tidak dapat terangkut secara maksimal.

5.2.1.2.4 Belanja Premi Asuransi

Pada tahun 2018 Belanja Premi Asuransi dianggarkan senilai **Rp1.831.055.110,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp996.144.417,00** atau **54,40%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp84.802.888,00** atau **7,85%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp1.080.947.305,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.50 Realisasi Belanja Premi Asuransi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018		REALISASI 2017
		(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)
1	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	674.122.131,00	-	-	-
2	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah	1.156.932.979,00	996.144.417,00	86,10	1.080.947.305,00
	JUMLAH	1.831.055.110,00	996.144.417,00	54,40	1.080.947.305,00

Belanja Premi Asuransi Kesehatan dianggarkan bagi tenaga honorer. Belanja tersebut tidak teralisasi dikarenakan belum adanya *MOU* kerjasama antara SKPD dengan pihak BPJS.

5.2.1.2.5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

Pada tahun 2018 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dianggarkan senilai **Rp17.220.773.399,00**. Belanja tersebut teralisasi senilai **Rp14.348.284.105,00** atau **83,32%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp321.574.262,00** atau **2,29%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp14.026.709.843,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.51 Realisasi Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Service	1.626.970.100,00	1.315.467.454,00	80,85	1.669.498.630,00
2	Belanja Penggantian Suku Cadang	4.299.637.075,00	3.528.944.608,00	82,08	2.727.270.497,00
3	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	10.168.177.548,00	8.802.561.493,00	86,57	8.819.490.416,00
4	Belanja Jasa KIR	29.880.000,00	13.670.200,00	45,75	12.350.000,00
5	Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	1.096.108.676,00	687.640.350,00	62,73	798.100.300,00
	JUMLAH	17.220.773.399,00	14.348.284.105,00	83,32	14.026.709.843,00

Belanja Jasa KIR teralisasi senilai **45,75%** dari anggaran dikarenakan beberapa SKPD seperti Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Perhubungan, Sekretariat Daerah, dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri tidak teralisasi dikarenakan terdapat penghapusan atas beberapa kendaraan yang memiliki KIR.

5.2.1.2.6 Belanja Cetak dan Penggandaan

Pada tahun 2018 Belanja Cetak dan Penggandaan dianggarkan senilai **Rp27.894.412.728,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp24.660.693.746,00** atau **88,41%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.573.886.480,00** atau **6,82%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp23.086.807.266,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Realisasi Belanja Cetak Dan Penggandaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Cetak	21.717.601.437,00	19.351.125.117,00	89,10	18.238.001.078,00
2	Belanja Penggandaan	5.006.198.491,00	4.380.548.003,00	87,50	3.717.332.678,00
3	Belanja Penjilidan	1.047.967.400,00	809.952.026,00	77,29	894.779.510,00
4	Cetak Buku, Majalah, Profil	83.536.500,00	82.288.500,00	98,51	227.780.000,00
5	Belanja Cetak Foto	39.108.900,00	36.780.100,00	94,05	8.914.000,00
	JUMLAH	27.894.412.728,00	24.660.693.746,00	88,41	23.086.807.266,00

5.2.1.2.7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Pada tahun 2018 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir dianggarkan senilai **Rp20.495.109.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp18.168.495.500,00** atau **88,65%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp2.543.194.822,00** atau **16,28%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp15.625.300.678,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.53 Realisasi Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas	46.000.000,00	46.000.000,00	100,00	161.500.000,00
2	Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat	8.238.384.000,00	7.241.337.500,00	87,90	5.324.118.000,00
3	Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan	8.653.735.000,00	8.054.927.000,00	93,08	8.141.376.000,00
4	Belanja Sewa Tempat Parkir/Ruang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	265.000.000,00	-	-	107.181.818,00
5	Belanja Sewa Kamar Hotel	3.042.990.000,00	2.584.231.000,00	84,92	1.891.124.860,00
6	Belanja Sewa Tanah/Lahan	249.000.000,00	242.000.000,00	97,19	-
	JUMLAH	20.495.109.000,00	18.168.495.500,00	88,65	15.625.300.678,00

Belanja Belanja Sewa Tempat Parkir/Ruang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas tidak terealisasi dikarenakan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata,

Kepemudaan, dan Olahraga adanya pemutusan kerjasama/MOU kontrak lahan parkir objek wisata gunung jati dengan korem sebagai pemilik lahan.

5.2.1.2.8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Pada tahun 2018 Belanja Sewa Sarana Mobilitas dianggarkan senilai **Rp2.534.485.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp2.234.940.000,00** atau **88,18%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp866.840.000,00** atau **63,36%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp1.368.100.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.54 Realisasi Belanja Sewa Sarana Mobilitas

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat	2.500.345.000,00	2.200.800.000,00	88,02	1.368.100.000,00
2	Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara	34.140.000,00	34.140.000,00	100,00	-
	JUMLAH	2.534.485.000,00	2.234.940.000,00	88,18	1.368.100.000,00

5.2.1.2.9 Belanja Sewa Alat Berat

Pada tahun 2018 Belanja Sewa Alat Berat dianggarkan senilai **Rp33.672.600,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp15.878.000,00** atau **47,15%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp388.722.000,00** atau **96,08%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp404.600.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.55 Realisasi Belanja Sewa Alat Berat

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Eskavator	7.866.600,00	-	-	-
2	Belanja Sewa Buldoser	-	-	-	398.200.000,00
3	Belanja Sewa Wheel Loader	-	-	-	2.400.000,00
4	Belanja Sewa Dump Truck	25.806.000,00	15.878.000,00	61,53	4.000.000,00
	JUMLAH	33.672.600,00	15.878.000,00	47,15	404.600.000,00

Belanja Sewa Eskavator dianggarkan pada Satuan Polisi Pamong Praja pada kegiatan penertiban umum berupa razia

bangunan liar. Kegiatan tersebut di tahun 2018 tidak terlaksana.

5.2.1.2.10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Pada tahun 2018 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor dianggarkan senilai **Rp5.580.645.599,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp5.223.407.000,00** atau **93,60%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.110.306.600,00** atau **26,99%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp4.113.100.400,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.56 Realisasi Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Sewa Meja Kursi	926.810.199,00	886.178.200,00	95,62	696.237.000,00
2	Belanja Sewa Proyektor	21.000.000,00	12.600.000,00	60,00	-
3	Belanja Sewa Generator	381.645.900,00	278.105.300,00	72,87	173.941.300,00
4	Belanja Sewa Tenda / Panggung	2.413.590.600,00	2.318.464.600,00	96,06	1.495.345.100,00
5	Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional	18.000.000,00	18.000.000,00	100,00	45.000.000,00
6	Belanja Sewa Peralatan/Perlengkapan Teknologi Tepat Guna	9.600.000,00	9.600.000,00	100,00	9.600.000,00
7	Belanja Sewa Sound System	1.619.432.800,00	1.530.297.800,00	94,50	1.551.076.000,00
8	Belanja Sewa Peralatan Outbound	24.116.100,00	24.116.100,00	100,00	6.000.000,00
9	Belanja Sewa Alat Musik	38.000.000,00	38.000.000,00	100,00	20.962.500,00
10	Belanja Sewa Peralatan Studio	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	103.600.000,00
11	Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Acara Pembukaan/Penutupan	1.950.000,00	300.000,00	15,38	11.338.500,00
12	Belanja Sewa Peralatan & Perlengkapan Lainnya	122.500.000,00	103.745.000,00	84,69	-
	JUMLAH	5.580.645.599,00	5.223.407.000,00	93,60	4.113.100.400,00

Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Acara Pembukaan/Penutupan terealisasi senilai **15,38%** dikarenakan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah hanya melakukan belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor sesuai kebutuhan yaitu 15 kursi untuk 45 peserta.

5.2.1.2.11 Belanja Makanan dan Minuman

Pada tahun 2018 Belanja Makanan dan Minuman dianggarkan senilai **Rp53.684.336.200,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp48.976.268.474,00** atau **91,23%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp6.271.915.849,00** atau **14,69%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp42.704.352.625,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.57 Realisasi Belanja Makanan Dan Minuman

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	1.470.118.000,00	1.408.306.290,00	95,80	1.622.715.000,00
2	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	27.798.328.500,00	24.457.038.004,00	87,98	19.274.776.896,00
3	Belanja Makanan dan Minuman Tamu	4.580.630.900,00	4.406.504.280,00	96,20	3.842.890.529,00
4	Belanja Makanan dan Minuman Peserta Kegiatan	13.687.249.000,00	12.906.931.800,00	94,30	10.785.520.500,00
5	Belanja Makanan dan Minuman Lembur	18.864.000,00	18.864.000,00	100,00	2.081.823.900,00
6	Belanja Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	-	-	-	45.000,00
7	Belanja Makanan dan Minuman Atlit/Panti/Balita	6.129.145.800,00	5.778.624.100,00	94,28	5.096.580.800,00
	Jumlah	53.684.336.200,00	48.976.268.474,00	91,23	42.704.352.625,00

5.2.1.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

Pada tahun 2018 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya dianggarkan senilai **Rp1.674.217.200,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp1.652.895.100,00** atau **98,73%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp1.383.792.762,00** atau **45,57%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp3.036.687.862,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.58 Realisasi Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	191.350.000,00	190.950.000,00	99,79	167.200.000,00
2	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	225.500.000,00	223.500.000,00	99,11	283.920.000,00
3	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	189.500.000,00	188.400.000,00	99,42	2.980.000,00
4	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	923.542.200,00	906.670.100,00	98,17	2.424.857.862,00
5	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	5.175.000,00
6	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	116.000.000,00	115.450.000,00	99,53	148.280.000,00

Tabel 5.58 Realisasi Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
7	Belanja Atribut Pakaian	8.325.000,00	8.325.000,00	100,00	4.275.000,00
8	Belanja Pakaian Dinas Lainnya	20.000.000,00	19.600.000,00	98,00	-
	JUMLAH	1.674.217.200,00	1.652.895.100,00	98,73	3.036.687.862,00

5.2.1.2.13 Belanja Pakaian Kerja

Pada tahun 2018 Belanja Pakaian Kerja dianggarkan senilai **Rp2.315.803.400,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp2.212.872.600,00** atau **95,56%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp721.915.090,00** atau **48,42%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp1.490.957.510,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Realisasi Belanja Pakaian Kerja

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pakaian Kerja Lapangan	1.944.945.800,00	1.856.414.950,00	95,45	1.443.617.510,00
2	Belanja Pakaian Seragam	25.700.000,00	25.700.000,00	100,00	33.250.000,00
3	Belanja Topi Lapangan	25.250.000,00	23.952.250,00	94,86	13.440.000,00
4	Belanja Sepatu Lapangan	319.907.600,00	306.805.400,00	95,90	650.000,00
	JUMLAH	2.315.803.400,00	2.212.872.600,00	95,56	1.490.957.510,00

5.2.1.2.14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

Pada tahun 2018 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu dianggarkan senilai **Rp3.091.096.170,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp2.942.006.450,00** atau **95,18%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp184.386.050,00** atau **5,90%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp3.126.392.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60 Realisasi Belanja Pakaian Khusus Dan Hari-Hari Tertentu

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pakaian KORPRI	4.420.000,00	4.420.000,00	100,00	-
2	Belanja Pakaian Adat Daerah	262.500.000,00	236.399.500,00	90,06	97.860.000,00

3	Belanja Pakaian Batik Tradisional	646.082.500,00	590.819.500,00	91,45	729.552.500,00
4	Belanja Pakaian Olahraga	1.954.716.070,00	1.892.760.850,00	96,83	2.186.195.000,00
5	Belanja Pakaian Pasien dan Tenaga Medis	120.727.600,00	115.231.600,00	95,45	112.785.000,00
6	Belanja Pakaian Drumband	102.650.000,00	102.375.000,00	99,73	-
	JUMLAH	3.091.096.170,00	2.942.006.450,00	95,18	3.126.392.500,00

5.2.1.2.15 Belanja Perjalanan Dinas

Pada tahun 2018 Belanja Perjalanan Dinas dianggarkan senilai **Rp57.643.596.805,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp48.564.929.508,00** atau **84,25%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp12.194.530.859,00** atau **33,53%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp36.370.398.649,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61 Realisasi Belanja Perjalanan Dinas

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	28.553.635.333,00	23.026.975.800,00	80,64	18.408.329.500,00
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah	29.089.961.472,00	25.537.953.708,00	87,79	17.956.499.149,00
3	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	-	-	5.570.000,00
	JUMLAH	57.643.596.805,00	48.564.929.508,00	84,25	36.370.398.649,00

5.2.1.2.16 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Pada tahun 2018 Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dianggarkan senilai **Rp604.000.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp450.000.000,00** atau **74,50%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp60.000.000,00** atau **11,76%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp510.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.62 Realisasi Beasiswa Pendidikan PNS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	166.000.000,00	166.000.000,00	100,00	100.000.000,00
2	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	438.000.000,00	284.000.000,00	64,84	410.000.000,00
	JUMLAH	604.000.000,00	450.000.000,00	74,50	510.000.000,00

5.2.1.2.17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

Pada tahun 2018 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS dianggarkan senilai **Rp5.951.821.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp4.583.973.000,00** atau **77,02%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp523.643.000,00** atau **12,90%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp4.060.330.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63 Realisasi Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Kursus-kursus Singkat/Pelatihan	5.128.733.000,00	3.836.563.000,00	74,81	3.225.378.000,00
2	Belanja Sosialisasi	294.988.000,00	273.185.000,00	92,61	86.552.000,00
3	Belanja Bimbingan Teknis	528.100.000,00	474.225.000,00	89,80	748.400.000,00
	JUMLAH	5.951.821.000,00	4.583.973.000,00	77,02	4.060.330.000,00

5.2.1.2.18 Belanja Pemeliharaan

Pada tahun 2018 Belanja Pemeliharaan dianggarkan senilai **Rp41.711.188.710,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp31.216.658.326,00** atau **74,84%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp2.378.556.274,00** atau **7,08%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp33.595.214.600,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.64 Realisasi Belanja Pemeliharaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Pemeliharaan Jalan	16.645.000.000,00	12.736.823.310,00	76,52	14.419.923.000,00
2	Belanja Pemeliharaan Jembatan	400.000.000,00	394.637.000,00	98,66	805.878.000,00
3	Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor	11.933.256.460,00	8.753.787.934,00	73,36	12.351.155.867,00
4	Belanja Penggantian Suku Cadang	518.183.000,00	434.812.000,00	83,91	1.115.095.400,00
5	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Kantor	2.721.246.500,00	1.832.957.136,00	67,36	1.753.463.737,00
6	Belanja Pemeliharaan Saluran Air	2.739.400.000,00	1.880.573.000,00	68,65	-
7	Belanja Pemeliharaan Rumah Jabatan/Rumah Dinas	1.065.000.000,00	1.060.535.000,00	99,58	413.636.400,00
8	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga	31.600.000,00	25.657.623,00	81,20	25.850.000,00
9	Belanja Pemeliharaan Komputer dan Jaringan	1.725.130.100,00	1.336.196.862,00	77,45	1.317.477.448,00

Tabel 5.64 Realisasi Belanja Pemeliharaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
10	Belanja Pemeliharaan Alat Berat	661.562.000,00	634.583.800,00	95,92	294.542.000,00
11	Belanja Pemeliharaan Mesin / Alat-alat Bengkel	24.525.900,00	17.194.900,00	70,11	16.709.800,00
12	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Komunikasi	37.300.000,00	37.300.000,00	100,00	33.760.000,00
13	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Studio	8.792.950,00	8.692.950,00	98,86	3.382.950,00
14	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran	205.500.000,00	63.878.926,00	31,08	16.937.268,00
15	Belanja Pemeliharaan Alat-alat Laboratorium	129.696.500,00	91.565.000,00	70,60	187.100.000,00
16	Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS/TPA)	1.429.650.000,00	741.696.000,00	51,88	40.750.000,00
17	Belanja Pemeliharaan / Service	1.435.345.300,00	1.165.766.885,00	81,22	799.552.730,00
	JUMLAH	41.711.188.710,00	31.216.658.326,00	74,84	33.595.214.600,00

Belanja Pemeliharaan Alat-alat Kedokteran terealisasi senilai **31,08%** dikarenakan pada Dinas Kesehatan alat-alat kedokteran di beberapa puskesmas masih dalam kondisi baik.

Belanja Pemeliharaan Tempat Pembuangan Sampah (TPS/TPA) terealisasi senilai **51,88%** dikarenakan pada Dinas Lingkungan Hidup ada belanja pemeliharaan yang tidak teralisasi yaitu pemeliharaan jalan TPA gunung santri. Belanja tersebut terdapat dalam anggaran perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk dilaksanakan.

5.2.1.2.19 Belanja Jasa Konsultansi

Pada tahun 2018 Belanja Jasa Konsultansi dianggarkan senilai **Rp19.038.901.523,00** Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp16.935.806.150,00** atau **88,95%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp2.695.981.493,00** atau **13,73%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp19.631.787.643,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.65 Realisasi Belanja Jasa Konsultansi

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian	3.419.107.300,00	3.200.645.600,00	93,61	4.810.697.109,00
2	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan	12.147.919.338,00	11.006.090.550,00	90,60	8.807.440.954,00
3	Belanja Jasa Konsultansi	1.672.174.885,00	1.392.956.000,00	83,30	4.531.554.080,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	Sistem Informasi Manajemen				
4	Belanja Jasa Konsultansi Teknologi dan Sistem Informasi	966.700.000,00	824.260.000,00	85,27	831.645.000,00
5	Belanja Jasa Konsultansi Penilaian / Appraisal	833.000.000,00	511.854.000,00	61,45	650.450.500,00
	JUMLAH	19.038.901.523,00	16.935.806.150,00	88,95	19.631.787.643,00

5.2.1.2.20 Belanja Stimulan dan Hadiah

Pada tahun 2018 Belanja Stimulan dan Hadiah dianggarkan senilai **Rp309.292.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp308.682.000,00** atau **99,80%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp308.682.000,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp0,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.66 Belanja Stimulan dan Hadiah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hadiah dalam Bentuk Uang	157.750.000,00	157.750.000,00	100,00	-
2	Belanja Hadiah dalam Bentuk Barang	150.000.000,00	149.390.000,00	99,59	-
3	Belanja Stimulan dalam Bentuk Barang	1.542.000,00	1.542.000,00	100,00	-
	JUMLAH	309.292.000,00	308.682.000,00	99,80	-

5.2.1.2.21 Belanja Jasa Travel/Event Organizer

Pada tahun 2018 Belanja Jasa Travel/EO dianggarkan senilai **Rp4.522.011.126,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp4.422.031.200,00** atau **97,79%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp6.842.268.700,00** atau **60,74%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp11.264.299.900,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.67 Realisasi Belanja Jasa Travel/EO

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Travel	125.000.000,00	123.660.000,00	98,93	3.190.734.100,00
2	Belanja Jasa Event Organizer	4.397.011.126,00	4.298.371.200,00	97,76	8.073.565.800,00

	JUMLAH	4.522.011.126,00	4.422.031.200,00	97,79	11.264.299.900,00
--	--------	------------------	------------------	-------	-------------------

5.2.1.2.22 Belanja Barang Dana BOS

Pada tahun 2018 Belanja Barang Dana BOS dianggarkan senilai **Rp0,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp0,00** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp2.044.040.300,00** atau **100%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp2.044.040.300,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.68 Realisasi Belanja Barang Dana BOS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Barang Dana BOS	-	-	-	2.044.040.300,00
	JUMLAH	-	-	-	2.044.040.300,00

5.2.1.2.23 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan

Pada tahun 2018 Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan dianggarkan senilai **Rp91.495.704.990,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp86.727.809.462,00** atau senilai **94,79%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp45.081.503.018,00** atau **108,25%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp41.646.306.444,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.69 Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/ Masyarakat	91.495.704.990,00	86.727.809.462,00	94,79	41.646.306.444,00
	JUMLAH	91.495.704.990,00	86.727.809.462,00	94,79	41.646.306.444,00

Realisasi senilai **Rp41.646.306.444,00** tersebut direalisasikan oleh 6 (enam) SKPD dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.70 Realisasi Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Per SKPD

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN 2018	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
		(Rp)	(Rp)	(%)	
1	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	64.098.351.256,00	62.749.995.234,00	97,90	24.387.736.164,00

2	Dinas Lingkungan Hidup	11.642.200.000,00	9.522.350.778,00	81,79	299.468.000,00
3	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	385.000.000,00	384.186.000,00	99,79	129.906.000,00
4	Dinas Komunikasi Dan Informatika	-	-	-	771.340.800,00
5	Dinas Pertanian	11.453.478.734,00	10.269.699.450,00	89,66	15.746.731.480,00
6	Dinas Kelautan Dan Perikanan	579.300.000,00	575.678.000,00	99,37	311.124.000,00
7	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	3.337.375.000,00	3.225.900.000,00	96,66	-
	JUMLAH	91.495.704.990,00	86.727.809.462,00	94,79	41.646.306.444,00

5.2.1.2.24 Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat

Pada tahun 2018 Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat dianggarkan senilai **Rp7.491.430.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp7.467.569.800,00** atau **99,68%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp3.175.307.700,00** atau **29,84%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp10.642.877.500,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.71 Realisasi Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa Yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat per SKPD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
A	Dinas Sosial				
1	Belanja Bantuan Sosial Barang / Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	7.491.430.000,00	7.467.569.800,00	99,68	9.884.002.500,00
B	Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1	Belanja Bantuan Sosial Barang / Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	-	-	758.875.000,00
	JUMLAH	7.491.430.000,00	7.467.569.800,00	99,68	10.642.877.500,00

5.2.1.2.25 Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan

Pada tahun 2018 Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan dianggarkan senilai **Rp635.000.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp374.951.500,00** atau **59,05%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp218.233.500,00** atau **36,79%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp593.185.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.72 Realisasi Belanja Barang/Jasa Selain Hibah
Dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan**

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Barang/Jasa selain Hibah dan Bantuan Sosial untuk diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	635.000.000,00	374.951.500,00	59,05	593.185.000,00
	JUMLAH	635.000.000,00	374.951.500,00	59,05	593.185.000,00

Realisasi Belanja Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan senilai **Rp374.951.500,00** tersebut direalisasikan oleh SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.73 Realisasi Belanja Barang/Jasa Selain Hibah
Dan Bantuan Sosial Untuk Diserahkan per SKPD**

NO	NAMA SKPD	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018 (Rp)		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Dinas Pendidikan	635.000.000,00	374.951.500,00	59,05	-
2	Dinas Sosial	-	-	-	105.016.000,00
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	85.741.000,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-	402.428.000,00
	JUMLAH	635.000.000,00	374.951.500,00	59,05	593.185.000,00

5.2.1.2.26 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

Pada tahun 2018 Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber dianggarkan senilai **Rp27.059.584.000,00** Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp22.469.943.000,00** atau **83,04%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp2.108.899.738,00** atau **8,58%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp24.578.842.738,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.74 Realisasi Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber PNS	13.232.749.000,00	10.840.001.500,00	81,92	14.458.253.806,00
2	Belanja Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Non PNS	13.826.835.000,00	11.629.941.500,00	84,11	10.120.588.932,00
	JUMLAH	27.059.584.000,00	22.469.943.000,00	83,04	24.578.842.738,00

5.2.1.2.27 Belanja Barang dan Jasa BLUD

Pada tahun 2018 Belanja Barang dan Jasa BLUD dianggarkan senilai **Rp103.640.964.375,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp95.405.249.059,38** atau **92,05%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp5.843.791.186,69** atau **5,77%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp101.249.040.246,07** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75 Realisasi Belanja Barang dan Jasa BLUD

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
A.	DINAS KESEHATAN				
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	2.500.000,00	-	-	-
B.	RSUD ARJAWINANGUN				
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	50.547.037.159,00	44.658.178.035,38	91,26	43.072.041.632,07
C.	RSUD WALED				
1	Belanja Barang dan Jasa BLUD	53.091.427.216,00	50.747.071.024,00	95,58	58.176.998.614,00
	JUMLAH	103.640.964.375,00	95.405.249.059,38	92,05	101.249.040.246,07

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per BLUD disajikan di lampiran 5.5.

Belanja Barang dan Jasa BLUD pada Dinas Kesehatan dianggarkan untuk pelatihan terkait penerapan pola keuangan BLUD. Tidak terealisasi dikarenakan tidak adanya alih status Puskesmas menjadi BLUD.

5.2.1.2.28 Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan

Pada tahun 2018 Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan dianggarkan senilai **Rp5.067.495.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp4.937.124.400,00** atau **97,43%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp1.674.254.700,00** atau **25,32%** jika dibandingkan dengan tahun 2017 senilai **Rp6.611.379.100,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.76 Realisasi Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hadiah Lomba	4.501.560.000,00	4.387.809.400,00	97,47	4.445.585.000,00
2	Belanja Penghargaan	565.935.000,00	549.315.000,00	97,06	2.165.794.100,00

Tabel 5.76 Realisasi Belanja Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	JUMLAH	5.067.495.000,00	4.937.124.400,00	97,43	6.611.379.100,00

5.2.1.2.30 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

Pada tahun 2018 Belanja Barang dan Jasa Dana BOS dianggarkan senilai **Rp123.427.538.126,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp121.198.417.712,00** atau **98,19%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp20.784.281.375,00** atau **14,64%** jika dibandingkan dengan tahun 2017 senilai **Rp141.982.699.087,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.77 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Dana BOS

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	123.427.538.126,00	121.198.417.712,00	98,19	141.982.699.087,00
	JUMLAH	123.427.538.126,00	121.198.417.712,00	98,19	141.982.699.087,00

5.2.1.3 Belanja Hibah

Pada tahun 2018 Belanja Hibah dianggarkan senilai **Rp63.412.500.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp57.515.561.814,00** atau **90,70%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja hibah pada PPKD meningkat senilai **Rp26.049.413.489,00** atau **82,79%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp31.466.148.325,00**.

Belanja hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Rincian realisasi Belanja Hibah sebagai berikut:

Tabel 5.78 Rincian Realisasi Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kepada KPU Kabupaten Cirebon	-	-	-	14.500.000.000,00
2	Belanja Hibah pada PPKD Untuk Pemerintah Pusat	28.450.000.000,00	23.647.185.470,00	83,12	1.000.000.000,00

Tabel 5.78 Rincian Realisasi Belanja Hibah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
3	Belanja Hibah pada PPKD Untuk Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan Yang Berbadan Hukum Indonesia	17.345.300.000,00	16.273.376.344,00	93,82	1.579.612.900,00
4	BOP PAUD Masyarakat/Swasta di Kab. Cirebon	17.617.200.000,00	17.595.000.000,00	99,87	14.386.535.425,00
	JUMLAH	63.412.500.000,00	57.515.561.814,00	90,70	31.466.148.325,00

5.2.1.4 Belanja Bantuan Sosial

Pada Tahun 2018 Belanja Bantuan Sosial dianggarkan senilai **Rp2.560.476.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp1.702.688.774,00** atau **66,50%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi belanja bantuan sosial pada PPKD meningkat senilai **Rp739.837.633,00** atau **76,84%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp962.851.141,00**.

Belanja Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Rincian realisasi belanja Bantuan Sosial sebagai berikut:

Tabel 5.79 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Sosial pada PPKD untuk Individu dan atau Keluarga	2.560.476.000,00	1.702.688.774,00	66,50	725.400.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial pada PPKD untuk Masyarakat	-	-	-	57.758.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial pada PPKD yang Tidak Dapat Direncanakan	-	-	-	179.693.141,00
	JUMLAH	2.560.476.000,00	1.702.688.774,00	66,50	962.851.141,00

5.2.2 Belanja Modal

Pada tahun 2018 dianggarkan senilai **Rp639.968.184.462,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp510.923.940.462,00** atau **79,84%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp98.644.273.498,00** atau **16,18%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp609.568.213.960,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.80 Realisasi Belanja Modal

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Tanah	17.985.938.000,00	8.435.062.000,00	46,90	87.497.995.340,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	117.810.063.431,00	88.822.429.289,00	75,39	74.338.697.665,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	154.008.355.928,00	130.132.103.447,00	84,50	156.383.718.216,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	311.599.051.207,00	252.384.857.989,00	81,00	264.837.489.078,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	27.334.785.896,00	25.918.284.042,00	94,82	7.460.158.300,00
6	Belanja Modal BLUD	11.229.990.000,00	5.231.203.695,00	46,58	3.891.756.698,00
7	Belanja Modal BOS	-	-	-	15.158.398.663,00
	JUMLAH	639.968.184.462,00	510.923.940.462,00	79,84	609.568.213.960,00

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa per BLUD disajikan di lampiran 5.5.

5.2.2.1 Belanja Tanah

Pada tahun 2018 Belanja Tanah dianggarkan senilai **Rp17.985.938.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp8.435.062.000,00** atau senilai **46,90%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp79.062.933.340,00** atau **90,36%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp87.497.995.340,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.81 Realisasi Belanja Tanah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan tanah kantor	-	-	-	1.282.500.000,00
2	Belanja Modal Pengadaan tanah sarana kesehatan rumah sakit	3.915.000.000,00	3.915.000.000,00	100,00	-
3	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah	8.000.000.000,00	-	-	9.975.000,00
4	Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum ibadah	-	-	-	9.444.651.840,00
5	Belanja modal Pengadaan tanah perikanan	-	-	-	3.715.656.000,00
6	Belanja modal Pengadaan tanah peternakan	-	-	-	749.329.000,00
7	Belanja modal pengadaan tanah jalan/pengairan	1.655.750.000,00	1.654.874.000,00	99,95	-
8	Belanja modal Pengadaan Tanah Pemakaman	800.000.000,00	-	-	-
9	Belanja Modal Pengadaan Tanah Sarana Pendidikan Tinggi	2.865.188.000,00	2.865.188.000,00	100,00	72.295.883.500,00
10	Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Sarana Air Minum/Air Bersih	750.000.000,00	-	-	-

Tabel 5.81 Realisasi Belanja Tanah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
	JUMLAH	17.985.938.000,00	8.435.062.000,00	46,90	87.497.995.340,00

Terdapat beberapa Belanja Modal Tanah yang tidak terealisasi diantaranya :

1. Belanja modal Pengadaan tanah sarana umum tempat pembuangan akhir sampah dianggarkan senilai **Rp8.000.000.000,00**;
2. Belanja modal Pengadaan Tanah Pemakaman dianggarkan senilai **Rp800.000.000,00**;
3. Belanja modal Pengadaan tanah untuk sarana air minum/air bersih dianggarkan senilai **Rp750.000.000,00**.

Hal tersebut dikarenakan adanya penundaan pelaksanaan pengadaan tanah tahun 2018 dengan beberapa alasan sebagaimana terdapat pada lampiran 5.6.

5.2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin

Pada tahun 2018 Belanja Peralatan dan Mesin dianggarkan senilai **Rp117.810.063.431,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp88.822.429.289,00** atau **75,39%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp14.483.731.624,00** atau **19,48%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp74.338.697.665,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.82 Realisasi Belanja Peralatan Dan Mesin

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat	7.771.477.300,00	4.234.088.622,00	54,48	3.560.555.300,00
2	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	13.482.906.500,00	8.582.273.846,00	63,65	5.252.299.900,00
3	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	790.850.000,00	667.804.000,00	84,44	886.520.000,00
4	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan di atas Air Tidak Bermotor	50.820.000,00	50.800.000,00	99,96	-
5	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel	813.183.000,00	752.713.100,00	92,56	401.703.600,00
6	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	2.960.140.200,00	1.417.797.000,00	47,90	925.270.000,00
7	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor	2.254.858.856,00	1.695.179.100,00	75,18	1.645.588.156,00
8	Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor	6.943.866.958,00	5.013.502.294,00	72,20	5.665.895.537,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
9	Belanja Modal Pengadaan Komputer	12.647.802.200,00	9.943.227.411,00	78,62	11.850.609.626,00
10	Belanja Modal Pengadaan Mebeulair	10.709.930.931,00	8.483.721.624,00	79,21	9.299.332.377,00
11	Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur	474.438.200,00	333.624.322,00	70,32	286.731.147,00
12	Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga	1.288.403.700,00	827.027.267,00	64,19	1.430.304.551,00
13	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio	2.708.988.937,00	1.883.536.616,00	69,53	2.575.008.790,00
14	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi	2.843.848.308,00	2.105.696.677,00	74,04	2.233.520.406,00
15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur	272.489.000,00	243.386.000,00	89,32	171.552.000,00
16	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	34.049.861.301,00	26.506.281.685,00	77,85	23.752.108.347,00
17	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	8.783.658.363,00	7.496.875.077,00	85,35	4.399.697.928,00
18	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan	44.000.000,00	42.050.000,00	95,57	-
19	Belanja Pendukung Belanja Modal Peralatan dan Mesin	900.000,00	-	-	2.000.000,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	8.917.639.677,00	8.542.844.648,00	95,80	-
	JUMLAH	117.810.063.431,00	88.822.429.289,00	75,39	74.338.697.665,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat terealisasi hanya senilai **54,48%** dikarenakan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pengadaan ekskavator terdapat dalam Anggaran Perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan penyerapan.

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan terealisasi hanya senilai **47,90%** dikarenakan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan terdapat kesalahan penginputan kode rekening belanja modal peralatan dan mesin yang seharusnya anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja modal pengadaan tanah peternakan untuk pembangunan rumah potong hewan (RPH) yang berlokasi di Kelurahan Pejambon namun anggaran tersebut tidak terealisasi karena beberapa faktor diantaranya pemilik tanah dan masyarakat menolak dengan adanya RPH karena adanya pembuangan limbah yang akan mencemari sungai, serta belum diterbitkannya surat ketetapan lokasi.

Belanja Pendukung Belanja Modal Peralatan dan Mesin tidak terealisasi dikarenakan rekening tersebut tidak digunakan lagi sesuai dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan APBD Kabupaten Cirebon Tahun 2018.

5.2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan

Pada tahun 2018 Belanja Gedung dan Bangunan dianggarkan senilai **Rp154.008.355.928,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp130.132.103.447,00** atau **84,50%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp26.251.614.769,00** atau **16,79%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp156.383.718.216,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.83 Realisasi Belanja Gedung Dan Bangunan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor	71.414.645.979,00	54.440.675.383,00	76,23	31.925.189.992,00
2	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas	1.898.350.000,00	1.843.062.229,00	97,09	1.687.516.000,00
3	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang	858.225.000,00	747.471.000,00	87,09	-
4	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan bersejarah	216.000.000,00	215.125.000,00	99,59	348.900.000,00
5	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian bangunan monumen	1.089.500.000,00	1.053.625.000,00	96,71	1.355.249.000,00
6	Belanja modal Pengadaan konstruksi/Pembelian Gedung Olah Raga	3.139.375.000,00	3.020.792.883,00	96,22	6.145.332.693,00
7	Belanja modal Pengadaan konstruksi Fisik/Bangunan Bukan Gedung	17.331.802.062,00	14.293.686.719,00	82,47	20.673.494.871,00
8	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung perpustakaan	1.440.000.000,00	1.435.980.000,00	99,72	-
9	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung taman kanak-kanak	573.700.000,00	569.360.000,00	99,24	1.043.995.000,00
10	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sekolah dasar/ sederajat	21.857.915.000,00	21.620.173.634,00	98,91	13.826.821.000,00
11	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung SMP/ sederajat	3.523.620.000,00	3.507.115.000,00	99,53	6.873.882.000,00
12	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung terminal	150.000.000,00	148.925.000,00	99,28	-
13	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung tempat pelelangan ikan	824.450.000,00	793.742.000,00	96,28	-
14	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana pasar	17.955.006.118,00	15.969.724.000,00	88,94	17.621.876.000,00
15	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat perdagangan	70.000.000,00	69.519.000,00	99,31	-
16	Belanja modal Pengadaan konstruksi taman	2.870.100.000,00	2.253.889.000,00	78,53	907.026.915,00
17	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung pusat hiburan rakyat	1.096.650.000,00	1.094.649.000,00	99,82	199.800.000,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
18	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana ibadah	140.200.000,00	122.200.000,00	87,16	-
19	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana olahraga	568.993.000,00	368.338.000,00	64,74	46.622.069.000,00
20	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung sarana industri	-	-	-	131.300.000,00
21	Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian halte	172.000.000,00	170.952.000,00	99,39	69.000.000,00
22	Belanja Modal Pemagaran	6.181.131.769,00	5.761.851.599,00	93,22	6.679.784.820,00
23	Belanja Modal Pembangunan Tempat/Halaman Parkir	567.622.000,00	564.067.000,00	99,37	172.480.925,00
24	Belanja Pendukung Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.070.000,00	67.180.000,00	97,26	100.000.000,00
	JUMLAH	154.008.355.928,00	130.132.103.447,00	84,50	156.383.718.216,00

5.2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pada tahun 2018 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan dianggarkan senilai **Rp311.599.051.207,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp252.384.857.989,00** atau **81,00%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp12.452.631.089,00** atau **4,70%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp264.837.489.078,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.84 Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan	166.983.681.246,00	140.468.972.854,00	84,12	125.193.461.000,00
2	Belanja modal Pengadaan konstruksi jembatan	18.212.713.500,00	16.913.625.444,00	92,87	22.958.892.000,00
3	Belanja modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air	112.026.984.150,00	82.103.968.008,00	73,29	106.024.866.997,00
4	Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, dan Hutan Kota	13.085.000.000,00	11.857.650.275,00	90,62	9.947.084.000,00
5	Belanja modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telpo dan Air	1.290.672.311,00	1.040.641.408,00	80,63	713.185.081,00
	JUMLAH	311.599.051.207,00	252.384.857.989,00	81,00	264.837.489.078,00

5.2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya

Pada tahun 2018 Aset Tetap Lainnya dianggarkan senilai **Rp27.334.785.896,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp25.918.284.042,00** atau senilai **94,82%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp18.458.125.742,00** atau **247,42%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp7.460.158.300,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan	1.397.950.000,00	725.581.215,00	51,90	7.172.965.800,00
2	Belanja Modal Pengadaan Barang bercorak Kesenian, Kebudayaan	321.612.000,00	229.277.000,00	71,29	119.132.500,00
3	Belanja Modal Pengadaan Hewan/Ternak dan Tanaman	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00	168.060.000,00
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	25.595.223.896,00	24.943.425.827,00	97,45	-
	JUMLAH	27.334.785.896,00	25.918.284.042,00	94,82	7.460.158.300,00

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan terealisasi senilai 51,90% dikarenakan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan pengadaan buku terdapat dalam anggaran perubahan sehingga tidak cukup waktu untuk melakukan penyerapan.

5.2.2.6 Belanja Modal BLUD

Pada tahun 2018 Belanja Modal BLUD dianggarkan senilai **Rp11.229.990.000,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp5.231.203.695,00** senilai **46,58%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.339.446.997,00** atau **34,42%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp3.891.756.698,00**.

Realisasi Belanja Modal BLUD pada RSUD Arjawinangun senilai **Rp4.025.579.345,00** dari anggarannya senilai **Rp7.058.700.000,00** terdiri dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai **Rp1.019.260.345,00** dari anggarannya senilai **Rp4.052.381.000,00** dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan senilai **Rp3.006.319.000,00** dari anggarannya senilai **Rp3.006.319.000,00**.

Realisasi Belanja Modal BLUD pada RSUD Waled senilai **Rp1.205.624.350,00** dari anggarannya senilai **Rp4.171.290.000,00** terdiri dari realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin senilai **Rp1.204.724.350,00** dari anggarannya senilai **Rp4.141.290.000,00** dan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya senilai **Rp900.000,00** dari anggarannya senilai **Rp30.000.000,00**.

Realisasi Belanja Modal BLUD senilai **46,58%** dikarenakan pada RSUD lebih banyak menggunakan sumber dana yang berasal dari DAK melalui APBD.

5.2.2.7 Belanja Modal BOS

Pada tahun 2018 Belanja Modal BOS dianggarkan senilai **Rp0,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp0,00** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp15.158.398.663,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp15.158.398.663,00**. Pada tahun 2018 Belanja Modal BOS

dianggarkan pada rekening Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Pada tahun 2018 Belanja Tidak Terduga dianggarkan senilai **Rp33.613.591.599,51**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp2.610.109.700,00** atau **7,77%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp2.610.109.700,00** atau **100,00%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp0,00**.

5.2.4 Belanja Transfer

Pada tahun 2018 Belanja Transfer dianggarkan senilai **Rp564.623.778.329,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp561.297.750.238,00** atau **99,41%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.612.393.052,00** atau **0,29%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp559.685.357.186,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Realisasi Belanja Transfer

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	20.472.671.069,00	19.112.397.591,00	93,36	17.983.066.618,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	544.151.107.260,00	542.185.352.647,00	99,64	541.702.290.568,00
	JUMLAH	564.623.778.329,00	561.297.750.238,00	99,41	559.685.357.186,00

5.2.4.1 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa

Pada tahun 2018 Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa dianggarkan senilai **Rp20.472.671.069,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp19.112.397.591,00** atau **93,36%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp1.129.330.973,00** atau **6,28%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp17.983.066.618,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.87 Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

No	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	17.000.000.000,00	15.723.897.591,00	92,49	14.482.484.618,00
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa	3.472.671.069,00	3.388.500.000,00	97,58	3.500.582.000,00
	JUMLAH	20.472.671.069,00	19.112.397.591,00	93,36	17.983.066.618,00

5.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Pada tahun 2018 Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan senilai **Rp544.151.107.260,00**. Belanja tersebut terealisasi senilai **Rp542.185.352.647,00** atau **99,64%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp483.062.079,00** atau **0,09%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp541.702.290.568,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.88 Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	542.655.979.260,00	540.690.225.520,00	99,64	540.658.371.975,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.495.128.000,00	1.495.127.127,00	100,00	1.043.918.593,00
	JUMLAH	544.151.107.260,00	542.185.352.647,00	99,64	541.702.290.568,00

Belanja Bantuan Keuangan merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Rincian realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebagai berikut:

Tabel 5.89 Rincian Realisasi Belanja Bantuan Keuangan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa				
a	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	542.655.979.260,00	540.690.225.520,00	99,64	540.658.371.975,00
	JUMLAH	542.655.979.260,00	540.690.225.520,00	99,64	540.658.371.975,00
2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
a	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	333.379.500,00	333.379.500,00	100,00	232.770.000,00
b	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat	132.160.500,00	132.160.500,00	100,00	92.276.575,00
c	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa	263.665.500,00	263.664.627,00	100,00	184.095.400,00

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
d	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera	131.448.000,00	131.448.000,00	100,00	91.779.000,00
e	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya	153.241.500,00	153.241.500,00	100,00	106.995.000,00
f	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Hati Nurani Rakyat	111.918.000,00	111.918.000,00	100,00	78.142.938,00
g	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya	174.264.000,00	174.264.000,00	100,00	121.673.000,00
h	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang	27.841.500,00	27.841.500,00	100,00	19.439.380,00
i	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat	117.085.500,00	117.085.500,00	100,00	81.750.000,00
j	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan	50.124.000,00	50.124.000,00	100,00	34.997.300,00
	JUMLAH	1.495.128.000,00	1.495.127.127,00	100,00	1.043.918.593,00
	JUMLAH KESELURUHAN	544.151.107.260,00	542.185.352.647,00	99,64	541.702.290.568,00

5.3. Pembiayaan Daerah

Pada tahun 2018 Pembiayaan Daerah dianggarkan senilai **Rp297.427.757.111,51**. Pembiayaan tersebut terealisasi senilai **Rp298.454.875.411,51** atau **100,35%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp13.044.859.611,22** atau **4,19%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp311.499.735.022,73** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.90 Tabel Realisasi Pembiayaan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penerimaan Pembiayaan	304.053.186.330,51	323.853.186.330,51	106,51	332.499.735.022,73
2	Pengeluaran Pembiayaan	6.625.429.219,00	25.398.310.919,00	383,35	21.000.000.000,00
	JUMLAH	297.427.757.111,51	298.454.875.411,51	100,35	311.499.735.022,73

5.3.1 Penerimaan Pembiayaan

Pada tahun 2018 Penerimaan Pembiayaan dianggarkan senilai **Rp304.053.186.330,51**. Penerimaan tersebut terealisasi senilai **Rp323.853.186.330,51** atau **106,51%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut menurun senilai **Rp8.646.548.692,22** atau **2,60%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp332.499.735.022,73** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91 Realisasi Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Penggunaan SiLPA	303.997.017.037,51	303.997.017.037,51	100,00	292.499.735.022,73
2	Pencairan Dana Cadangan	56.169.293,00	56.169.293,00	100,00	40.000.000.000,00
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	19.800.000.000,00	-	-
	JUMLAH	304.053.186.330,51	323.853.186.330,51	106,51	332.499.735.022,73

Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah senilai **Rp19.800.000.000,00** merupakan pinjaman RSUD Waled kepada Bank BJB yang digunakan untuk membiayai operasional karena adanya keterlambatan pembayaran dari pihak BPJS, dan untuk perencanaanya akan tercantum pada Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) perubahan RSUD Waled.

5.3.2 Pengeluaran Pembiayaan

Pada tahun 2018 Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan senilai **Rp6.625.429.219,00**. Pengeluaran tersebut terealisasi senilai **Rp25.398.310.919,00** atau **383,35%** dari anggaran yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut meningkat senilai **Rp4.398.310.919,00** atau **20,94%** jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2017 senilai **Rp21.000.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN	ANGGARAN 2018 (Rp)	REALISASI 2018		REALISASI 2017 (Rp)
			(Rp)	(%)	
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	20.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.800.000.000,00	4.772.881.700,00	82,29	1.000.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga	825.429.219,00	20.625.429.219,00	2.498,75	-
	JUMLAH	6.625.429.219,00	25.398.310.919,00	383,35	21.000.000.000,00

5.3.3 Perhitungan Anggaran

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2018 diperoleh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) senilai **Rp300.058.084.652,73** merupakan hasil perhitungan dari:

- Realisasi Pendapatan	Rp.	3.683.068.266.639,60
TA. 2018		
- Realisasi Belanja TA. 2018	Rp.	3.681.465.057.398,38
Surplus (I)	Rp.	1.603.209.241,22

- Penerimaan Daerah dari Pembiayaan	Rp.	323.853.186.330,51
- Pengeluaran Daerah dari Pembiayaan	Rp.	25.398.310.919,00
Pembiayaan Netto (II)	Rp.	298.454.875.411,51
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan (I+II)	Rp.	300.058.084.652,73

5.3.4 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berjalan senilai **Rp300.120.443.501,73** merupakan hasil perhitungan dari :

- Saldo Kas di Kas Daerah	Rp.	255.823.706.505,00
- Saldo Kas di Bendahara Penerimaan	Rp.	1.508.000,00
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp.	612,00
- Saldo Kas di Bendahara BLUD RSUD	Rp.	7.616.393.726,73
- Saldo Akhir Kas di Dana Kapitasi FKTP	Rp.	33.997.037.726,00
- Saldo Akhir Kas di BOS	Rp.	2.681.796.932,00
JUMLAH	Rp.	300.120.443.501,73

Terdapat selisih nilai SILPA tahun berjalan dengan rincian saldo kas per 31 Desember 2018. Selisih tersebut terdiri dari selisih Kas Dana Kapitasi FKTP senilai **Rp62.358.849,00** merupakan pengembalian belanja JKN atas temuan Inspektorat tahun 2017.

SILPA senilai **Rp300.120.443.501,73** terdiri dari SILPA atas dana-dana spesifik senilai **Rp93.358.658.398,73** dengan rincian sebagai berikut :

1. DAK Non Fisik	Rp	28.993.658.297,00
2. DAK Fisik	Rp	5.551.851.246,00
3. DBHCHT	Rp	824.257.248,00
4. Dana Insentif Daerah	Rp	2.705.459.049,00
5. Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	10.988.204.174,00
6. SILPA BLUD	Rp	7.616.393.726,73
7. SILPA JKN	Rp	33.997.037.726,00
8. SILPA Dana BOS	Rp	2.681.796.932,00

Sisanya senilai **Rp206.761.785.103,00** merupakan hasil efisiensi penggunaan APBD.

BAB VI

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

6.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo Anggaran Lebih Awal senilai **Rp303.997.017.037,51** merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) per 31 Desember Tahun 2017.

6.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan senilai **Rp323.853.186.330,51** merupakan SILPA tahun 2017 yang digunakan untuk pembiayaan tahun 2018.

6.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) senilai **Rp300.120.443.501,73** merupakan selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan. Total Penerimaan tahun 2018 adalah senilai **Rp3.683.068.266.639,60** dikurangi dengan jumlah belanja **Rp3.120.167.307.160,38** dikurangi dengan jumlah transfer **Rp561.297.750.238,00** serta ditambah dengan pembiayaan senilai **Rp298.454.875.411,51**. Saldo SiLPA tersebut termasuk saldo senilai **Rp62.358.849,00** yang dijelaskan lebih lanjut pada point 6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya.

6.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya senilai **(Rp62.358.849,00)** merupakan nilai SILPA pengembalian belanja JKN atas temuan Inspektorat tahun 2017.

6.5 Lain-Lain

Lain-lain senilai **Rp0,00**.

6.6 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir merupakan Saldo Anggaran Lebih Awal, dikurangi Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan ditambahkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dan Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2018 senilai **Rp300.120.443.501,73**.

BAB VII
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
NERACA

7.1 Aset

7.1.1 Aset Lancar

7.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Saldo kas di Kas Daerah per 31 Desember 2018 senilai **Rp255.823.706.505,00**, dan saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp268.960.174.443,00**. Kas di Kas Daerah merupakan saldo Kas Pemerintah Kabupaten Cirebon yang dikelola pada Bank BJB Cabang Sumber. Saldo Kas tersebut merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum Harian BUD Kabupaten Cirebon dengan Rekening Koran Bank BJB Cabang Sumber per 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.1
Rincian Kas di Kas Daerah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Rekening No.0008753148001/Kas umum	255.823.706.505,00	268.960.174.443,00
	JUMLAH	255.823.706.505,00	268.960.174.443,00

Saldo Kas di Kas Daerah senilai Rp255.823.706.505,00 terdiri dari SILPA atas dana-dana spesifik senilai Rp49.063.430.014,00 dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|------------------------------|----------------------|
| 1. DAK Non Fisik | Rp 28.993.658.297,00 |
| 2. DAK Fisik | Rp 5.551.851.246,00 |
| 3. DBHCHT | Rp 824.257.248,00 |
| 4. Dana Insentif Daerah | Rp 2.705.459.049,00 |
| 5. Bantuan Keuangan Provinsi | Rp 10.988.204.174,00 |

Sisanya senilai Rp206.760.276.491,00 merupakan hasil efisiensi penggunaan APBD.

7.1.1.2. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 senilai **Rp612,00** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp25.000.900,00**. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Cirebon yang masih berada pada Bendahara Pengeluaran berupa sisa dana kegiatan yang belum disetor ke Kas Daerah senilai **Rp612,00**. Berikut adalah rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang disajikan per SKPD:

Tabel 7.2
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Kecamatan Astanapaura	-	841.100,00
2	Kecamatan Suranenggala	-	2.750.000,00

Tabel 7.2 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Kecamatan Astanapura	-	841.100,00
2	Kecamatan Suranenggala	-	2.750.000,00
3	Kecamatan Kaliwedi	-	2.478.000,00
4	Dinas Pertanian	-	2.500.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	16.431.800,00
6	Kecamatan Sedong	612,00	-
	JUMLAH	612,00	25.000.900,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2017 senilai **Rp25.000.900,00** dan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tahun 2018 senilai **Rp612,00** masih ada di Kas di Bendahara Pengeluaran dan sudah disetor di tahun 2019.

Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kecamatan Sedong berupa sisa uang persediaan yang terlambat disetorkan ke kas daerah senilai **Rp612,00**, sudah disetorkan pada tanggal 4 Januari 2019.

7.1.1.3. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.508.000,00** dan per 31 Desember 2017 **Rp48.120.200,00**. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Cirebon yang masih berada pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke Kas Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.3 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Dinas Kesehatan	1.508.000,00	4.510.000,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	-	41.560.000,00
3	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	-	2.050.200,00
	JUMLAH	1.508.000,00	48.120.200,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Dinas Kesehatan merupakan saldo kas di Bendahara Penerimaan Pembantu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.4 Rincian Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu Puskesmas

NO	URAIAN	Rp
1	Puskesmas Kalibuntu	112.000,00
2	Puskesmas Losari	627.000,00
3	Puskesmas Sumber	769.000,00
	JUMLAH	1.508.000,00

7.1.1.4. Kas di Bendahara BLUD

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2018 senilai **Rp7.616.393.726,73** dan saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp2.788.459.049,51** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.5 Rincian Kas di Bendahara BLUD

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	RSUD Arjawinangun	3.999.798.467,73	2.056.837.158,51
2	RSUD Waled	3.616.595.259,00	731.621.891,00
	JUMLAH	7.616.393.726,73	2.788.459.049,51

7.1.1.5. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per 31 Desember 2018 senilai **Rp33.997.037.726,00** dan saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp31.442.904.356,00**. Saldo Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan. Perhitungan Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN adalah sebagai berikut:

Tabel 7.6 Perhitungan Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

SILPA 2017	31.442.904.356,00
Pendapatan 2018	98.319.628.204,00
Belanja 2018	(95.620.766.497,00)
Koreksi pengembalian belanja tahun 2017	62.358.849,00
Transfer jasa giro tahun 2017	(207.087.186,00)
Saldo Akhir 2018	33.997.037.726,00

Terdapat penerimaan kas pada JKN senilai **Rp62.358.849,00** merupakan pengembalian belanja JKN tahun 2017 atas temuan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Cirebon. Nilai tersebut tidak diakui sebagai realisasi anggaran tahun 2018.

Rincian kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN per puskesmas disajikan dalam Lampiran 7.1.

7.1.1.6 Kas di Bendahara Dana BOS

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2018 senilai **Rp2.681.796.932,00** dan saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp733.199.189,00**. Perhitungan Kas di Bendahara Dana BOS adalah sebagai berikut :

Tabel 7.7 Perhitungan Kas di Bendahara Dana BOS

SILPA 2017	733.199.189,00
Pendapatan Tahun 2018	214.099.137.130,00
Belanja Tahun 2018	(212.214.295.387,00)
Pengembalian biaya administrasi bank	72.223.443,00
Pajak jasa giro	(8.467.443,00)
Saldo Akhir 2018	2.681.796.932,00

Rincian atas Kas di Bendahara Dana BOS adalah sebagai berikut :

Tabel 7.8 Rincian Kas di Bendahara Dana BOS

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018
	Kas di Bendahara Dana BOS	
1	Bank	464.608.685,00
2	Uang Tunai	2.217.188.247,00
	JUMLAH	2.681.796.932,00

7.1.1.7 Piutang Pajak

7.1.1.7.1 Piutang Pajak

Saldo Piutang Pajak Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2018 senilai **Rp 70.285.713.117,50** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp61.687.797.290,50** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.9 Rincian Piutang Pajak Daerah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Pajak Hotel	1.044.750,00	750.000,00
2	Pajak Restoran	157.420.268,00	113.162.000,00
3	Pajak Hiburan	44.496.521,00	1.761.000,00
4	Pajak Reklame	470.914.733,00	457.205.053,00
5	Pajak Penerangan Jalan	179.400,00	179.400,00
6	Pajak Mineral Bukan Logam	190.030.488,50	44.120.812,50
7	Pajak Parkir	283.870.514,00	105.000,00
8	Pajak Air Tanah	1.654.699,00	32.600,00
9	Pajak Sarang Burung Walet	5.700.000,00	5.700.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2)	69.136.546.374,00	61.064.781.425,00
	JUMLAH	70.285.713.117,50	61.687.797.290,50

Berdasarkan tabel 7.9 nilai piutang pajak terendah adalah Pajak Penerangan Jalan senilai **Rp179.400,00** sedangkan nilai piutang pajak terbesar adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) senilai **Rp69.136.546.374,00**.

7.1.1.7.2 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Penyisihan Piutang Pajak Daerah pada tahun 2018 senilai **(Rp36.986.755.789,12)** merupakan penyisihan piutang pajak tak tertagih untuk tahun 2018.

Daftar Penyisihan Piutang Pajak terdapat dalam lampiran 7.2.

7.1.1.7.3 Piutang Pajak Netto

Piutang pajak netto pada tahun 2018 senilai **Rp33.298.957.328,38** merupakan selisih dari Piutang Pajak dengan Penyisihan Piutang Pajak.

7.1.1.8 Piutang Retribusi

7.1.1.8.1 Piutang Retribusi

Saldo Piutang Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2018 senilai **Rp5.423.706.000,00** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp5.280.828.648,00**.

Tabel 7.10 Rincian Piutang Retribusi

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Dinas Kesehatan	5.397.816.000,00	5.257.148.500,00
2	Dinas Lingkungan Hidup	-	7.054.700,00
3	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	16.625.448,00
4	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.890.000,00	-
	JUMLAH	5.423.706.000,00	5.280.828.648,00

Piutang Retribusi senilai **Rp5.397.816.000,00** pada Dinas Kesehatan merupakan pendapatan atas jasa pelayanan kesehatan yang belum diterima pembayarannya berupa klaim Dana Non Kapitasi pada BPJS senilai **Rp5.397.816.000,00** dan Indocemen senilai **Rp2.000.000,00**.

Klaim Dana Non Kapitasi pada BPJS senilai **Rp5.395.816.000,00** terdiri dari **Rp1.055.765.000,00** merupakan angka klaim bulan Agustus dan kekurangan bulan sebelumnya yang telah terverifikasi oleh pihak BPJS, sedangkan senilai **Rp4.340.051.000,00** merupakan angka tagihan bulan September, Oktober, November, dan Desember 2018 yang belum diverifikasi oleh pihak BPJS.

Piutang Retribusi senilai **Rp25.890.000,00** pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian merupakan pendapatan retribusi pelayanan pasar bulan Desember yang baru diterima di Tahun 2019 pada Pasar Batik Weru.

7.1.1.8.2 Penyisihan Piutang Retribusi

Penyisihan Piutang Retribusi pada tahun 2018 adalah senilai **(Rp27.118.530,00)** dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 7.11 Perhitungan Penyisihan Piutang Retribusi

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	PENYISIHAN PIUTANG 0,5% x PIUTANG
1	Dinas Kesehatan	5.397.816.000,00	(26.989.080,00)
2	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	25.890.000,00	(129.450,00)
	JUMLAH	5.423.706.000,00	(27.118.530,00)

7.1.1.8.3 Piutang Retribusi Netto

Piutang Retribusi Netto pada tahun 2018 senilai **Rp5.396.587.470,00** merupakan selisih dari Piutang Retribusi dengan Penyisihan Piutang Retribusi.

7.1.1.9 Piutang BLUD

7.1.1.9.1 Piutang BLUD

Saldo Piutang BLUD per 31 Desember 2018 senilai **Rp66.702.865.278,00** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp51.372.941.925,00**. Saldo Piutang BLUD merupakan Piutang Jamkesda dan Piutang JKN yang terdapat di RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.12 Rincian Piutang BLUD

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
A	RSUD Arjawinangun		
1	Piutang JKN	29.222.514.600,00	20.776.233.262,00
2	Jamkesda	1.353.184.100,00	1.229.071.600,00
3	Piutang Pihak ketiga	141.703.635,00	149.920,00
	JUMLAH (A)	30.717.402.335,00	22.005.454.782,00
B	RSUD Waled		
1	Piutang JKN	36.688.135.651,00	30.244.766.821,00
2	Jamkesda	573.950.800,00	507.031.400,00
3	Piutang Pihak ketiga	650.511.392,00	351.791.522,00
	JUMLAH (B)	37.912.597.843,00	31.103.589.743,00
	JUMLAH A+B	68.630.000.178,00	53.109.044.525,00
	Jamkesda Dinas Kesehatan	(1.927.134.900,00)	(1.736.102.600,00)
	TOTAL	66.702.865.278,00	51.372.941.925,00

Piutang Jamkesda senilai **Rp1.927.134.900,00** merupakan tagihan RSUD kepada Dinas Kesehatan, pada laporan keuangan konsolidasi tidak disajikan dengan mengeliminasi utang belanja jasa Dinas Kesehatan dengan nilai yang sama.

7.1.1.9.2 Penyisihan Piutang BLUD

Penyisihan Piutang BLUD pada tahun 2018 adalah senilai **(Rp343.150.000,91)** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.13 Perhitungan Penyisihan Piutang BLUD

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	PENYISIHAN PIUTANG
1	RSUD Arjawinangun	29.364.218.235,00	(153.587.011,69)
2	RSUD Waled	37.338.647.043,00	(189.562.989,22)
	JUMLAH	66.702.865.278,00	(343.150.000,91)

7.1.1.9.3 Piutang BLUD Netto

Piutang BLUD Netto pada tahun 2018 adalah senilai **Rp66.359.715.277,09** yang diperoleh dari selisih antara Piutang BLUD dengan Penyisihan Piutang BLUD.

7.1.1.10 Piutang Transfer

7.1.1.10.1 Piutang Pendapatan Transfer

Piutang Transfer pada tahun 2018 senilai **Rp27.961.010.349,00**. Piutang Transfer tahun 2017 senilai **Rp21.384.287.967,00**. Piutang Transfer merupakan pengakuan kurang bayar pendapatan transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Pengakuan nilai piutang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 103/PMK.07/2018 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Menurut Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota pada Tahun 2018 serta tata cara penyelesaiannya. Mutasi Piutang Transfer sebagai berikut :

**Tabel 7.14 Mutasi Piutang Transfer
Per 31 Desember 2018**

NO	URAIAN	NILAI
1.	Piutang Transfer Pusat	
	Saldo 31 Desember 2017	5.089.582.023,00
	Koreksi (PMK No. 103/PMK.07/2018)	11.390.838.282,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(608.521.113,00)
	Saldo 31 Desember 2018	15.871.899.192,00

NO	URAIAN	NILAI
2.	Piutang Transfer Provinsi	
	Saldo 31 Desember 2017	16.294.705.944,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(16.294.705.944,00)
	Piutang 2018	12.089.111.157,00
	Saldo 31 Desember 2018	12.089.111.157,00
	Total	27.961.010.349,00

Rincian piutang pendapatan transfer tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.15 Piutang Pendapatan Transfer
Per 31 Desember 2018**

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018
1.	TRANSFER PUSAT	
	Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21, 25/29	3.743.475.998,00
	DBH PBB	4.592.988.567,00
	DBH SDA Mineral dan Batubara	97.449.390,00
	DBH SDA Hutan	34.769.832,00
	DBH Perikanan	99.184.671,00
	DBH SDA Minyak Bumi dan Gas	1.624.371.910,00
	DBH SDA Panas Bumi	5.675.012.298,00
	DBH CHT	4.646.526,00
	JUMLAH	15.871.899.192,00
2.	TRANSFER PROVINSI	
	Dana Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	3.847.368.810,00
	Dana Bagi Hasil Pajak BBNKB	2.414.691.900,00
	Dana Bagi Hasil Pajak PBBKB	5.666.246.246,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Pemanfaatan Air Permukaan	18.079.525,00
	Dana Bagi Hasil Pajak Rokok	142.724.676,00
	JUMLAH	12.089.111.157,00

7.1.1.10.2 Penyisihan Piutang Transfer

Penyisihan Piutang Pendapatan Transfer tahun 2018 senilai (Rp139.805.051,75).

Tabel 7.16 Perhitungan Penyisihan Piutang Transfer

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	PENYISIHAN PIUTANG 0,5% x PIUTANG
1	Penyisihan Piutang Transfer	27.961.010.349,00	(139.805.051,75)
	JUMLAH	27.961.010.349,00	(139.805.051,75)

7.1.1.10.3 Piutang Transfer Netto

Piutang Transfer Netto pada tahun 2018 senilai **Rp27.821.205.297,25** yang diperoleh dari selisih antara Piutang Transfer dengan Penyisihan Piutang Transfer.

7.1.1.11 Piutang Pendapatan Lainnya

7.1.1.11.1 Piutang Pendapatan Lainnya

Piutang Pendapatan Lainnya pada tahun 2018 senilai **Rp583.359.890,00**. Piutang Pendapatan Lainnya tahun 2017 senilai **Rp835.883.593,00**. Mutasi piutang pendapatan lainnya adalah sebagai berikut :

Tabel 7.17 Mutasi Piutang Transfer
Per 31 Desember 2018

NO	URAIAN	NILAI
1.	Piutang LUEP	
	Saldo 31 Desember 2017	423.500.000,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	-
	Saldo 31 Desember 2018	423.500.000,00
2.	Piutang PD BPR	
	Saldo 31 Desember 2017	146.923.050,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	-
	Saldo 31 Desember 2018	146.923.050,00
3.	Piutang PT TASPEN	
	Saldo 31 Desember 2017	10.940.300,00
	Koreksi nilai	(846.000,00)
	Piutang 2018	8.721.240,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(5.878.700,00)
	Saldo 31 Desember 2018	12.936.840,00
4.	Kelebihan Bayar	
	Saldo 31 Desember 2017	185.388.500,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(185.388.500,00)
	Saldo 31 Desember 2018	-
5.	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan & Jasa Giro	
	Saldo 31 Desember 2017	69.131.743,00
	Penerimaan Pembayaran Piutang	(69.131.743,00)
	Saldo 31 Desember 2018	-

Rincian piutang pendapatan lainnya tahun 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 7.18 Piutang Pendapatan Lainnya
Per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017**

NO	URAIAN	Piutang 2018	Piutang 2017 Audited
1	LUEP	423.500.000,00	423.500.000,00
2	PD BPR	146.923.050,00	146.923.050,00
3	PT TASPEN	12.936.840,00	10.940.300,00
4	Kelebihan Bayar	-	185.388.500,00
5	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan & Jasa Giro	-	69.131.743,00
	JUMLAH	583.359.890,00	835.883.593,00

Daftar Piutang pemda kepada PT.TASPEN terdapat dalam Lampiran 7.3.

7.1.1.11.2 Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya tahun 2018 senilai **(Rp570.487.734,20)**.

Tabel 7.19 Perhitungan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	PENYISIHAN PIUTANG
1	LUEP	423.500.000,00	(423.500.000,00)
2	PD BPR	146.923.050,00	(146.923.050,00)
3	PT TASPEN	12.936.840,00	(64.684,20)
	JUMLAH	583.359.890,00	(570.487.734,20)

7.1.1.11.3 Piutang Pendapatan Lainnya Netto

Piutang Pendapatan Lainnya Netto pada tahun 2018 senilai **Rp12.872.155,80** yang diperoleh dari selisih antara Piutang Pendapatan Lainnya dengan Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya.

7.1.1.12. Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran

Saldo Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.226.276.943,00** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp1.226.276.943,00**. Tidak terdapat mutasi atas tagihan lancar penjualan angsuran di tahun 2018. Rincian piutang bagian lancar penjualan sebagai berikut:

Tabel 7.20 Rincian Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tanah	993.583.943,00	993.583.943,00
2	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan	232.693.000,00	232.693.000,00
	JUMLAH	1.226.276.943,00	1.226.276.943,00

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Tanah merupakan piutang yang dibebankan pada pegawai yang mendapatkan kapling tanah yang berlokasi di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon, namun tidak dapat tertagih dikarenakan sebagian para pegawai tersebut mengundurkan diri dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Cirebon yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Bupati Cirebon nomor 030/Kep.427-PLK/2011 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Cirebon Nomor : 030/Kep.606-PLK/2009 tanggal 9 Oktober 2009 tentang Penetapan Pegawai yang mendapat kapling tanah yang berlokasi di Kelurahan Kesenden Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon dengan cara ganti rugi.

7.1.1.13. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.934.456.825,00** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp1.949.884.825,00**. dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 7.21 Perhitungan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

Saldo 2017	1.949.884.825,00
Koreksi	800,00
Tuntutan Ganti Rugi 2018	198.969.470,00
Tuntutan Ganti Rugi 2018	
SKTJM No.951/24-SKTJM/2016	3.069.470,00
SKTJM No.951/SKTJM152.1-BKAD/2018	7.900.000,00
SKTJM No.951/SKTJM324.1-BKAD/2018	79.000.000,00
SKTJM No.951/SKTJM321.1-BKAD/2018	109.000.000,00
Penerimaan 2018	214.398.270,00
Saldo Akhir 2018	1.934.456.825,00

Rincian perkembangan penyelesaian kerugian daerah terdapat dalam Lampiran 7.4.

Penerimaan pembayaran Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi senilai **Rp214.398.270,00** terdiri atas penerimaan kas daerah senilai **Rp193.798.270,00** dan penggantian barang senilai **Rp20.600.000,00**

7.1.1.14. Biaya Dibayar Dimuka

Saldo Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.250.825.047,46** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp948.562.997,65** merupakan penyesuaian atas belanja jasa dan sewa yang belum jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2018. Rincian saldo Biaya Dibayar Dimuka per SKPD disajikan dalam lampiran 7.5.

7.1.1.15. Persediaan

Hasil stock opname Bendahara Barang SKPD dengan metode periodik sesuai Peraturan Bupati Cirebon Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, maka didapat saldo Persediaan per 31 Desember 2018 senilai **Rp64.483.285.628,14** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp48.713.314.962,59**. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran, penilaian dan metode pencatatan persediaan menggunakan metode periodik. Rincian Persediaan pada SKPD beserta jenis persediaannya diungkapkan dalam lampiran 7.6.

7.1.2 Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2018 senilai **Rp134.348.523.709,59** merupakan investasi yang dimiliki sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari Investasi Non Permanen senilai **Rp14.075.000.000,00** dengan nilai bersih **Rp6.699.456.404,00** dan Investasi Permanen senilai **Rp124.340.718.231,77**.

7.1.2.1 Investasi Non Permanen

Investasi Non Permanen per 31 Desember 2018 senilai **Rp6.699.456.404,00** yang merupakan nilai bersih dari dana bergulir dikurangi dengan dana bergulir yang diragukan tertagih dengan perhitungan sebagai berikut :

Tabel 7.22 Rincian Investasi Non Permanen
Per 31 Desember 2018

NO	SEKTOR	DANA AWAL	DIRAGUKAN TERTAGIH	NILAI BERSIH DAPAT DIREALISASIKAN
1	2	3	4	5 = (3 – 4)
Rekapitulasi Nilai Bersih Dana Bergulir				
I	Kredit Program Bantuan /KPB (Bagian Perekonomian Setda)			
1	Peternakan	2.001.000.000,00	1.267.776.305,00	733.223.695,00
2	Perkebunan	900.000.000,00	217.105.000,00	682.895.000,00
3	Pertanian	1.599.000.000,00	556.516.667,00	1.042.483.333,00
4	Perikanan	1.000.000.000,00	426.994.386,00	573.005.614,00
5	Koperasi	1.500.000.000,00	543.268.083,00	956.731.917,00
6	Indag	2.450.000.000,00	848.728.133,00	1.601.271.867,00
JUMLAH		9.450.000.000,00	3.860.388.574,00	5.589.611.426,00
II	Dana kredit modal bantuan lunak pemberdayaan perekonomian masyarakat (Disperindag)			
1	Industri & Perdagangan	2.000.000.000,00	1.598.451.502,00	401.548.498,00
JUMLAH		2.000.000.000,00	1.598.451.502,00	401.548.498,00
III	Dana kredit modal bantuan usaha kecil dan menengah di sektor koperasi & UKM (Dinas Koperasi & UKM)			
1	Koperasi/UKM	1.500.000.000,00	1.171.390.314,00	328.609.686,00
JUMLAH		1.500.000.000,00	1.171.390.314,00	328.609.686,00

**Tabel 7.22 Rincian Investasi Non Permanen
Per 31 Desember 2018**

NO	SEKTOR	DANA AWAL	DIRAGUKAN TERTAGIH	NILAI BERSIH DAPAT DIREALISASIKAN
1	2	3	4	5 = (3 – 4)
IV	Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Setda)			
1	Industri & Perdagangan	1.067.400.000,00	714.312.206,00	353.087.794
2	Peternakan	45.100.000,00	25.175.000,00	19.925.000
3	Perikanan	12.500.000,00	5.826.000,00	6.674.000
JUMLAH		1.125.000.000,00	745.313.206,00	379.686.794,00
JUMLAH KESELURUHAN		14.075.000.000,00	7.375.543.596,00	6.699.456.404,00

Perhitungan nilai bersih dari dana bergulir sebagai berikut:

- Dana Bergulir Awal **Rp14.075.000.000,00**
- Dana Bergulir Diragukan Tertagih **(Rp7.375.543.596,00)**
- Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan **Rp6.699.456.404,00**

7.1.2.1.1. Dana Bergulir

Dana bergulir per 31 Desember 2018 senilai **Rp14.075.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.23 Rincian Dana Bergulir

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Kredit Program Bantuan /KPB (Bagian Perekonomian Setda)	9.450.000.000,00	9.450.000.000,00
2	Program Dakabalarea (Bagian Perekonomian Setda)	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00
3	Dana Kredit modal bantuan lunak pemberdayaan perekonomian masyarakat (Disperindag)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4	Dana kredit modal bantuan usaha kecil dan menengah di sektor koperasi & UKM (Dinas Koperasi & UKM)	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
JUMLAH		14.075.000.000,00	14.075.000.000,00

Dana bergulir senilai **Rp14.075.000.000,00** merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Cirebon berupa :

- Kredit Program Bantuan (KPB) yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;
- Program Dakabalarea yang dikelola oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah;

- Dana kredit modal bantuan lunak pemberdayaan perekonomian masyarakat yang dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- Dana kredit modal bantuan usaha kecil dan menengah di sektor koperasi & UKM yang dikelola oleh Dinas Koperasi & UKM.

Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir. Dana Bergulir Diragukan Tertagih merupakan jumlah dana bergulir yang tidak dapat tertagih dan dana bergulir yang diragukan tertagih. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

7.1.2.1.2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih sampai dengan 31 Desember 2018 senilai **Rp7.375.543.596,00** tersebut pada umumnya disebabkan oleh :

- Omset usaha yang mengalami penurunan;
- Sebagian penerima dana guliran beralih usaha;
- Penggunaan dana guliran yang tidak sesuai dengan peruntukan proposal awal;
- Sistem tanggung renteng yang tidak berjalan sesuai dengan perjanjian;
- Mengalami kerugian dalam usaha usaha yang kolep/bangkrut;
- Kelompok penerima kredit bubar dan tidak ada yang bertanggungjawab untuk pengembalian dana bergulirnya;
- Adanya pemahaman yang salah dari masyarakat/nasabah tentang dana bergulir, yang beranggapan bahwa dana bergulir bukan merupakan kredit yang harus dikembalikan, akan tetapi merupakan hibah dari pemerintah walaupun sudah diberikan sosialisasi;
- Tidak dapat mengelola usaha dengan baik.

Adapun upaya yang akan dilakukan dalam penanganan dana bergulir/macet sebagai berikut:

- Melakukan monitoring ke nasabah dengan dibuat berita acara kunjungan yang berisi tentang kesanggupan nasabah untuk menyelesaikan dana bergulir (Kredit Macet);
- Memberikan surat teguran ke nasabah;
- Koordinasi dengan pihak BPR.

7.1.2.2 Investasi Permanen

Investasi Permanen per 31 Desember 2018 senilai **Rp127.649.067.305,59**. Saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp118.236.351.403,54** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.24 Daftar Investasi Permanen

NO	REKENING	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	PT Bank Jabar Banten, Tbk.	18.175.151.700,00	13.402.270.000,00
2	PD BPR	88.587.215.462,96	80.490.203.808,32
3	PDAM Kabupaten Cirebon	20.886.700.142,63	24.343.877.595,22
JUMLAH		127.649.067.305,59	118.236.351.403,54

7.1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah

Penyertaan Modal Pemerintah per 31 Desember 2018 senilai **Rp120.118.156.977,00**. Saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp115.265.275.277,00**.

Tabel 7.25 Mutasi Investasi Permanen
Per 31 Desember 2018

NO	URAIAN	NILAI
	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH	
1	PT BANK JABAR BANTEN, TBK	
	Saldo 31 Desember 2017	13.402.270.000,00
	Penambahan Tahun 2018	4.772.881.700,00
	Saldo 31 Desember 2018	18.175.151.700,00
2	PD BPR	
	Saldo 31 Desember 2017	37.389.674.000,00
	Koreksi Saldo tahun 2017:	80.000.000,00
	1. PD BPR GEGESIK	40.000.000,00
	2. PD BPR CIREBON SELATAN	40.000.000,00
	Saldo 31 Desember 2018	37.469.674.000,00

NO	URAIAN	NILAI
3	PDAM	
	Saldo 31 Desember 2017	64.473.331.277,00
	Saldo 31 Desember 2018	64.473.331.277,00
	JUMLAH	120.118.156.977,00

Saldo penyertaan modal mengalami perubahan berupa penambahan penyertaan modal pada PT.BANK JABAR BANTEN, TBK. Senilai **Rp4.772.881.700,00** berdasarkan SP2D Nomor 900/0002-LS-PEMB/2018 tanggal 21 Desember 2018 dan pada PD. BPR berupa koreksi saldo penerimaan penyertaan modal senilai **Rp80.000.000,00** berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon nomor : 584.3/Kep.1060-Perek/2017 tentang Alokasi Penambahan Modal Disetor untuk Pemenuhan Modal Dasar kepada PD.BPR Kabupaten Cirebon Dari Dana APBD Tahun Anggaran 2017.

Metode penilaian investasi yang digunakan adalah metode biaya (*cost methode*), karena persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon di PT Bank Jabar Banten, Tbk. kurang dari 20%.

Saldo penyertaan modal pada PD BPR pada Tahun 2018 dan Tahun 2017 disajikan berdasarkan metode ekuitas yang dihitung dari total ekuitas masing-masing PD BPR dan dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah Kabupaten Cirebon pada PD BPR yang bersangkutan. Pada tahun 2018 nilai ekuitas PD BPR secara keseluruhan mengalami kenaikan sehingga nilai investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon mengalami kenaikan senilai **Rp8.097.011.654,64** atau sebesar **6,85%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Saldo penyertaan modal pada PDAM Tahun 2018 dan Tahun 2017 disajikan berdasarkan metode ekuitas. Saldo penyertaan modal di PDAM Kabupaten Cirebon sampai dengan Tahun 2018 senilai **Rp20.886.700.142,63**. Nilai tersebut mengalami penurunan senilai **Rp3.457.177.452,59** atau sebesar **14,20%** dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Perhitungan nilai penyertaan modal pemerintah dan Laporan Keuangan PDAM dan PD. BPR disajikan dalam lampiran 7.7.

7.1.3 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2018 senilai **Rp3.383.925.041.979,72** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp3.135.675.125.742,27** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.26 Rincian Aset Tetap

NO	REKENING	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017 AUDITED
1	Tanah	481.622.553.941,50	515.203.986.320,50
2	Peralatan dan Mesin	819.075.004.802,42	718.543.751.035,97
3	Gedung dan Bangunan	1.618.863.081.296,30	1.511.688.600.428,64
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.980.555.642.669,58	1.707.915.743.658,58
5	Aset Tetap Lainnya	325.011.219.479,09	299.666.811.693,70
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.233.829.916,36	133.178.167.701,71
7	Akumulasi Penyusutan	(2.002.436.290.125,53)	(1.750.521.935.096,83)
JUMLAH		3.383.925.041.979,72	3.135.675.125.742,27

Penambahan dan pengurangan aset tetap dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7.27 Penambahan dan Pengurangan Barang Milik Daerah (BMD)

REKENING	SALDO AWAL 2017	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR 2018
Tanah	515.203.986.320,50	117.134.440.171,00	(150.715.872.550,00)	481.622.553.941,50
Peralatan dan Mesin	718.543.751.035,97	109.777.704.010,02	(9.246.450.243,57)	819.075.004.802,42
Gedung dan Bangunan	1.511.688.600.428,64	116.715.444.251,47	(9.540.963.383,81)	1.618.863.081.296,30
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.707.915.743.658,58	274.456.836.231,00	(1.816.937.220,00)	1.980.555.642.669,58
Aset Tetap Lainnya	299.666.811.693,70	25.344.407.849,55	(64,16)	325.011.219.479,09
Konstruksi Dalam Pengerjaan	133.178.167.701,71	43.871.660.768,65	(15.815.998.554,00)	161.233.829.916,36
Jumlah Aset Tetap	4.886.197.060.839,10	687.300.493.281,69	(187.136.222.015,54)	5.386.361.332.105,25
Aset Tidak Berwujud	25.408.464.619,69	4.651.247.425,00	(98.400.000,00)	29.961.312.044,69
Aset Rusak Berat	30.678.235.938,37	67.528.800,00	(9.357.666.306,98)	21.388.098.431,39
Aset Lain-Lain	27.401.708.000,52	279.525.360,00	(7.756.143.644,20)	19.925.089.716,32
Jumlah Aset Lainnya	83.488.408.558,58	4.998.301.585,00	(17.212.209.951,18)	71.274.500.192,40
Non Kapitalisasi	115.349.679.252,50	7.217.812.875,06	(388.703.304,65)	122.178.788.822,91
Total BMD	5.085.035.148.650,18	699.516.607.741,75	(204.737.135.271,37)	5.579.814.621.120,56

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Barang Milik Daerah (BMD) per SKPD dapat dilihat pada lampiran 7.8.

Penjelasan mutasi masing-masing Aset Tetap adalah sebagai berikut:

7.1.3.1 Tanah

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2018 senilai **Rp481.622.553.941,50** diperoleh dari Aset Tetap Tanah sampai dengan Desember 2017 senilai **Rp515.203.986.320,50** dan Pengadaan, Hibah, Transfer dan Koreksi selama tahun 2017 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 7.28 Rincian Mutasi Aset Tetap tanah

No	KETERANGAN	JUMLAH (RP)
	Saldo Per 31 Desember 2017	515.203.986.320,50
	Mutasi :	
1	Pembelian Tahun 2018	10.280.941.321,00
2	Hibah Masuk	7.578.905.300,00
3	Hibah Keluar	(51.441.279.000,00)
4	Transfer Masuk	99.274.593.550,00
5	Transfer Keluar	(99.274.593.550,00)
JUMLAH KESELURUHAN		481.622.553.941,50

Rincian penambahan dan pengurangan nilai tanah per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 7.9.

a. Pengadaan

Mutasi Aset Tetap Tanah yang berasal dari pengadaan Tahun 2018 senilai **Rp10.280.941.321,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.29 Rincian Pengadaan Aset Tetap Tanah

NO	SKPD	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	3.915.000.000,00	Tanah Sarana Kesehatan Rumah Sakit
		1.654.874.000,00	Tanah Jalan/Pengairan
		2.865.188.000,00	Tanah Sarana Pendidikan Tinggi
2	Dinas Lingkungan Hidup	1.051.345.200,00	Pematangan/Pengurangan lahan untuk Kawasan industri batu alam
3	Dinas Pemadan Kebakaran	794.534.121,00	Pematangan/Pengurangan lahan untuk pembangunan gedung kantor.

b. Hibah Masuk

Terdapat penambahan aset tetap tanah yang berasal dari penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 senilai **Rp 7.578.905.300,00**. Adapun rincian hibah masuk berupa penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas

Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat 7.10.

c. Hibah Keluar

Terdapat koreksi nilai aset tetap tanah pada tahun 2018 berupa koreksi kurang senilai **(Rp51.441.279.000,00)** disebabkan adanya Hibah Tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon Kepada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 590/2533/BKAD dan Nomor 4060/A.A3/PL/2018 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk Penyelenggaraan dan Pengembangan Program Studi di Luar Kampus Utama Institut Teknologi Bandung (PSDKU-ITB) di Kabupaten Cirebon.

Rincian bidang tanah pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada lampiran 7.11.

7.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2018 senilai **Rp819.075.004.802,42** diperoleh dari Aset Tetap peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2017 senilai **Rp718.543.751.035,97** dan Pengadaan, Hibah, Transfer dan Koreksi selama tahun 2018 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 7.30 Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No	KETERANGAN	Jumlah (Rp)
	Saldo Per 31 Desember 2017	718.543.751.035,97
	Mutasi :	
1	Pengadaan	70.777.073.973,41
2	Hibah Masuk	32.766.436.693,60
3	Hibah Keluar	-
4	Transfer masuk	6.190.997.842,61
5	Transfer Keluar	(6.190.997.842,61)
4	Reclass Masuk	30.695.500,00
5	Reclass Keluar	(250.061.521,00)
6	Koreksi Masuk	12.500.000,40
7	Koreksi keluar	(111,35)
8	Penghapusan	(2.805.390.768,61)
	JUMLAH KESELURUHAN	819.075.004.802,42

a. Pengadaan

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang berasal dari Pengadaan tahun 2018 senilai **Rp70.777.073.973,41** diperoleh dari kapitalisasi belanja modal senilai **Rp70.704.976.198,41** ditambah belanja barang jasa terkapital senilai **Rp72.097.775,00**. Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 7.12.

b. Hibah Masuk

Terdapat penambahan aset tetap peralatan mesin yang berasal dari hibah masuk Tahun 2018 sebesar **Rp32.766.436.693,63** dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Pendidikan senilai **Rp10.990.153.088,60** berupa belanja peralatan mesin dari belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai **Rp6.343.974.748,00** dan Blockgrand senilai **Rp4.646.178.340,60**.
- Dinas Kesehatan memperoleh Hibah dari Bank Jabar berupa 2 (dua) unit mobil Ambulance senilai **Rp592.862.600,00**.
- Rumah Sakit Daerah Arjawinangun memperoleh Hibah berupa Alat Kesehatan dari Kementerian Kesehatan senilai **Rp19.940.528.500,00**.
- Dinas Kelautan dan Perikanan memperoleh hibah dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa peralatan kantor dan kendaraan operasional roda 2 (dua) senilai **Rp29.091.000,00**.
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi memperoleh hibah dari kementerian Ketenagakerjaan berupa peralatan latihan kerja senilai **Rp1.213.801.505,00**.

c. Transfer antar Unit

Pada tahun 2018 terjadi pergeseran aset karena mutasi antar unit transfer masuk senilai **Rp6.190.997.842,61** dan transfer keluar senilai **(Rp6.190.997.842,61)**.

d. Reclas

Pengakuan penambahan nilai aset tetap peralatan mesin berupa reclas masuk senilai **Rp30.695.500,00** pada Dinas Kesehatan berupa reclass dari daftar barang Non kapitalisasi ke aset tetap peralatan mesin.

Pengurangan nilai aset dikarenakan reclass keluar senilai **(Rp250.061.521,00)** berupa koreksi pencatatan dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan koreksi pencatatan atas aset tetap peralatan dan mesin senilai **(Rp206.331.456,00)** berupa reclas peralatan mesin ke daftar barang Non Kapitalisasi atas rincian barang

yang memiliki nilai dibawah Batasan nilai kapitalisasi aset tetap dan ke Barang pakai Habis.

- Badan Keuangan dan Aset Daerah terdapat reclass keluar ke Aset Tidak berwujud berupa Software senilai **(Rp5.827.905,00)**.
- Kecamatan Gebang koreksi pencatatan berupa reclass ke aset lain-lain senilai **(Rp17.550.000,00)** atas kendaraan bermotor roda 2 (dua) karena hilang dan sedang di proses tuntutan ganti rugi (TGR).
- Kecamatan Mundu koreksi pencatatan berupa reclass ke aset lain-lain senilai **(Rp14.923.360,00)** atas 2 (dua) unit computer karena hilang dan sedang di proses tuntutan ganti rugi (TGR).
- Kecamatan Pabuaran reclass ke aset rusak berat berupa 1 (satu) unit computer senilai **(Rp5.428.800,00)**.

e. Koreksi Tambah

Adapun mengenai koreksi pencatatan, terdapat koreksi tambah senilai **Rp12.500.252,66** terdapat pada Kecamatan Weru berupa koreksi pencatatan karena penyelesaian tuntutan ganti rugi kendaraan operasional roda 2 (dua) senilai **Rp12.500.000,00** dan koreksi pencatatan pembulatan nilai aset peralatan dan mesin pada beberapa SKPD yaitu Dinas Pendidikan senilai **Rp252,26**, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah senilai **Rp0,01** dan PPKD senilai **Rp0,39**.

f. Koreksi Kurang

Koreksi kurang pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai **(Rp111,01)** karena koreksi pencatatan pembulatan nilai aset peralatan dan mesin pada beberapa SKPD yaitu Dinas Pendidikan senilai **(Rp111)** dan Dinas Kelautan dan perikanan senilai **(Rp0,01)**.

g. Penghapusan

Penghapusan aset tetap peralatan mesin senilai **(Rp2.805.390.768,61)** terdiri dari penghapusan karena penjualan barang milik daerah dan penghapusan karena penyelesaian kerugian daerah. Adapun rincian penghapusan peralatan mesin dapat dilihat pada Lampiran 7.13.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai peralatan mesin per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 7.14.

7.1.3.3 Gedung dan Bangunan

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.618.863.081.296,30** diperoleh dari Aset Tetap Gedung dan

Bangunan sampai dengan 31 Desember 2017 senilai **Rp1.511.688.600.428,64** dan Pengadaan, Hibah, Koreksi dan Penghapusan selama tahun 2018 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 7.31 Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan bangunan

No	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2017		1.511.688.600.428,64
Mutasi :		
1	Pengadaan	92.541.470.303,00
2	Hibah Masuk	11.058.983.023,47
3	Hibah Keluar	-
No	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
4	Transfer masuk	5.836.231.371,00
5	Transfer Keluar	(5.836.231.371,00)
6	Reclas Masuk	7.278.759.554,00
7	Reclas Keluar	(2.721.964.246,00)
8	Koreksi Masuk	-
9	Koreksi Keluar	(16,81)
10	Penghapusan	(982.767.750,00)
JUMLAH KESELURUHAN		1.618.863.081.296,30

a. Pengadaan

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari pengadaan tahun 2018 senilai **Rp92.541.470.303,00** yang terjadi karena pengadaan Belanja Modal yang dikapitalisasi tahun 2018 senilai **Rp91.356.128.995,00** dan penambahan dari belanja barang dan jasa yang terkapitalisasi senilai **Rp1.185.341.308,00**. Rincian per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 7.15.

b. Hibah

Terdapat penambahan aset tetap Gedung dan Bangunan yang berasal dari hibah senilai **Rp11.058.983.023,47** berupa Hibah blockgrand pada Dinas Pendidikan senilai **Rp9.719.983.023,47** dan penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 senilai **Rp1.339.000.000,00** Adapun rincian hibah masuk berupa penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat.

c. Transfer antar Unit

Pada tahun 2018 terjadi pergeseran aset tetap Bangunan Gedung karena mutasi antar unit transfer masuk senilai **Rp5.836.231.371,00** dan transfer keluar senilai **(Rp5.836.231.371,00)**.

d. Reclass

Terdapat penambahan nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan karena reclass masuk senilai **Rp7.278.759.554,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Reclass masuk pada Dinas Kesehatan berupa rehab Gedung dan bangunan dari KIB F (konstruksi dalam pengerjaan) senilai **Rp1.668.759.554,00**.
- Reclass masuk pada PPKD berupa rehab Gedung dan bangunan asrama haji Watubelas dari KIB F (konstruksi dalam pengerjaan) ke KIB C senilai **Rp5.610.000.000,00**.

Pengurangan nilai Aset tetap Gedung dan Bangunan karena reclass keluar Tahun 2018 senilai **(Rp2.721.964.246,00)** antara lain:

- Reclas keluar ke Konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Kesehatan berupa bangunan puskesmas Pabuaran senilai **(Rp985.117.246,00)**.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat reclass keluar dari KIB C ke daftar asset rusak berat yaitu bangunan Gudang arsip senilai **(Rp62.100.000,00)**.
- Dinas Sosial, reclass keluar dari KIB C ke Konstruksi dalam pengerjaan berupa bangunan makam senilai **(Rp694.517.000,00)**.
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdapat reclass dari Bangunan dan Gedung ke Pekerjaan Dalam Konstruksi dikarenakan bangunan belum selesai senilai **(Rp750.105.000,00)**.
- Dinas Kebudayaan Pemuda dan Olahraga reclass dari KIB C ke Persediaan senilai **(Rp230.125.000)** berupa rehab bangunan situs kebudayaan yang akan diserahkan ke kelompok masyarakat.

e. Koreksi

Koreksi masuk pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai **Rp23,46** karena koreksi pencatatan pembulatan nilai aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan.

Koreksi keluar pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan senilai **(Rp16,80)** karena koreksi pencatatan pembulatan nilai aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pendidikan.

f. Penghapusan

Pada Tahun 2018 juga terdapat Mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan karena penghapusan senilai **(Rp982.767.750,00)** terdiri dari :

- Penghapusan Sarana olah raga berupa lapangan tenis pada Rumah Sakit Umum Daerah Waled senilai **(Rp42.000.000,00)**, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 486 – BKAD/2018.
- Penghapusan berupa Gedung dan bangunan kantor pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil senilai **(Rp359.199.750,00)**, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 408 – BKAD/2018.
- Penghapusan berupa Gedung dan bangunan kantor pada Dinas Sosial senilai **(Rp581.568.000,00)**, berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep.307–BKAD/2018.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Gedung dan Bangunan per SKPD dapat dilihat pada Lampiran 7.16.

7.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2018 senilai **Rp1.980.555.642.669,58** diperoleh dari Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2017 senilai **Rp1.707.915.743.658,58** dan Pengadaan, Hibah, Tranfer dan Koreksi selama tahun 2017 dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 7.32 Daftar Mutasi set Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
Saldo Per 31 Desember 2017		1.707.915.743.658,58
Mutasi :		
1	Pengadaan	263.849.402.211,00
2	Hibah Masuk	5.795.457.800,00
3	Hibah Keluar	-
4	Mutasi Masuk	1.816.937.220,00
5	Mutasi Keluar	(1.816.937.220,00)
6	Reclass masuk	2.995.039.000,00
7	Reclass keluar	-
8	Koreksi Tambah	-
9	Koreksi Kurang	-
10	Penghapusan	-
JUMLAH KESELURUHAN		1.980.555.642.669,58

a. Pengadaan

Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan karena pengadaan yang terjadi karena pengadaan pada tahun 2018 senilai **Rp263.849.402.211,00** diperoleh dari Kapitalisasi belanja modal senilai **Rp253.562.979.535,00** ditambah belanja barang dan jasa yang diakui menambah nilai aset senilai **Rp10.286.422.676,00**.

b. Hibah

Terdapat penambahan aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang berasal dari penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 senilai **Rp5.795.457.800,00** Adapun rincian hibah masuk berupa penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dapat dilihat *lampiran PSU*.

c. Mutasi

Terjadi mutasi Aset Tetap jalan, irigasi dan jaringan juga terjadi akibat adanya mutasi antar SKPD. Mutasi masuk senilai **Rp1.816.937.220,00** dan mutasi keluar senilai **(Rp1.816.937.220,00)**.

d. Reclas Masuk

Penambahan aset tetap jalan, irigasi dan jaringan senilai **Rp2.995.039.000,00** pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa pekerjaan jalan yang telah selesai.

Rincian penambahan dan pengurangan nilai Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD dapat dilihat pada lampiran 7.17.

7.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2018 senilai **Rp325.011.219.479,09**. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2017 senilai **Rp299.666.811.693,70** dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 7.33 Rincian Mutasi Aset Tetap lainnya

No	KETERANGAN	Jumlah (Rp)
	Saldo Per 31 Desember 2017	299.666.811.693,70
	Mutasi :	
1	Pengadaan	394.589.915,00
2	Hibah Masuk	24.949.817.827,00
3	Koreksi Masuk	107,55
4	Koreksi Keluar	(64,16)
5	Penghapusan	-
	JUMLAH	325.011.219.479,09

a. Pengadaan

Mutasi Aset Tetap Lainnya yang terjadi karena pengadaan tahun 2018 senilai **Rp394.589.915,00,00**.

b. Hibah

Terdapat penambahan aset tetap lainnya yang berasal dari hibah masuk Tahun 2018 pada Dinas Pendidikan sebesar **Rp24.949.817.827,00** berupa belanja aset tetap lainnya dari belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) senilai Rp24.943.425.827,00 dan hibah blockgrand senilai Rp6.392.000,00

c. Koreksi

Koreksi masuk pada Aset Tetap lainnya senilai **Rp107,55** karena koreksi pencatatan pembulatan nilai aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan.

Koreksi keluar pada Aset Tetap lainnya senilai **(Rp64,16)** karena koreksi pencatatan pembulatan nilai aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan.

7.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2018 senilai **Rp161.233.829.916,36** diperoleh dari Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2017 senilai **Rp133.178.167.701,71** dan Pengadaan dan Koreksi yang terjadi selama tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.34 Daftar Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

No	KETERANGAN	JUMLAH (Rp)
	Saldo Per 31 Desember 2017	133.178.167.701,71
	Mutasi :	
1	Pengadaan	35.602.731.181,00
2	Mutasi masuk	5.610.000.000,00
3	Mutasi keluar	(5.610.000.000,00)
2	Reclass masuk	2.658.929.587,65
3	Reclass keluar	(10.205.998.554,00)
	JUMLAH KESELURUHAN	161.233.829.916,36

Penjelasan Kontruksi Dalam Pengerjaan terdapat dalam Lampiran 7.18.

a. Pengadaan

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang diakibatkan adanya pengadaan tahun 2018 senilai

Rp35.602.731.181,00 merupakan pekerjaan pembangunan Gedung dan bangunan yang belum selesai pengerjaannya sampai dengan akhir periode 31 Desember 2018 dengan rincian sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran 7.18.

b. Mutasi

Mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan yang terjadi antar Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan dan PPKD berupa pekerjaan pembangunan asrama haji watubelah senilai **RP5.610.000.000,00**.

c. Reclas

Terdapat mutasi reclass masuk senilai **Rp2.658.929.587,65** yaitu reclass masuk dari KIB C dengan rincian sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan berupa pekerjaan pembangunan puskesmas Pabuaran senilai **Rp954.298.000,00**;
- Pekerjaan pembangunan Taman Makam Pahlawan pada Dinas Sosial senilai **Rp954.526.587,65**;
- Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupa pekerjaan pembangunan Gedung kantor yang belum selesai senilai **Rp750.105.000,00**.

Reclas keluar ke KIB C (bangunan gedung) karena pelaksanaan pekerjaan yang telah selesai senilai **(Rp10.205.998.554,00)** dengan rincian sebagai berikut:

- Dinas Kesehatan berupa pembangunan gedung kantor yang telah selesai senilai **Rp1.600.959.554,00**;
- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berupa pekerjaan pembangunan jalan yang telah selesai senilai **Rp2.995.039.000,00**;
- PPKD berupa Renovasi asrama haji watubelah yang telah selesai senilai **Rp5.610.000.000,00**.

7.1.3.7 Akumulasi Penyusutan

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2018 senilai **(Rp2.002.436.290.125,53)** dan akumulasi penyusutan per 31 Desember 2017 adalah senilai **(Rp1.750.521.935.096,81)**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Metode Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

Tabel 7.35 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Tahun 2018
1	Tanah	481.622.553.941,50	-	481.622.553.941,50
2	Peralatan dan Mesin	819.075.004.802,42	599.775.483.931,69	219.299.520.870,73
3	Gedung dan Bangunan	1.618.863.081.296,30	364.173.906.364,27	1.254.689.174.932,03
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.980.555.642.669,58	1.038.486.899.829,57	942.068.742.840,01
5	Aset Tetap Lainnya	325.011.219.479,09	-	325.011.219.479,09
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	161.233.829.916,36	-	161.233.829.916,36
	Jumlah Akumulasi Penyusutan	5.386.361.332.105,25	2.002.436.290.125,53	3.383.925.041.979,72

7.1.4 Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 senilai **Rp0,00** dan **Rp55.323.166,00**. Pada Tahun 2018 terdapat penambahan nilai dana cadangan **Rp846.127,00** sehingga total pencairan dana cadangan di tahun 2018 sebesar **Rp56.169.293,00**.

7.1.5 Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2018 senilai **Rp28.835.555.853,71** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp34.012.530.969,47** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 7.36 Rincian Aset Tetap Lainnya

NO	REKENING	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Aset Tak Berwujud	29.961.312.044,69	25.408.464.619,69
2	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(19.086.544.246,49)	(14.403.827.454,89)
3	Aset Lain-lain	41.917.276.483,48	52.248.052.740,58
4	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain...	(23.956.488.427,97)	(29.240.158.935,91)
JUMLAH		28.314.829.278,12	34.012.530.969,47

Penjelasan secara rincian atas masing-masing Aset Lainnya tersebut diuraikan sebagai berikut:

7.1.5.1 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2018 senilai **Rp10.874.767.798,20** Saldo Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 senilai **Rp11.004.637.164,80** dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 7.37 Rincian Mutasi Aset Tidak Berwujud

No	KETERANGAN	JUMLAH (RP)
1	Saldo 2017	25.408.464.619,69
2	Pembelian	4.302.479.520,00
3	Hibah	244.540.000,00
4	Transfer Masuk	98.400.000,00
5	Transfer Keluar	(98.400.000,00)
6	Reclass Masuk	5.827.905,00
	JUMLAH KESELURUHAN	29.961.312.044,69

a. Pengadaan

Pengadaan Aset Tak Berwujud tahun 2018 senilai **Rp4.302.479.520,00**. Dengan rincian sebagaimana terlampir Lampiran 7.19.

b. Hibah

Hibah senilai **Rp244.540.000,00** merupakan hibah Blockgrand pada Dinas Pendidikan.

c. Transfer

Transfer antar SKPD terjadi berupa mutasi jaringan internet (LAN) antara DPMPTSP dan Dinas Damkar senilai **Rp98.400.000,00**.

d. Reclass

Reclass masuk terjadi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa software senilai **Rp5.827.905,00**.

7.1.5.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2018 senilai **(Rp19.086.544.246,49)** Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2017 senilai **(Rp14.403.827.454,89)**. Metode Amortisasi Aset tak berwujud dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus.

7.1.5.3 Aset Lain-lain

Saldo asset lain-lain per 31 Desember 2018 senilai **Rp20.529.178.052,28**. nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2017 senilai **Rp 19.925.089.716,32**.

Penambahan pada aset lain-lain terdapat pada dinas tenaga kerja dan transmigrasi berupa renovasi Gedung kantor senilai **Rp247.052.000**. terdapat reclass masuk pada kecamatan Gebang berupa kendaraan operasional dinas roda 2 karena kehilangan dan sedang diproses tuntutan ganti rugi senilai **Rp17.550.000**. Pada kecamatan Mundu berupa 2 unit computer karena kehilangan dan sedang diproses tuntutan ganti rugi senilai **Rp14.923.360**.

Pengurangan asset lain-lain terdapat pada Dinas Pendidikan berupa penghapusan aset rusak berat yang penjualannya telah dilakukan pada tahun 2017 senilai **Rp7.637.568.644,20** berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep.248 - BKAD 2018. Pada Dinas Kesehatan berupa penghapusan aset rusak berat yang penjualannya telah dilakukan pada tahun 2017 senilai **Rp101.700.000,00** berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep.248 - BKAD 2018. Dan Kecamatan Weru berupa penghapusan karena penyelesaian tuntutan ganti rugi kendaraan operasional dinas roda 2 senilai **Rp16.875.000,00** berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 029/Kep. 559 - BKAD/2018.

7.1.5.4 Aset Rusak Berat

Saldo Aset Rusak Berat per 31 Desember 2018 senilai **Rp21.388.098.431,39**. Nilai Aset Rusak Berat per 31 Desember 2017 senilai **Rp30.678.235.938,37**.

Penambahan Aset Rusak Berat karena reclass masuk berupa usulan perubahan kondisi peralatan dan mesin pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai **Rp62.100.000,00** dan Kecamatan Pabuaran senilai **Rp5.428.000,00**.

Pengurangan asset rusak berat karena reclass keluar menjadi kondisi baik setelah di renovasi pada Dinas Kesehatan berupa Gedung bangunan senilai **Rp16.800.000,00**. Dan penghapusan Aset rusak Berat senilai **(Rp9.340.866.306,98)** dengan rincian sebagaimana terlampir 7.20.

7.2 Kewajiban

7.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2018 senilai **Rp75.157.759.526,12** dan saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp57.373.714.300,95**.

7.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Saldo Utang Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2018 senilai **Rp0,00** dan saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp841.100,00**.

7.2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pemerintah Kabupaten Cirebon per 31 Desember 2018 senilai **Rp2.873.536.769,83** dan saldo per 31 Desember 2017 senilai **Rp2.853.957.256,91**.

7.2.1.3 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2018 senilai **Rp72.284.222.556,29** dan per 31 Desember 2017 senilai **Rp55.105.113.105,11** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 7.38 Utang Jangka Pendek Lainnya

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018
1	Utang Belanja Pegawai	33.124.570.907,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	39.972.971.246,29
3	Utang Belanja Modal	772.942.662,00
4	Utang Kelebihan Transfer Pusat	340.872.641
5	Jamkesda Dinas Kesehatan	(1.927.134.900,00)
	JUMLAH	72.284.222.556,29

Utang belanja pegawai berada pada:

- Dinas Kesehatan yang merupakan utang jasa pelayanan Jamkesda per 31 Desember 2018 kepada RSUD Arjawinangun dan RSUD Waled;
- RSUD merupakan utang jasa pelayanan Kesehatan;
- Rincian Utang Jangka Pendek lainnya per 31 Desember 2018 pada tiap-tiap SKPD disajikan dalam Lampiran 7.13.

Utang belanja barang dan jasa merupakan kewajiban untuk membayar tagihan atas pemakaian listrik, telepon, air dan internet per 31 Desember 2018 pada tiap-tiap SKPD disajikan dalam Lampiran 7.21

Utang belanja modal merupakan kewajiban atas pengadaan aset peralatan dan mesin senilai **Rp71.336.000,00** pada RSUD dan **Rp204.636.662,00** pada RSUD Arjawinangun, serta kewajiban atas pengadaan aset gedung dan bangunan senilai **Rp496.970.000,00** pada RSUD Arjawinangun.

Utang Kelebihan Pembayaran Transfer merupakan pengakuan lebih bayar pendapatan transfer atas pendapatan bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam. Pengakuan nilai utang didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.07/2017 Tahun 2017. yang terkoreksi oleh Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 103/PMK.07/2018 sehingga utang kelebihan transfer pusat menjadi senilai **Rp340.872.641**. Mutasi Utang Kelebihan Pembayaran Transfer sebagai berikut :

**Tabel 7.39 Mutasi Utang Kelebihan Transfer Pusat
Per 31 Desember 2018**

URAIAN	NILAI
Utang Kelebihan Transfer Pusat	
Saldo 31 Desember 2017	1.887.183.115,00
Koreksi (PMK No. 103/PMK.07/2018)	340.872.641,00
Pemotongan Kelebihan bayar Transfer Pusat	-
Saldo 31 Desember 2018	1.546.310.474,00

Utang Jamkesda pada Dinas Kesehatan senilai **(Rp1.927.134.900,00)** merupakan tagihan dari RSUD atas jasa pelayanan. Pada laporan keuangan konsolidasi tidak disajikan, dengan mengeliminasi Piutang pada RSUD dengan nilai yang sama.

7.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Tidak terdapat Kewajiban Jangka Panjang Pemerintah Kabupaten Cirebon.

7.3 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2018 senilai **Rp3.973.855.987.690,75** dan saldo ekuitas per 31 Desember 2017 senilai **Rp3.703.956.277.909,44**.

BAB VIII

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN OPERASIONAL

8.1. Pendapatan

Pada tahun 2018 dan 2017 Pendapatan Daerah direalisasikan masing-masing senilai **Rp3.406.922.115.997,22** dan **Rp3.268.833.378.587,57**. Realisasi Pendapatan Daerah yang diakui sebagai Pendapatan Daerah tahun 2018 pada Laporan Operasional sebagai berikut:

Tabel 8.1 Daftar Rincian Pendapatan Daerah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Pendapatan Asli Daerah- LO	608.789.451.395,68	801.047.345.942,82	(192.257.894.547,14)	(24,00)
2	Pendapatan Transfer - LO	2.383.549.396.142,00	2.326.243.397.354,00	57.305.998.788,00	2,46
3	Lain-lain Pendapatan Yang Sah- LO	414.583.268.459,54	141.542.635.290,75	273.040.633.168,79	192,90
	Jumlah	3.406.922.115.997,22	3.268.833.378.587,57	138.088.737.409,65	4,22

Pendapatan Daerah senilai **Rp3.406.922.115.997,22** dihasilkan oleh PPKD dan 16 SKPD di Pemerintah Kabupaten Cirebon yang mempunyai target pendapatan sebagai berikut:

Tabel 8.2 Realisasi Pendapatan Daerah Per SKPD

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Dinas Pendidikan	14.934.903.000,00	216.588.726.778,00	(201.653.823.778,00)	(93,10)
2	Dinas Kesehatan	142.600.182.129,04	139.289.658.851,50	3.310.523.277,54	2,38
3	RSUD Waled	107.277.074.062,00	117.452.807.410,21	(10.175.733.348,21)	(8,66)
4	RSUD Arjawinangun	125.743.892.798,60	96.409.356.854,51	29.334.535.944,09	30,43
5	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	920.479.907,42	1.031.052.256,91	(110.572.349,49)	(10,72)
6	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	-	21.474.650,00	(21.474.650,00)	(100,00)
7	Dinas Pemadam Kebakaran	103.630.000,00	57.580.000,00	46.050.000,00	79,98
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.945.056.505,00	934.597.200,00	1.010.459.305,00	108,12
9	Dinas Lingkungan Hidup	2.104.962.749,50	1.882.519.225,00	222.443.524,50	11,82
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.851.184.480,00	-	4.851.184.480,00	100,00
11	Dinas Perhubungan	2.655.596.666,67	2.776.956.792,68	(121.360.126,01)	(4,37)

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.686.593.125,00	-	1.686.593.125,00	100,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.537.649.597,00	7.233.296.043,00	(695.646.446,00)	(9,62)
14	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga	26.102.000,00	157.624.000,00	(131.522.000,00)	(83,44)
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	148.527.476,00	102.910.000,00	45.617.476,00	44,33
16	Dinas Pertanian	476.289.300,00	410.087.700,00	66.201.600,00	16,14
17	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	1.973.350.256,00	1.971.751.700,00	1.598.556,00	0,08
18	PPKD	2.775.981.926.086,08	2.489.725.708.878,34	286.256.217.207,74	11,50
19	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	216.374.020.298,91	192.787.270.247,42	23.586.750.051,49	12,23
20	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	580.695.560,00	-	580.695.560,00	100,00
	Jumlah	3.406.922.115.997,22	3.268.833.378.587,57	138.088.737.409,65	4,22

8.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2018 dan 2017 masing-masing senilai **Rp608.789.451.395,68** dan **Rp801.047.345.942,82** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.3 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Pendapatan Pajak Daerah- LO	216.374.020.298,91	192.787.270.247,42	23.586.750.051,49	12,23
2	Pendapatan Retribusi Daerah- LO	42.729.884.208,09	42.331.529.737,09	398.354.471,00	0,94
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LO	7.895.373.711,00	7.215.262.367,00	680.111.344,00	9,43
4	Lain-lain PAD yang sah- LO	341.790.173.177,68	558.713.283.591,31	(216.923.110.413,63)	(38,83)
	Jumlah	608.789.451.395,68	801.047.345.942,82	(192.257.894.547,14)	(24,00)

8.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pajak Daerah tahun 2018 dan 2017 masing-masing senilai **Rp216.374.020.298,91** dan **Rp192.787.270.247,42** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.4 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Pajak Hotel	5.493.693.838,00	4.448.769.148,00	1.044.924.690,00	23,49
2	Pajak Restoran – LO	14.884.970.997,00	12.572.591.308,00	2.312.379.689,00	18,39
3	Pajak Hiburan – LO	1.185.983.129,00	960.908.993,00	225.074.136,00	23,42
4	Pajak Reklame – LO	4.093.669.538,91	4.211.926.943,42	(118.257.404,51)	(2,81)

Tabel 8.4 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	70.051.261.883,00	64.986.991.780,00	5.064.270.103,00	7,79
6	Pajak Parkir – LO	899.712.550,00	462.418.345,00	437.294.205,00	94,57
7	Pajak Air Tanah – LO	996.657.049,00	766.693.955,00	229.963.094,00	29,99
8	Pajak Sarang Burung Walet – LO	63.586.000,00	91.576.000,00	(27.990.000,00)	(30,56)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LO	11.375.308.733,00	9.743.667.205,00	1.631.641.528,00	16,75
10	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	48.927.618.157,00	47.822.727.700,00	1.104.890.457,00	2,31
11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LO	58.401.558.424,00	46.718.998.870,00	11.682.559.554,00	25,01
	Jumlah	216.374.020.298,91	192.787.270.247,42	23.586.750.051,49	12,23

1. Pajak Hotel

Realisasi Pajak Hotel tahun 2018 dan 2017 masing-masing senilai **Rp5.493.693.838,00** dan **Rp4.448.769.148,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.5 Realisasi Pajak Hotel

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Hotel - LO	5.266.865.858,00	4.287.987.511,00	978.878.347,00	22,83
2	Losmen/Rumah Penginapan- LO	226.827.980,00	160.781.637,00	66.046.343,00	41,08
	Jumlah	5.493.693.838,00	4.448.769.148,00	1.044.924.690,00	23,49

2. Pajak Restoran

Realisasi Pajak Restoran tahun 2018 dan 2018 senilai **Rp14.884.970.997,00** dan **Rp12.572.591.308,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.6 Realisasi Pajak Restoran

Dalam Daerah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Restoran- LO	6.947.980.100,00	5.282.292.499,00	1.665.687.601,00	31,53
2	Rumah Makan- LO	3.380.862.066,00	3.222.682.645,00	158.179.421,00	4,91
3	Café- LO	444.377.417,00	306.320.687,00	138.056.730,00	45,07
4	Kantin- LO	114.257.243,00	98.311.835,00	15.945.408,00	16,22
5	Jasa Boga/ Katering- LO	3.997.494.171,00	3.662.983.642,00	334.510.529,00	9,13
	Jumlah	14.884.970.997,00	12.572.591.308,00	2.312.379.689,00	18,39

3. Pajak Hiburan

Realisasi Pajak Hiburan tahun 2018 dan 2017 masing-masing senilai **Rp1.185.983.129,00** dan **Rp960.908.993,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.7 Realisasi Pajak Hiburan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana- LO	9.800.000,00	7.000.000,00	2.800.000,00	40,00
2	Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan sejenisnya - LO	446.841.186,00	371.818.595,00	75.022.591,00	20,18
3	Sirkus/Akrobat/Sulap- LO	2.900.000,00	37.352.000,00	(34.452.000,00)	(92,24)
4	Permainan Bilyar, Golf, Bowling- LO	2.250.000,00	2.100.000,00	150.000,00	7,14
5	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan- LO	680.947.870,00	476.472.125,00	204.475.745,00	42,91
6	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) – LO	43.244.073,00	66.166.273,00	(22.922.200,00)	(34,64)
	Jumlah	1.185.983.129,00	960.908.993,00	225.074.136,00	23,42

4. Pajak Reklame

Realisasi Pajak Reklame tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp4.093.669.538,91** dan **Rp4.211.926.943,42** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.8 Realisasi Pajak Reklame

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron – LO	3.423.900.345,58	3.390.343.604,25	33.556.741,33	0,99
2	Pajak Reklame Kain – LO	615.795.860,00	751.795.110,00	(135.999.250,00)	(18,09)
3	Pajak Reklame Berjalan- LO	53.973.333,33	69.788.229,17	(15.814.895,84)	(22,66)
	Jumlah	4.093.669.538,91	4.211.926.943,42	(118.257.404,51)	(2,81)

5. Pajak Penerangan Jalan

Realisasi Pajak Penerangan Jalan tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp70.051.261.883,00** dan **Rp64.986.991.780,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.9 Realisasi Pajak Penerangan Jalan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri – LO	69.796.615.704,00	64.830.207.153,00	4.966.408.551,00	7,66
2	Pajak Penerangan Jalan sumber lain – LO	254.646.179,00	156.784.627,00	97.861.552,00	62,42
	Jumlah	70.051.261.883,00	64.986.991.780,00	5.064.270.103,00	7,79

6. Pajak Parkir

Realisasi Pajak Parkir tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp899.712.550,00** dan **Rp462.418.345,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.10 Realisasi Pajak Parkir

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pajak Parkir- LO	899.712.550,00	462.418.345,00	437.294.205,00	94,57
	Jumlah	899.712.550,00	462.418.345,00	437.294.205,00	94,57

7. Pajak Air Bawah Tanah

Realisasi Pajak Air Bawah Tanah tahun 2018 dan 2018 senilai **Rp996.657.049,00** dan **Rp766.693.955,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.11 Realisasi Pajak Air Bawah Tanah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pajak Air Bawah Tanah- LO	996.657.049,00	766.693.955,00	229.963.094,00	29,99
	Jumlah	996.657.049,00	766.693.955,00	229.963.094,00	29,99

8. Pajak Sarang Burung Walet

Realisasi Pajak Sarang Burung Walet tahun 2018 dan 2018 senilai **Rp635.860.000,00** dan **Rp91.576.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.12 Realisasi Pajak Sarang Burung Walet

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pajak Sarang Burung Walet- LO	63.586.000,00	91.576.000,00	(27.990.000,00)	(30,56)
	Jumlah	63.586.000,00	91.576.000,00	(27.990.000,00)	(30,56)

9. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Realisasi Pajak Bukan Logam dan Batuan tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp11.375.308.733,00** dan **Rp9.743.667.205,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.13 Realisasi PajakPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Batu Kapur- LO	9.027.842.100,00	7.493.114.250,00	1.534.727.850,00	20,48
2	Granit/Andesit – LO	31.902.000,00	38.281.000,00	(6.379.000,00)	(16,66)
3	Pasir dan Kerikil- LO	299.099.065,00	179.299.125,00	119.799.940,00	66,82
4	Tanah Liat- LO	234.569.775,00	277.038.275,00	(42.468.500,00)	(15,33)
5	Tanah Urug- LO	1.781.895.793,00	1.755.934.555,00	25.961.238,00	1,48
	Jumlah	11.375.308.733,00	9.743.667.205,00	1.631.641.528,00	16,75

10. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp48.927.618.157,00** dan **Rp47.822.727.700,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.14 Realisasi Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih/(Kurang)	%
1	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LO	48.927.618.157,00	47.822.727.700,00	1.104.890.457,00	2,31
	Jumlah	48.927.618.157,00	47.822.727.700,00	1.104.890.457,00	2,31

11. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp58.401.558.424,00** dan **Rp46.718.998.870,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.15 Realisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	BPHTB – Pemindahan Hak- LO	-	46.718.998.870,00	(46.718.998.870,00)	(100,00)
2	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan- LO	58.401.558.424,00	-	58.401.558.424,00	100,00
	Jumlah	58.401.558.424,00	46.718.998.870,00	11.682.559.554,00	25,01

8.1.1.2 Retribusi Daerah

Realisasi Retribusi Daerah tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp42.729.884.208,09** dan **Rp42.331.529.737,09** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.16 Realisasi Retribusi Daerah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	25.601.643.000,00	26.022.852.837,50	(421.209.837,50)	(1,62)
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	2.104.927.476,00	1.882.519.225,00	222.408.251,00	11,81
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	308.791.000,00	302.654.000,00	6.137.000,00	2,03
4	Retribusi Pelayanan Pasar - LO	1.926.354.656,00	1.936.183.700,00	(9.829.044,00)	(0,51)
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO	2.195.443.666,67	2.213.380.792,68	(17.937.126,01)	(0,81)
6	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO	103.630.000,00	57.580.000,00	46.050.000,00	79,98
7	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO	121.600.600,00	108.701.000,00	12.899.600,00	11,87
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	791.331.311,42	821.504.238,91	(30.172.927,49)	(3,67)
9	Retribusi Tempat Pelelangan - LO	41.516.476,00	62.760.000,00	(21.243.524,00)	(33,85)
10	Retribusi Terminal - LO	151.362.000,00	260.922.000,00	(109.560.000,00)	(41,99)
11	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	2.252.000,00	142.974.000,00	(140.722.000,00)	(98,42)
12	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	197.794.300,00	148.912.200,00	48.882.100,00	32,83
13	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	23.850.000,00	14.650.000,00	9.200.000,00	62,80
14	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	203.890.000,00	188.042.500,00	15.847.500,00	8,43
15	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	6.517.417.177,00	4.689.082.310,00	1.828.334.867,00	38,99
16	Retribusi Izin Gangguan - LO	-	2.510.153.733,00	(2.510.153.733,00)	(100,00)
17	Retribusi Izin Trayek - LO	19.240.000,00	34.060.000,00	(14.820.000,00)	(43,51)
18	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	992.420,00	934.597.200,00	(933.604.780,00)	(99,89)
19	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing – LO	731.255.000,00	-	731.255.000,00	100,00
20	Retribusi Menara Telekomunikasi.	1.686.593.125,00	-	1.686.593.125,00	100,00
	Jumlah	42.729.884.208,09	42.331.529.737,09	398.354.471,00	0,94

Retribusi Daerah tersebut direalisasikan oleh 13 SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.17 Realisasi Retribusi Daerah Per SKPD

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Dinas Kesehatan	25.601.643.000,00	26.022.852.837,50	(421.209.837,50)	(1,62)
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	791.331.311,42	821.504.238,91	(30.172.927,49)	(3,67)
3	Dinas Pemadam Kebakaran	103.630.000,00	57.580.000,00	46.050.000,00	79,98
4	Dinas Perhubungan	2.655.596.666,67	2.776.956.792,68	(121.360.126,01)	(4,37)
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	731.255.000,00	934.597.200,00	(203.342.200,00)	(21,76)
6	Dinas Lingkungan Hidup	2.104.927.476,00	1.882.519.225,00	222.408.251,00	11,81
7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6.537.649.597,00	7.233.296.043,00	(695.646.446,00)	(9,62)
8	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga	26.102.000,00	157.624.000,00	(131.522.000,00)	(83,44)
9	Dinas Pertanian	476.289.300,00	410.087.700,00	66.201.600,00	16,14
10	Dinas Kelautan Dan Perikanan	41.516.476,00	62.760.000,00	(21.243.524,00)	(33,85)
11	Dinas Perdagangan Dan Perindustrian	1.973.350.256,00	1.971.751.700,00	1.598.556,00	0,08
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.686.593.125,00	-	1.686.593.125,00	100,00
	Jumlah	42.729.884.208,09	42.331.529.737,09	398.354.471,00	0,94

8.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun 2018 dan tahun 2017 senilai **Rp7.895.373.711,00** dan **Rp7.215.262.367,00**

Tabel 8.18 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD – LO	7.895.373.711,00	7.215.262.367,00	680.111.344,00	9,43
	Jumlah	7.895.373.711,00	7.215.262.367,00	680.111.344,00	9,43

8.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp341.790.173.177,68** dan **Rp558.713.283.591,31** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.19 Daftar Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	65.700.000,00	65.000.000,00	700.000,00	1,08
2	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO	207.068.596,00	271.172.668,00	(64.104.072,00)	(23,64)
3	Penerimaan Jasa Giro - LO	7.984.870.646,00	7.342.586.475,00	642.284.171,00	8,75
4	Pendapatan Bunga - LO	16.384.894.850,00	25.710.818.784,00	(9.325.923.934,00)	(36,27)
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	77.569.470,00	9.515.000,00	68.054.470,00	715,23
6	Pendapatan dari Pengembalian - LO	172.326.550,00	347.939.870,00	(175.613.320,00)	(50,47)
7	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah- LO	727.286.696,08	864.532.196,25	(137.245.500,17)	(15,88)
8	Pendapatan BLUD - LO	213.080.438.360,60	213.782.474.565,06	(702.036.204,46)	(0,33)
9	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP Puskesmas	98.319.628.204,00	90.256.429.294,00	8.063.198.910,00	8,93
10	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	4.770.389.805,00	3.490.388.221,00	1.280.001.584,00	36,67
11	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar	-	216.572.426.518,00	(216.572.426.518,00)	(100,00)
	Jumlah	341.790.173.177,68	558.713.283.591,31	(216.923.110.413,63)	(38,83)

1. Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp65.700.000,00** dan **Rp65.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.20 Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin- LO	65.700.000,00	65.000.000,00	700.000,00	1,08
	Jumlah	65.700.000,00	65.000.000,00	700.000,00	1,08

2. Hasil Penjualan Aset Lainnya

Realisasi Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp207.068.596,00** dan **Rp271.172.668,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.21 Realisasi Hasil Penjualan Aset Lainnya

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Hasil Penjualan Aset Lainnya- LO	207.068.596,00	271.172.668,00	(64.104.072,00)	(23,64)
	Jumlah	207.068.596,00	271.172.668,00	(64.104.072,00)	(23,64)

3. Penerimaan Hasil Jasa Giro

Realisasi Penerimaan Hasil Jasa Giro tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp7.984.870.646,00** dan **Rp7.342.586.475,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.22 Realisasi Penerimaan Hasil Jasa Giro

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Jasa Giro Kas Daerah- LO	6.965.055.418,00	6.500.239.526,00	464.815.892,00	7,15
2	Jasa Giro Kas Bendahara- LO	1.019.815.228,00	842.346.949,00	177.468.279,00	21,07
	Jumlah	7.984.870.646,00	7.342.586.475,00	642.284.171,00	8,75

4. Pendapatan Bunga

Realisasi Pendapatan Bunga tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp16.384.894.850,00** dan **Rp25.710.818.784,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.23 Realisasi Pendapatan Bunga Deposito

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pendapatan Bunga Deposito- LO	16.384.894.850,00	25.710.818.784,00	(9.325.923.934,00)	(36,27)
	Jumlah	16.384.894.850,00	25.710.818.784,00	(9.325.923.934,00)	(36,27)

5. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Realisasi Pendapatan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp77.569.470,00** dan **Rp9.515.000,00**.

Tabel 8.24 Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Kerugian Barang	77.569.470,00	9.515.000,00	68.054.470,00	715,23
	Jumlah	77.569.470,00	9.515.000,00	68.054.470,00	715,23

6. Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp172.326.550,00** dan **Rp347.939.870,00**. Merupakan penerimaan dari pengembalian kelebihan pembayaran Gaji dan Tunjangan.

Tabel 8.25 Realisasi Pendapatan dari Pengembalian

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO	172.326.550,00	347.939.870,00	(175.613.320,00)	(50,47)
	Jumlah	172.326.550,00	347.939.870,00	(175.613.320,00)	(50,47)

7. Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp727.286.696,08** dan **Rp839.343.374,58** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.26 Realisasi Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	727.286.696,08	839.343.374,58	(112.056.678,50)	(13,35)
	Jumlah	727.286.696,08	839.343.374,58	(112.056.678,50)	(13,35)

8. Pendapatan BLUD

Realisasi Pendapatan BLUD tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp213.080.438.360,60** dan **Rp213.782.474.565,06**. Realisasi tahun 2018 tersebut merupakan realisasi pendapatan BLUD dari Rumah Sakit Arjawinangun senilai **Rp105.803.364.298,60** dan Rumah Sakit Waled senilai **Rp107.277.074.062,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.27 Realisasi Pendapatan BLUD

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pendapatan BLUD-LO	213.080.438.360,60	213.782.474.565,06	(702.036.204,46)	(0,33)
	Jumlah	213.080.438.360,60	213.782.474.565,06	(702.036.204,46)	(0,33)

9. Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Realisasi Dana Kapitasi JKN tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp98.319.628.204,00** dan **Rp90.256.429.294,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.28 Realisasi Dana Kapitasi JKN pada FKTP

Dalam Rupiah

NO	Uraian-	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	PAD Lain-lain yang sah (Dana Kapitasi JKN)	98.319.628.204,00	90.256.429.294,00	8.063.198.910,00	8,93
	Jumlah	98.319.628.204,00	90.256.429.294,00	8.063.198.910,00	8,93

Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (JKN FKTP) Puskesmas merupakan besaran pembayaran per bulan yang dibayarkan dimuka kepada FKTP oleh BPJS berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.

10. Lain-lain PAD yang sah Lainnya

Realisasi Pendapatan Lain-lain tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp4.770.389.805,00** dan **Rp3.490.388.221,00**.

Tabel 8.29 Realisasi Lain-Lain PAD Yang Sah Lainnya

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO.	1.564.299.338,00	3.490.388.221,00	(1.926.088.883,00)	(55,18)
2	Pendapatan Denda Keterlambatan Pengurusan Administrasi Kependudukan	942.310.000,00	-	942.310.000,00	100,00
3	Pendapatan Pengembalian Kerugian Daerah Atas Pemeriksaan	2.216.697.783,00	-	2.216.697.783,00	100,00
4	Pendapatan Jasa Bunga Selain Pemegang Kas	47.082.684,00	-	47.082.684,00	100,00
	Jumlah	4.770.389.805,00	3.490.388.221,00	1.280.001.584,00	36,67

11. Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar

Realisasi pendapatan lain-lain PAD yang sah lainnya tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp0,00** dan **Rp216.572.426.518,00**.

Tabel 8.30 Realisasi Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar

Dalam Rupiah

NO	Uraian-	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar	-	156.552.448.845,00	(156.552.448.845,00)	(100,00)
2	Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Pertama	-	60.019.977.673,00	(60.019.977.673,00)	(100,00)
	Jumlah	-	216.572.426.518,00	(216.572.426.518,00)	(100,00)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Pendapatan Dana BOS Satuan Pendidikan Negeri Sekolah Dasar yang semula dicatat pada entitas Dinas Pendidikan dialihkan kepada entitas PPKD dengan rekening Hibah Dana BOS Pendidikan Negeri Sekolah Dasar dan Hibah Dana BOS Pendidikan Negeri Sekolah Menengah Pertama.

8.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2018 dan 2017 adalah senilai **Rp2.383.549.396.142,00** dan **Rp2.326.243.397.354,00**. Realisasi Pendapatan Transfer tersebut merupakan transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.31 Realisasi Pendapatan Transfer

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.069.819.407.452,00	2.060.985.115.193,00	8.834.292.259,00	0,43
2	Pendapatan Transfer Pemerintahan Pusat – Lainnya	35.750.000.000,00	7.500.000.000,00	28.250.000.000,00	376,67
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	277.979.988.690,00	257.758.282.161,00	20.221.706.529,00	7,85
	JUMLAH	2.383.549.396.142,00	2.326.243.397.354,00	57.305.998.788,00	2,46

Penjelasan realisasi pendapatan yang berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

8.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp2.069.819.407.452,00** dan **Rp2.060.985.115.193,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.32 Daftar Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Bagi Hasil Pajak	63.182.845.832,00	61.998.681.797,00	1.184.164.035,00	1,91
2	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam	23.363.770.959,00	22.354.426.884,00	1.009.344.075,00	4,52
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.500.538.688.000,00	1.495.142.625.000,00	5.396.063.000,00	0,36
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	482.734.102.661,00	481.489.381.512,00	1.244.721.149,00	0,26
	JUMLAH	2.069.819.407.452,00	2.060.985.115.193,00	8.834.292.259,00	0,43

1. Bagi Hasil Pajak

Realisasi Pendapatan Dari Bagi Hasil Pajak tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp63.182.845.832,00** dan **Rp61.998.681.797,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.33 Daftar Rincian Bagi Hasil Pajak

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21- LO	40.287.956.659,00	42.009.758.881,00	(1.721.802.222,00)	(4,10)
2	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.957.147.000,00	4.860.587.000,00	96.560.000,00	1,99
3	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Umum- LO	17.937.742.173,00	15.128.335.916,00	2.809.406.257,00	18,57
	JUMLAH	63.182.845.832,00	61.998.681.797,00	1.184.164.035,00	1,91

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Pendapatan dari Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam pada tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp23.363.770.959,00** dan **Rp22.354.426.884,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.34 Realisasi Bagi Hasil Bukan Pajak

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan- LO	76.973.236,00	91.029.825,00	(14.056.589,00)	(15,44)
2	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan- LO	701.234.591,00	525.572.127,00	175.662.464,00	33,42
3	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi- LO	4.944.070.438,00	5.444.182.431,00	(500.111.993,00)	(9,19)
4	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi- LO	5.333.871.605,00	3.022.853.367,00	2.311.018.238,00	76,45
5	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi- LO	11.967.106.758,00	12.934.465.807,00	(967.359.049,00)	(7,48)
6	Bagi Hasil dari Pertambangan Umum - LO	340.514.331,00	336.323.327,00	4.191.004,00	1,25
	JUMLAH	23.363.770.959,00	22.354.426.884,00	1.009.344.075,00	4,52

3. Dana Alokasi Umum

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Umum tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp1.500.538.688.000,00** dan **Rp1.495.142.625.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.35 Realisasi Dana Alokasi Umum

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Dana Alokasi Umum - LO	1.500.538.688.000,00	1.495.142.625.000,00	5.396.063.000,00	0,36
	JUMLAH	1.500.538.688.000,00	1.495.142.625.000,00	5.396.063.000,00	0,36

4. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Pendapatan dari Dana Alokasi Khusus tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp482.734.102.661,00** dan **Rp481.489.381.512,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.36 Realisasi Dana Alokasi Khusus

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	7.610.420.000,00	257.900.000,00	7.352.520.000,00	2.850,92
2	DAK Bidang Kesehatan - LO	31.032.871.765,00	23.912.638.907,00	7.120.232.858,00	29,78
3	DAK Bidang Pendidikan - LO	362.006.017.186,00	345.388.542.634,00	16.617.474.552,00	4,81
4	Dana Alokasi Khusus (DAK)	78.063.207.560,00	107.469.244.971,00	(29.406.037.411,00)	(27,36)
5	Pelayanan Administrasi Kependudukan	4.021.586.150,00	4.461.055.000,00	(439.468.850,00)	(9,85)
	JUMLAH	482.734.102.661,00	481.489.381.512,00	1.244.721.149,00	0,26

Realisasi Dana Alokasi Khusus tahun Anggaran 2018 terdiri dari DAK Fisik senilai **Rp24.535.578.790,00** dan DAK Non Fisik senilai **Rp404.670.895.101,00**.

8.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp35.750.000.000,00** dan **Rp7.500.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.37 Daftar Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Dana Penyesuaian, yaitu Dana Insentif Daerah- LO	35.750.000.000,00	7.500.000.000,00	28.250.000.000,00	376,67
	JUMLAH	35.750.000.000,00	7.500.000.000,00	28.250.000.000,00	376,67

8.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya tahun 2018 dan 2017 adalah senilai **Rp277.979.988.690,00** dan **Rp257.758.282.161,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.38
Daftar Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak- LO	277.979.988.690,00	257.758.282.161,00	20.221.706.529,00	7,85
	JUMLAH	277.979.988.690,00	257.758.282.161,00	20.221.706.529,00	7,85

8.1.3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah tahun 2018 dan 2017 adalah senilai **Rp414.583.268.459,54** dan **Rp141.542.635.290,75** terdiri dari Pendapatan Hibah, Bantuan Keuangan provinsi dan pendapatan lainnya, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.39 Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	59.113.852.370,04	23.093.391.005,71	36.020.461.364,33	155,98
2	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	15.295.290.700,00	3.947.974.220,00	11.347.316.480,00	287,42
3	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO	522.400.000,00	-	522.400.000,00	100,00
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi - LO	125.612.730.116,00	114.094.583.500,00	11.518.146.616,00	10,10
5	Hibah Dana Bos – LO	214.038.960.000,00	-	214.038.960.000,00	100,00
6	Pendapatan Lainnya - LO	35.273,50	406.686.565,04	(406.651.291,54)	(99,99)
	JUMLAH	414.583.268.459,54	141.542.635.290,75	273.040.633.168,79	192,90

8.2. Beban Daerah

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan. Beban LO disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Realisasi Beban Daerah tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp3.115.968.218.224,59** dan **Rp2.983.790.482.652,99** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.40 Realisasi Beban Daerah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi	Realisasi	Lebih / (Kurang)	%
		2018	2017		
1	Beban Pegawai	1.500.857.726.705,00	1.403.315.702.694,00	97.542.024.011,00	6,95
2	Beban Persediaan	284.827.019.610,58	277.035.918.486,48	7.791.101.124,10	2,81
3	Beban Jasa	682.746.439.927,58	648.082.542.662,29	34.663.897.265,29	5,35
4	Beban Pemeliharaan	49.902.799.434,00	51.468.196.670,47	(1.565.397.236,47)	(3,04)
5	Beban Perjalanan Dinas	54.070.394.020,00	39.576.691.627,00	14.493.702.393,00	36,62
6	Beban Hibah	109.142.090.814,00	194.239.730.693,53	(85.097.639.879,53)	(43,81)
7	Beban Bantuan Sosial	1.702.688.774,00	962.851.141,00	739.837.633,00	76,84

8	Beban Penyusutan dan Amortisasi	233.256.392.506,85	163.225.157.905,61	70.031.234.601,24	42,90
9	Beban Penyisihan Piutang	8.407.137.194,58	6.695.153.586,61	1.711.983.607,97	25,57
10	Beban Transfer	191.055.529.238,00	199.188.537.186,00	(8.133.007.948,00)	(4,08)
	JUMLAH	3.115.968.218.224,59	2.983.790.482.652,99	132.177.735.571,60	4,43

8.2.1. Beban Pegawai

Realisasi Beban Pegawai tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp1.500.857.726.705,00** dan **Rp1.403.315.702.694,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.41 Realisasi Beban Pegawai

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Gaji dan Tunjangan	897.671.463.835,00	911.276.209.667,00	(13.604.745.832,00)	(1,49)
2	Tambahan Penghasilan PNS	558.209.671.312,00	460.099.920.499,00	98.109.750.813,00	21,32
3	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	9.385.750.000,00	5.992.800.000,00	3.392.950.000,00	56,62
4	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	12.636.852.180,00	8.289.913.549,00	4.346.938.631,00	52,44
5	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.081.775.816,00	1.025.681.006,00	56.094.810,00	5,47
6	Uang Lembur	21.872.213.562,00	16.631.177.973,00	5.241.035.589,00	31,51
	JUMLAH	1.500.857.726.705,00	1.403.315.702.694,00	97.542.024.011,00	6,95

8.2.1.1 Beban Gaji dan Tunjangan

Beban Gaji dan Tunjangan tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp897.671.463.835,00** dan **Rp911.276.209.667,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.42 Realisasi Beban Gaji dan Tunjangan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi – LO	686.091.839.373,00	707.786.416.442,00	(21.694.577.069,00)	(3,07)
2	Tunjangan Keluarga – LO	63.088.455.695,00	61.636.721.590,00	1.451.734.105,00	2,36
3	Tunjangan Jabatan – LO	12.676.366.398,00	12.144.222.750,00	532.143.648,00	4,38
4	Tunjangan Fungsional – LO	55.692.821.000,00	53.134.744.000,00	2.558.077.000,00	4,81
5	Tunjangan Fungsional Umum – LO	6.054.155.000,00	6.109.070.000,00	(54.915.000,00)	(0,90)
6	Tunjangan Beras – LO	31.809.238.476,00	33.969.247.831,00	(2.160.009.355,00)	(6,36)
7	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus – LO	1.293.261.835,00	1.140.982.260,00	152.279.575,00	13,35
8	Pembulatan Gaji – LO	8.536.817,00	8.594.359,00	(57.542,00)	(0,67)
9	Iuran Jaminan Kesehatan - LO	19.300.359.884,00	19.959.575.281,00	(659.215.397,00)	(3,30)
10	Uang Paket – LO	94.090.500,00	94.248.000,00	(157.500,00)	(0,17)

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
11	Tunjangan Badan Musyawarah – LO	32.459.700,00	32.429.250,00	30.450,00	0,09
12	Tunjangan Komisi – LO	60.382.350,00	60.321.450,00	60.900,00	0,10
13	Tunjangan Badan Anggaran – LO	33.099.150,00	32.886.000,00	213.150,00	0,65
14	Tunjangan Badan Kehormatan – LO	8.526.000,00	9.317.700,00	(791.700,00)	(8,50)
15	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya – LO	58.144.275,00	55.084.050,00	3.060.225,00	5,56
16	Tunjangan Perumahan – LO	7.563.000.000,00	7.576.000.000,00	(13.000.000,00)	(0,17)
17	Uang Jasa Pengabdian – LO	31.500.000,00	14.175.000,00	17.325.000,00	122,22
18	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD – LO	393.120.000,00	393.120.000,00	-	-
19	Tunjangan Badan Legislasi Daerah – LO	16.747.500,00	16.717.050,00	30.450,00	0,18
20	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) – LO	147.278.838,00	2.702.090.455,00	(2.554.811.617,00)	(94,55)
21	BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian (JKM)	5.473.081.044,00	1.805.346.199,00	3.667.734.845,00	203,16
22	Tunjangan Transportasi – LO	5.613.500.000,00	1.874.600.000,00	3.738.900.000,00	199,45
23	Tunjangan Reses – LO	2.131.500.000,00	720.300.000,00	1.411.200.000,00	195,92
	JUMLAH	897.671.463.835,00	911.276.209.667,00	(13.604.745.832,00)	(1,49)

8.2.1.2 Beban Tambahan Penghasilan PNS

Beban Tambahan Penghasilan PNS tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp558.209.671.312,00** dan **Rp460.099.920.499,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.43 Realisasi Beban Tambahan Penghasilan PNS

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	221.233.886.062,00	124.366.282.599,00	96.867.603.463,00	77,89
2	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	715.643.300,00	827.320.800,00	(111.677.500,00)	(13,50)
3	Tunjangan Profesi Guru PNSD	335.364.891.950,00	333.749.317.100,00	1.615.574.850,00	0,48
4	Tambahan Penghasilan Guru PNSD	895.250.000,00	1.157.000.000,00	(261.750.000,00)	(22,62)
	JUMLAH	558.209.671.312,00	460.099.920.499,00	98.109.750.813,00	21,32

8.2.1.3 Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp9.385.750.000,00** dan **Rp5.992.800.000,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.44 Realisasi Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8.704.500.000,00	5.392.800.000,00	3.311.700.000,00	61,41
2	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH	681.250.000,00	600.000.000,00	81.250.000,00	13,54
	JUMLAH	9.385.750.000,00	5.992.800.000,00	3.392.950.000,00	56,62

8.2.1.4 Insentif Pemungutan Pajak Daerah

Insentif Pemungutan Pajak Daerah tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp12.636.852.180,00** dan **Rp8.289.913.549,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.45 Perbandingan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun 2018 dan 2017

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	12.636.852.180,00	8.289.913.549,00	4.346.938.631,00	52,44
	JUMLAH	12.636.852.180,00	8.289.913.549,00	4.346.938.631,00	52,44

Insentif pemungutan pajak daerah dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

8.2.1.5 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp1.081.775.816,00** dan **Rp1.025.681.006,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.46 Perbandingan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Tahun 2018 dan 2017

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar	-	23.238.819,00	(23.238.819,00)	(100,00)
2	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.081.775.816,00	1.002.442.187,00	79.333.629,00	7,91
	JUMLAH	1.081.775.816,00	1.025.681.006,00	56.094.810,00	5,47

Insentif pemungutan retribusi daerah dikelola oleh :

1. Dinas Kesehatan
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
3. Dinas Lingkungan Hidup
4. Dinas Perhubungan
5. Dinas Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
7. Dinas Pertanian
8. Dinas Perdagangan dan Perindustrian

8.2.1.6 Uang Lembur

Uang Lembur tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp21.872.213.562,00** dan **Rp16.631.177.973,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.47 Perbandingan Uang Lembur Tahun 2018 dan 2017

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Uang Lembur PNS	13.252.719.029,00	9.790.386.912,00	3.462.332.117,00	35,36
2	Uang Lembur NonPNS	8.619.494.533,00	6.840.791.061,00	1.778.703.472,00	26,00
	Jumlah	21.872.213.562,00	16.631.177.973,00	5.241.035.589,00	31,51

8.2.2. Beban Persediaan

Realisasi Beban Persediaan tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp284.770.669.230,58** dan **Rp277.035.918.486,48** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.48 Realisasi Beban Persediaan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	83.064.615.774,96	74.100.349.584,73	8.964.266.190,23	12,10
2	Beban Persediaan Bahan/Material	128.007.965.212,62	137.370.254.617,75	(9.362.289.405,13)	(6,82)
3	Beban Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit	-	1.005.875.100,00	(1.005.875.100,00)	(100,00)
4	Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	68.817.314.223,00	57.948.060.084,00	10.869.254.139,00	18,76
5	Beban Hadiah Lomba dan/atau Penghargaan	4.937.124.400,00	6.611.379.100,00	(1.674.254.700,00)	(25,32)
	JUMLAH	284.827.019.610,58	277.035.918.486,48	7.791.101.124,10	2,81

Adapun rincian Beban Persediaan pada Lampiran 8.1

8.2.3 Beban Jasa

Beban Jasa tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp682.746.439.927,58** dan **Rp648.082.542.662,29** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.49 Daftar Beban Jasa

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Beban Jasa Kantor	238.622.649.867,00	195.437.970.056,00	43.184.679.811,00	22,10
2	Beban Premi Asuransi	1.427.677.778,71	1.529.953.127,40	(102.275.348,69)	(6,68)
3	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor	20.440.244.344,58	14.426.592.540,46	6.013.651.804,12	41,68
4	Beban Cetak dan Penggandaan	49.608.774.838,73	59.767.338.849,67	(10.158.564.010,94)	(17,00)
5	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/ Parkir	18.229.753.627,16	15.820.918.397,16	2.408.835.230,00	15,23
6	Beban Sewa Sarana Mobilitas	2.790.719.753,00	1.745.974.615,00	1.044.745.138,00	59,84
7	Beban Sewa Alat Berat	15.878.000,00	404.600.000,00	(388.722.000,00)	(96,08)
8	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	5.579.894.000,00	5.058.436.400,00	521.457.600,00	10,31
9	Beban Makanan dan Minuman	69.286.661.736,00	63.433.611.075,00	5.853.050.661,00	9,23
10	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya	1.877.465.100,00	3.056.687.862,00	(1.179.222.762,00)	(38,58)
11	Beban Pakaian Kerja	2.244.900.600,00	1.490.957.510,00	753.943.090,00	50,57
12	Beban Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	3.296.145.450,00	3.686.814.644,00	(390.669.194,00)	(10,60)
13	Beban Jasa Konsultasi	10.786.105.650,00	15.355.626.429,00	(4.569.520.779,00)	(29,76)
14	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	705.750.000,00	720.000.000,00	(14.250.000,00)	(1,98)
15	Beban Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	6.463.463.766,00	4.619.583.100,00	1.843.880.666,00	39,91
16	Honorarium PNS	98.319.533.606,40	115.547.655.600,60	(17.228.121.994,20)	(14,91)
17	Honorarium Non PNS	125.289.296.110,00	113.679.295.583,00	11.610.000.527,00	10,21
18	Beban Pegawai BLUD	2.239.000.000,00	-	2.239.000.000,00	100,00
19	Beban Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber	25.522.525.700,00	32.300.526.873,00	(6.778.001.173,00)	(20,98)
	JUMLAH	682.746.439.927,58	648.082.542.662,29	34.663.897.265,29	5,35

Adapun rincian Beban Jasa pada Lampiran 8.2

8.2.4. Beban Pemeliharaan

Beban Beban Pemeliharaan tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp49.902.799.434,00** dan **Rp51.468.196.670,47** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.50 Realisasi Beban Pemeliharaan

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	10.469.076.154,00	13.467.988.183,92	(2.998.912.029,92)	(22,27)
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	23.948.789.320,00	20.107.086.382,55	3.841.702.937,45	19,11
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigrasi dan Jaringan	15.484.933.960,00	17.852.117.144,00	(2.367.183.184,00)	(13,26)
4	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	41.004.960,00	(41.004.960,00)	(100,00)
	JUMLAH	49.902.799.434,00	51.468.196.670,47	(1.565.397.236,47)	(3,04)

8.2.5. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp54.070.394.020,00** dan **Rp39.576.691.627,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.51 Realisasi Beban Perjalanan Dinas

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	27.988.599.148,00	21.156.570.918,00	6.832.028.230,00	32,29
2	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	26.081.794.872,00	18.420.120.709,00	7.661.674.163,00	41,59
	JUMLAH	54.070.394.020,00	39.576.691.627,00	14.493.702.393,00	36,62

8.2.6. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp109.142.090.814,00** dan **Rp194.239.730.693,53** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.52 Rincian Realisasi Beban Hibah

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Beban Hibah Kepada Pemerintah	75.088.464.470,00	1.000.000.000,00	74.088.464.470,00	7.408,85
2	Beban Hibah Kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	177.149.690.068,53	(177.149.690.068,53)	(100,00)
3	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	33.868.376.344,00	15.966.148.325,00	17.902.228.019,00	112,13
4	Beban Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	-	123.892.300,00	(123.892.300,00)	(100,00)
5	Beban Hibah Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	185.250.000,00	-	185.250.000,00	100,00
	JUMLAH	109.142.090.814,00	194.239.730.693,53	(85.097.639.879,53)	(43,81)

Realisasi senilai **Rp109.142.090.814,00** tersebut direalisasikan oleh 4 (empat) SKPD dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.53 Realisasi Beban Hibah Barang/Jasa Yang Diserahkan Per SKPD

Dalam Rupiah

NO	NAMA SKPD	Realisasi 2018
1	Dinas Pendidikan	27.500.000,00
2	Dinas Ketahanan Pangan	17.750.000,00
3	PPKD	108.956.840.814,00
4	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah	140.000.000,00
	JUMLAH	109.142.090.814,00

Beban Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat senilai Rp123.892.300,00 merupakan hibah dalam bentuk barang pada tahun 2017.

Beban Hibah Barang/Jasa yang diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat senilai Rp 185.250.000,00 merupakan hibah dalam bentuk uang pada tahun 2018.

Pada tahun 2018 terdapat hibah pada PPKD dalam bentuk aset tetap berupa tanah kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendiknas) untuk pembangunan Kampus ITB senilai **Rp51.441.279.000,00**.

8.2.7. Beban Bantuan Sosial

Realisasi Beban Bantuan Sosial tahun 2018 dan 2017 senilai **Rp1.702.688.774,00** dan **Rp962.851.141,00** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.54 Rincian Realisasi Beban Bantuan Sosial

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih / (Kurang)	%
1	Beban Bantuan Sosial kepada Individu dan atau Keluarga	1.702.688.774,00	725.400.000,00	977.288.774,00	134,72
2	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	-	57.758.000,00	(57.758.000,00)	(100,00)
3	Beban Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan	-	179.693.141,00	(179.693.141,00)	(100,00)
	Jumlah	1.702.688.774,00	962.851.141,00	739.837.633,00	76,84

8.2.8. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp233.256.392.506,85** dan **Rp163.225.157.905,61** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.55 Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	83.687.382.092,60	78.551.808.586,42	5.135.573.506,18	6,54
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	32.694.313.663,68	29.967.644.635,22	2.726.669.028,46	9,10
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	112.407.702.417,02	49.787.354.597,33	62.620.347.819,69	125,78
4	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	4.466.994.333,55	4.918.350.086,64	(451.355.753,09)	(9,18)
	Jumlah	233.256.392.506,85	163.225.157.905,61	70.031.234.601,24	42,90

8.2.8.1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp83.687.382.092,60** dan **Rp78.551.808.586,42** dengan rincian pada lampiran 8.3.

8.2.8.2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp32.694.313.663,68** dan **Rp29.967.644.635,22** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.56 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	32.179.294.029,44	28.887.719.364,58	3.291.574.664,86	11,39
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	255.324.801,18	843.998.084,82	(588.673.283,64)	(69,75)
3	Beban Penyusutan Bangunan Menara	21.490.108,93	15.824.176,35	5.665.932,58	35,81
4	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah	499.000,00	-	499.000,00	100,00
5	Beban Penyusutan Tugu Peringatan	53.116.559,07	45.392.990,82	7.723.568,25	17,01
6	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah	31.837.161,60	37.498.001,60	(5.660.840,00)	(15,10)
7	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain	-	33.087.794,37	(33.087.794,37)	(100,00)
8	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	30.116.110,78	104.124.222,68	(74.008.111,90)	(71,08)
9	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu	122.635.892,68	-	122.635.892,68	100,00
	Jumlah	32.694.313.663,68	29.967.644.635,22	2.726.669.028,46	9,10

8.2.8.3. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp112.407.702.417,02** dan **Rp49.787.354.597,33** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.57 Rincian Realisasi Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Dalam Rupiah

No	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Beban Penyusutan Jalan	104.469.201.464,96	44.483.457.753,19	59.985.743.711,77	134,85
2	Beban Penyusutan Jembatan	150.035.873,38	60.334.298,38	89.701.575,00	148,67
3	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi	5.974.587.217,30	2.922.246.057,13	3.052.341.160,17	104,45
4	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut	-	7.741.750,00	(7.741.750,00)	(100,00)
5	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa	-	152.835.950,00	(152.835.950,00)	(100,00)
6	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	365.562.851,52	771.689.072,80	(406.126.221,28)	(52,63)
7	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	5.733.657,52	2.552.854,33	3.180.803,19	124,60
8	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku	7.410.299,86	15.401.366,67	(7.991.066,81)	(51,89)
9	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	17.736.392,50	23.511.771,25	(5.775.378,75)	(24,56)
10	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	147.700.042,91	145.242.190,15	2.457.852,76	1,69
11	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	168.871.094,31	164.118.484,15	4.752.610,16	2,90
12	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah	76.014.700,00	76.014.700,00	-	-
13	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik	21.156.399,05	21.156.399,05	-	-
14	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik	40.968.025,60	116.516.215,02	(75.548.189,42)	(64,84)
15	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan	306.398.075,58	247.602.757,24	58.795.318,34	23,75
16	Beban Penyusutan Instalasi Gas	26.859.966,67	12.248.300,00	14.611.666,67	119,30
17	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman	9.900.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00	100,00
18	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum	699.396,40	699.396,40	-	-
19	Beban Penyusutan Jaringan Listrik	579.484.380,60	523.138.327,70	56.346.052,90	10,77
20	Beban Penyusutan Jaringan Telepon	39.382.578,86	35.896.953,87	3.485.624,99	9,71
	JUMLAH	112.407.702.417,02	49.787.354.597,33	62.620.347.819,69	125,78

8.2.8.4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp4.466.994.333,55** dan **Rp4.918.350.086,64** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.58 Rincian Realisasi Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Beban Amortisasi Lisensi dan Franchise	28.005.714,20	3.928.571,40	24.077.142,80	612,87
2	Beban Amortisasi Hak Cipta	24.573.000,00	4.906.000,00	19.667.000,00	400,88
3	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	4.414.415.619,35	4.909.515.515,24	(495.099.895,89)	(10,08)
	Jumlah	4.466.994.333,55	4.918.350.086,64	(451.355.753,09)	(9,18)

8.2.9. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp8.407.137.194,58** dan **Rp6.695.153.586,61** dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 8.59 Rincian Realisasi Beban Penyisihan Piutang

dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	7.299.273.353,71	5.800.968.015,18	1.498.305.338,53	25,83
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	27.118.530,00	118.400,74	27.000.129,26	22.804,02
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	216.667.979,35	(216.667.979,35)	(100,00)
4	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	79.359.495,96	25.447.910,12	53.911.585,84	211,85
5	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	60.445.555,79	81.473.529,72	(21.027.973,93)	(25,81)
6	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	940.940.259,12	570.477.751,50	370.462.507,62	64,94
	Jumlah	8.407.137.194,58	6.695.153.586,61	1.711.983.607,97	25,57

8.2.10. Beban Transfer

Beban Transfer tahun 2018 dan 2017 adalah masing-masing senilai **Rp191.055.529.238,00** dan **Rp199.188.537.186,00** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 8.60 Rincian Realisasi Beban Transfer

Dalam Rupiah

NO	Uraian	Realisasi 2018	Realisasi 2017	Lebih (Kurang)	%
1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	15.723.897.591,00	14.482.484.618,00	1.241.412.973,00	8,57
2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	3.388.500.000,00	3.500.582.000,00	(112.082.000,00)	(3,20)
3	Beban Transfer Bagi Bantuan Keuangan Ke Desa	170.448.004.520,00	180.161.551.975,00	(9.713.547.455,00)	(5,39)
4	Beban Transfer Bagi Bantuan Keuangan Lainnya	1.495.127.127,00	1.043.918.593,00	451.208.534,00	43,22
	Jumlah	191.055.529.238,00	199.188.537.186,00	(8.133.007.948,00)	(4,08)

8.3 Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional senilai (**Rp4.621.377.429,59**) terdiri dari Surplus dari Penjualan Aset Non Lancar senilai **Rp317.690.777,00** dan Defisit dari Kegiatan Penjualan Aset Non Lancar senilai (**Rp455.514,89**) serta Defisit dari kegiatan Non Operasional Lainnya senilai (**Rp4.938.612.691,70**). Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional tersebut diperoleh dari penjualan aset tetap.

8.4 Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa tahun 2018 senilai **Rp2.610.109.700,00** merupakan belanja tak tertuga pada PPKD.

8.5 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO tahun 2018 senilai **Rp283.722.410.643,04** merupakan selisih nilai Pendapatan dan Beban. Pendapatan Operasional tahun 2018 senilai **Rp3.406.922.115.997,22**, beban operasional senilai **Rp3.115.968.218.224,59** sehingga diperoleh surplus dari kegiatan operasional senilai **Rp290.953.897.772,63**. Defisit dari kegiatan non operasional senilai (**Rp4.621.377.429,59**) dan beban luar biasa senilai **Rp2.610.109.700,00** sehingga Surplus/Defisit LO tahun 2018 senilai **Rp283.722.410.643,04**.

BAB IX
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
ARUS KAS

9.1 Penjelasan Laporan Arus Kas

9.1.1 Definisi Aktivitas Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas selama periode tertentu

Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintahan selama satu periode akuntansi.

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi antara lain berupa penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja tak terduga dan transfer keluar.

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan antara lain bersumber dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan antara lain penggunaan kas untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya.

Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan antara lain pencairan dana cadangan, hasil penjualan aset/kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan dari pinjaman, penjualan surat utang, penerimaan kembali pinjaman dan penerimaan piutang. Sedangkan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan antara lain pembentukan dana cadangan, pembayaran penyertaan modal, pembayaran pokok pinjaman dan pemberian pinjaman jangka panjang.

Aktivitas Non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non anggaran merupakan penerimaan dan pengeluaran dengan jumlah yang sama dari perhitungan pihak ketiga dan/atau kiriman uang masuk dan kiriman uang keluar.

9.1.2 Posisi Kas

Posisi Kas per 31 Desember 2018 senilai **Rp300.120.443.501,73** terdiri dari:

Tabel 9.1 Posisi Kas

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Kas di Kas Daerah	255.823.706.505,00	268.960.174.443,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	1.508.000,00	48.120.200,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	612,00	25.000.900,00
4	Kas di Bendahara BLUD	7.616.393.726,73	2.788.459.049,51
5	Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP	33.997.037.726,00	31.442.904.356,00
6	Saldo Akhir Kas di BOS	2.681.796.932,00	733.199.189,00
JUMLAH		300.120.443.501,73	303.997.858.137,51

Terdapat selisih antara Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) LRA dengan Posisi Kas pada Laporan Arus Kas senilai **Rp62.358.849,00** yang merupakan koreksi realisasi anggaran dana Kapitasi JKN tahun lalu berdasarkan temuan Inspektorat atas pemeriksaan tahun 2017.

Sehingga posisi kas riil per 31 Desember 2018 senilai **Rp300.120.443.501,73** mengalami penurunan senilai **Rp3.939.773.484,78** atau **1,28%** jika dibandingkan dengan posisi kas per 31 Desember 2017 senilai **Rp303.997.858.137,51**. penurunan tersebut disebabkan oleh :

Tabel 9.2 Aktivitas Kas

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	Aktivitas Operasi	511.587.690.368,22
2	Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(509.984.481.127,00)
3	Aktivitas Pembiayaan	(5.542.141.626,00)
4	Aktivitas Non anggaran	(841.100,00)
Penurunan Kas		(3.939.773.484,78)

9.1.2.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 senilai **Rp511.587.690.368,22** mengalami penurunan senilai **Rp89.703.355.636,56** atau **14,92%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp601.291.046.004,78**. Arus Kas dari Aktivitas Operasi diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

a. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 senilai **Rp3.682.128.807.304,60** mengalami kenaikan senilai **Rp92.311.051.032,75** atau **2,57%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp3.589.817.756.271,85**. Arus Masuk Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 9.3 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Pendapatan Pajak Daerah	207.896.011.946,00	186.141.908.461,00
2	Pendapatan Retribusi Daerah	42.630.642.182,00	40.173.839.689,00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	7.895.373.711,00	7.215.262.367,00
4	Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah	325.449.356.307,60	544.081.521.790,85
5	Dana Bagi Hasil Pajak	63.182.845.832,00	71.262.835.258,00
6	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	23.972.292.072,00	26.620.362.288,00
7	Dana Alokasi Umum	1.500.538.688.000,00	1.495.142.625.000,00
8	Dana Alokasi Khusus	482.734.102.661,00	481.489.381.512,00
9	Dana Penyesuaian	405.992.221.000,00	367.996.820.000,00
10	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	282.185.583.477,00	255.598.616.406,00
11	Pendapatan Hibah	214.038.960.000,00	-
12	Pendapatan Lainnya	125.612.730.116,00	114.094.583.500,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	3.682.128.807.304,60	3.589.817.756.271,85

b. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2018 senilai **Rp 3.170.541.116.936,38** mengalami kenaikan senilai **Rp182.014.406.669,31** atau **6,09%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp2.988.526.710.267,07** terdiri dari:

Tabel 9.4 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Operasi

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Belanja Pegawai	1.717.527.604.248,00	1.626.858.292.940,00
2	Belanja Barang dan Jasa	829.887.402.162,38	769.554.060.675,07
3	Belanja Hibah	57.515.561.814,00	31.466.148.325,00
4	Belanja Bantuan Sosial	1.702.688.774,00	962.851.141,00
5	Belanja Tidak Terduga	2.610.109.700,00	-
6	Bagi Hasil Pajak	15.723.897.591,00	14.482.484.618,00
7	Bagi Hasil Retribusi	3.388.500.000,00	3.500.582.000,00
8	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa	540.690.225.520,00	540.658.371.975,00
9	Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.495.127.127,00	1.043.918.593,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	3.170.541.116.936,38	2.988.526.710.267,07

9.1.2.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan per 31 Desember 2018 senilai **(Rp509.984.481.127,00)** mengalami kenaikan senilai **Rp97.858.412.863,00** atau **16,10%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **(Rp607.842.893.990,00)**. Arus kas bersih tersebut diperoleh dari selisih antara arus kas masuk dengan arus kas keluar yang terdiri dari:

Tabel 9.5 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Aset Non keuangan	939.459.335,00	1.725.319.970,00
2	Arus keluar Kas dari Aktivitas Aset Non keuangan	510.923.940.462,00	609.568.213.960,00
	JUMLAH	(509.984.481.127,00)	(607.842.893.990,00)

Arus Masuk dan Arus kas keluar dari aktivitas non keuangan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. **Arus Masuk Kas**

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan per 31 Desember 2018 senilai **Rp939.459.335,00** mengalami penurunan senilai **Rp785.860.635,00** atau **45,55%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp1.725.319.970,00**. Arus Masuk Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 9.6 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	508.395.497,00	597.630.000,00
2	Pendapatan Penjualan atas Aset Tetap Lainnya	431.063.838,00	1.127.689.970,00
	Jumlah Arus Masuk Kas	939.459.335,00	1.725.319.970,00

b. **Arus Keluar Kas**

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan per 31 Desember 2018 senilai **Rp510.923.940.462,00** mengalami penurunan senilai **Rp98.644.273.498,00** atau **16,18%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp609.568.213.960,00**. Arus Keluar Kas tersebut terdiri dari:

Tabel 9.7 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Investasi Aset Non keuangan

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Belanja Tanah	8.435.062.000,00	87.497.995.340,00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	88.822.429.289,00	74.338.697.665,00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	130.132.103.447,00	156.383.718.216,00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	252.384.857.989,00	264.837.489.078,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	25.918.284.042,00	7.460.158.300,00
6	Belanja Modal BLUD	5.231.203.695,00	3.891.756.698,00
7	Belanja Modal BOS	-	15.158.398.663,00
	Jumlah Arus Keluar Kas	510.923.940.462,00	609.568.213.960,00

9.1.2.3 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2018 senilai **(Rp5.542.141.626,00)** mengalami penurunan senilai **Rp24.542.141.626,00** atau **129,17%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp19.000.000.000,00**. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan diperoleh dari selisih antara Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9.8 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pembiayaan

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan	19.856.169.293,00	40.000.000.000,00
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan	25.398.310.919,00	21.000.000.000,00
JUMLAH		(5.542.141.626,00)	19.000.000.000,00

Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Arus Kas Masuk

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2018 senilai **Rp19.856.169.293,00** mengalami penurunan senilai **Rp20.143.830.707,00** atau **50,36%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp40.000.000.000,00**. Arus Masuk Kas tersebut diperoleh dari:

Tabel 9.9 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Pencairan Dana Cadangan	56.169.293,00	40.000.000.000,00
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	19.800.000.000,00	-
JUMLAH		19.856.169.293,00	40.000.000.000,00

b. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2018 senilai **Rp25.398.310.919,00** mengalami kenaikan senilai **Rp4.398.310.919,00** atau **20,94%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp21.000.000.000,00**. Arus Keluar Kas tersebut diperoleh dari:

Tabel 9.10 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Pembiayaan

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Pembentukan Dana Cadangan	-	20.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.772.881.700,00	1.000.000.000,00
3	Pembayaran Pokok Utang	20.625.429.219,00	-
JUMLAH		25.398.310.919,00	21.000.000.000,00

9.1.2.4 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2018 senilai **(Rp841.100,00)** mengalami penurunan senilai **Rp3.673.272,00** atau **81,37%** jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih per 31 Desember 2017 senilai **(Rp4.514.372,00)** Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran diperoleh dari selisih antara Arus Kas Masuk dengan Arus Kas Keluar dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non anggaran per 31 Desember 2018 senilai **(Rp841.100,00)** diperoleh dari selisih antara Arus Masuk Kas dengan Arus Keluar Kas Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9.11 Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non Anggaran

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Keuangan	223.549.975.500,35	217.879.612.329,18
2	Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Keuangan	223.550.816.600,35	217.884.126.701,18
JUMLAH		(841.100,00)	(4.514.372,00)

Arus Masuk Kas dan Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Arus Masuk Kas

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2018 senilai **Rp223.549.975.500,35** mengalami kenaikan senilai **Rp5.670.363.171,17** atau **2,60%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp217.879.612.329,18**. Arus Masuk Kas tersebut merupakan penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9.12 Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

(dalam Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	64.010.103.404,00	66.111.666.469,00
2	Tabungan Perumahan Pegawai	1.281.720.000	1.332.215.000,00
3	PPh Pasal 21 (Gaji+Tunjangan+ Honorarium)	1.294.836.083	59.769.025.625,00
4	Askes	19.298.530.011	19.902.593.868,00
5	PPN Fihak Ketiga	57.927.468.605,63	57.385.278.545,46
6	PPh Fihak Ketiga	79.737.317.396,72	13.378.832.821,72
JUMLAH		223.549.975.500,35	217.879.612.329,18

b. Arus Keluar Kas

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2018 senilai **Rp223.550.816.600,35** mengalami kenaikan senilai **Rp5.666.689.899,17** atau **2,60%** jika dibandingkan dengan per 31 Desember 2017 senilai **Rp217.884.126.701,18**. Arus Keluar Kas tersebut merupakan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9.13 Arus Keluar Kas Dari Aktivitas Non Anggaran

Dalam Rupiah

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
1	Iuran Wajib Pegawai (IWP)	64.010.103.404,00	66.111.666.469,00
2	Tabungan Perumahan Pegawai	1.281.720.000	1.332.215.000,00
3	PPh Pasal 21 (Gaji+Tunjangan+ Honorarium)	1.294.836.083	59.769.025.625,00
NO	URAIAN	31 DESEMBER 2018	31 DESEMBER 2017
4	Askes	19.298.530.011	19.902.593.868,00
5	PPN Fihak Ketiga	57.927.468.605,63	57.388.752.826,46
6	PPh Fihak Ketiga	79.738.158.496,72	13.379.872.912,72
JUMLAH		223.550.816.600,35	217.884.126.701,18

9.2 Penjelasan Saldo Akhir Kas

Saldo akhir kas per 31 Desember 2018 sebesar Rp300.120.443.501,73 berasal dari saldo akhir :

Kas di Kas Daerah	Rp255.823.706.505,00
Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 1.508.000,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 612,00
Kas di BLUD	Rp 7.616.393.726,73
Kas di Bendahara Dana	
Kapitasi JKN pada FKTP	Rp 33.997.037.726,00
Kas di Bendahara BOS	Rp 2.681.796.932,00

Dengan rincian sebagai berikut :

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp 511.587.690.368,22
Arus Kas Bersih dari Aktivitas	
Investasi Aset Non Keuangan	(Rp509.984.481.127,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	Rp (5.542.141.626,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	Rp. (841.100,00)
Kenaikan (Penurunan) Kas Bersih Selama TA. 2018	(Rp 3.939.773.484,78)

Saldo Awal Kas dan Setara Kas per 1 Januari 2018 Rp 303,997,858,137.51

Saldo Awal Kas dan Setara Kas

per 31 Desember 2018 Rp. 300,058,084,652.73

Terdapat selisih antara Saldo Kas dengan perhitungan arus kas senilai **Rp62.358.849,00** yang merupakan koreksi realisasi anggaran dana Kapitasi JKN tahun lalu berdasarkan temuan Inspektorat atas pemeriksaan tahun 2017.

BAB X

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

10.1. EkuitasAwal

Saldo Ekuitas Awal senilai **Rp3.703.956.277.909,44** merupakan nilai ekuitas akhir tahun 2017.

10.2. Surplus/Defisit-LO

Saldo Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2018 senilai **Rp283.722.410.643,04** merupakan surplus/defisit dari kegiatan operasional senilai **Rp290.953.897.772,63** ditambah surplus/defisit dari kegiatan non operasional senilai **(Rp4.621.377.429,59)** dikurangi pos luar biasa senilai **Rp2.610.109.700,00**. Surplus dari kegiatan operasional merupakan selisih lebih antara Pendapatan-LO senilai **Rp3.406.922.115.997,22** dan Beban-LO senilai **Rp3.115.968.218.224,59**.

10.3. RK PPKD

Saldo RK PPKD per 31 Desember 2018 senilai **Rp0,00**.

10.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar per 31 Desember 2018 senilai **(Rp13.822.700.861,73)**. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar merupakan koreksi atas nilai asset dan ekuitas pada laporan keuangan tahun 2018 berupa :

Tabel 10.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dalam Rupiah

No	Uraian	Jumlah
1	Koreksi Saldo Awal	62.358.849,00
2	Koreksi Aset Lancar	13.327.091.137,73
3	Koreksi Aset Tetap dan Penyusutan	(27.241.942.957,27)
4	Koreksi Pendapatan	440.502.544,68
5	Koreksi Kewajiban	(4.385.925.102,93)
5	Pembiayaan dan Investasi	3.975.214.667,06
	JUMLAH	(13.822.700.861,73)

Rincian dampak kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada tiap SKPD dapat dilihat pada Lampiran 10.1.

10.5. Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas akhir pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai **Rp3.973.855.987.690,75.**

10.6 Pengungkapan atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Berdasarkan Penerapan Basis Akrua, untuk Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, sedangkan untuk Entitas Pelaporan Menggunakan Basis Akrua.

Laporan Keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun berdasarkan basis tersebut diatas.

10.7 Hal-hal Penting yang Perlu Diungkapkan

Terdapat revisi pada paket regulasi mengenai Akuntansi Pemerintah yaitu :

1. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Cirebon nomor 31 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah. Beberapa poin yang direvisi adalah adanya tambahan penetapan pemetaan kode rekening LRA, LO dan Neraca.
2. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Cirebon nomor 30 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Poin yang direvisi adalah pencatatan persediaan yang usang/kadaluarsa serta pengakuan nilai pasca perolehan aset tetap.

BAB XI

PENUTUP

Di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, terdapat penegasan di bidang pengelolaan keuangan, yaitu bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari Presiden sebagian dilimpahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku Kepala Pemerintah Daerah. Ketentuan tersebut berdampak pada pengaturan pengelolaan keuangan daerah, yaitu bahwa Kepala Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah sebagai bagian dari Pemerintah Daerah. Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah disusun dan disajikan sesuai dengan standarakuntansi pemerintahan. Dalam hal ini diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2018 disusun dan disajikan sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018. Dalam penyusunan dan penyajiannya berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah. Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai penjelasan atas Laporan Keuangan Daerah.

Sumber, 16 Agustus 2019


PH. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

IMRON